



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN
PEREMPUAN PASCA KONFLIK DI WAY PANJI
LAMPUNG SELATAN
(Studi Perspektif Sosiologi Hukum)**

Peneliti

Oleh: Dr. Drs. H.M.Wagianto, SH., MH

**SEKSI PENERBITAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
2014**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Hak Cipta pada pengarang : Dr. Drs. H.M.Wagianto, SH., MH

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan Pasca Konflik di Way Panji Lampung Selatan (Studi Perspektif Sosiologi Hukum)

Cetakan Pertama : 2014

Desain Cover: Osa

Computer Setting, Lay out oleh : Osa

Dicetak Oleh : Percetakan Osa

Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarama
Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

Kode Penerbit :

ISBN : 978-602-1319-12-3



SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013, dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013.

Kami menyambut baik hasil penelitian individu yang dilaksanakan oleh saudara Dr. Drs. H.M.Wagianto, SH., MH dengan judul: "Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan Pasca Konflik di Way Panji Lampung Selatan (Studi Perspektif Sosiologi Hukum)", berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor: 74.a Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2013
**Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,**


Dr. Syamsuri Ali, M.Ag
NIP. 19611125 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan hidayah dan pertolongannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Deranjak dari Surat Edaran tentang Penelitian dari Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung. Kemudian diajukan melalui SK. Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor: 74.a Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Penerimaan Bantuan Penelitian Mandiri Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013. Adapun Penelitian berlangsung sejak 5 Juli 2013 s/d 5 Oktober 2013 dan telah terselesaikan. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Bpk. Rektor IAIN Raden Intan Lampung
2. Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan rekomendasi dan SK untuk menjadi Peserta Bantuan Penelitian Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung tahun 2013.
3. Yth. Bpk. Ketua Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Yth. Bpk/Ibu Dosen Kasubag. Akademik Fakultas Syari'ah yang lebih membantu, mendorong dan memfasilitasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Yth. Ibu Ketua KOMNAS HAM dan Narasumber lainnya.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam pengantar ini, namun semua yang terlibat penulis menghaturkan terimakasih.

Demikian pengantar dalam penelitian ini, sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, maka penelitian ini belum sempurna. Oleh karena itu, mohon kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 27 Desember 2013
Peneliti

Dr. Drs. H.M. Wagianto, SH.,MH
NIP. 19621111994031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Landasan Teori	8
F. Jadwal Penelitian	19
G. Perkiraan Biaya Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam serta Sosiologi Hukum	20
B. Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Hukum Islam	48
C. Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kajian Sosiologi Hukum	58
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Paradigma Penelitian	71
B. Lokasi Penelitian	73
C. Spesifikasi penelitian	76
D. Jenis Data	76
E. Instrumen Pengumpulan Data	79
F. Teknik Pengumpulan Data	79

BAB IV HASIL PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK- ANAK PASCA KONFLIK WAY PANJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan	83
B. Penyebab Konflik di Way Panji Kabupaten lampung Selatan	97
C. Upaya Penyelesaian Konflik di Way Panji Lampung Selatan	121
D. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dio way Panji Kabupaten lampung Selatan	128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	147
B. Saran	114

Daftar Pustaka.....	151
---------------------	-----

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meniti awal keberadaan manusia tidak terlepas dari keberadaan manusia di muka bumi. Anak terlahir dari seorang perempuan atau seorang ibu, tentunya ada seorang laki-laki yang memberikan benih sehingga proses perjalanan waktu dan peradaban manusia dari yang tidak ada aturan menjadi ada aturan. Lintasan sejarah keberadaan manusia diawali dari Nabi Adam AS dan Siti Hawa, manusia pertama yang diciptakan Allah SWT, manusia sebagai anak cucu Adam terus bertambah. Secara kodrati manusia diciptakan berpasang-pasangan agar diantara keduanya terdapat kecenderungan sebagai suami isteri, sebagaimana Allah berfirman pada Surat al Nis ayat (1):“...Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak...”.

Hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut bahwa, manusia adalah makhluk yang dipilih Allah untuk mempunyai keturunan demi kelangsungan kehidupannya di muka bumi. Manusia merupakan ciptaan Allah yang terbaik dan termulia dengan segala bentuknya, seluruh tubuh manusia merupakan anugerah dari Allah SWT.¹

Kemuliaan manusia adalah karena manusia diberikan akal sebagai bukti untuk membedakan dari makhluk ciptaan-Nya. Manusia juga mempunyai nafsu, salah satunya adalah nafsu

¹. Muhammad Immanudin Abdurahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, Cet. Ke-II, Yayasan Pembina Sari Insan, Jakarta, 1999, hal. 156

sahwati yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Inti dari Firman Allah SWT. di atas, penciptaan manusia, kehidupan manusia dalam berumah tangga yang dihiasi dengan kasih dan sayang dijadikan Allah sebagai sarana/tanda-tanda bagi orang yang berfikir, karena pada dasarnya “penciptaan manusia itu sendiri tidak lain adalah agar manusia itu menghambakan diri”.² Maksudnya, manusia harus tunduk dan taat pada ketentuan Allah, melaksanakan apa yang dipertintahkan, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT.

Salah satu bentuk ketaatan manusia pada Allah SWT adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan Allah SWT, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam.

Islam mengkonsepsikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqan gholidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya (perkawinan) adalah merupakan ibadah.³ Oleh karena itu, niat perkawinan hendaknya dilakukan berdasarkan niat semata-mata sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Perintah untuk kawin ditujukan pada mereka yang dianggap dewasa dan mampu (*mukallaf*). Rasulullah SAW. bersabda:

“Wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu (punya bekal dan biaya) hendaklah kawin, sebab kawin akan lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kehormatan,

². Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al Qur' ndan al Sunnah*, Cet. Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hal. 14

³. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, D r al Fikr, Bairut, 1978, hal. 200-201

dan jika belum mampu hendaklah berpuasa karena puasa akan menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari Muslim).⁴

Yusuf Qardawi menyatakan, perkawinan wajib bagi setiap muslimin jika mampu dan apabila ia takut dan khawatir akan mengakibatkan berbuat dosa,⁵ seperti melakukan perzinahan, prostitusi yang menjadi penyakit masyarakat, pelecehan seksual, penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Firman Allah SWT dalam Surat al Isr : 32 :

*“Dan Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan”.*⁶

Oleh karena itu untuk melindungi anak dan perempuan, maka pentingnya lembaga perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Aturan di dalamnya mengatur seluruh proses perkawinan, kekuatan hukumnya, tanggung jawab dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan maupun rusaknya perkawinan.

Eksistensi perkawinan yang sah akan melindungi anak-anak dan perempuan. Di sisi lain perlu diperhatikan tentang pentingnya perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁴Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur' n dan al Sunnah*, Cet. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000, hal.11

⁵Yusuf Qardawi, *al Hal l wa al Har m f al Isl m*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk, Intermedia, Solo, , 2003, hal. 247

⁶Departemen Agama RI, *al Qur' n dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta, 1979, hal. 429

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Pemahaman perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maksudnya bahwa seorang anak dilindungi oleh hukum tanpa adanya perbedaan dari segi apapun, melainkan sama di muka hukum, begitu pula terhadap kaum perempuan yang rentan terhadap kekerasan, pelecehan dan tindakan yang tidak manusiawi sering tertuju kepada perempuan. Mengingat keduanya anak-anak dan perempuan patut dilindungi dari segala aspek kejahatan dan atau terjadinya musibah, peperangan, konflik dan sebagainya.

Secara normatif, UU No. 1/74 dan UU No.23/2002 pada hakikatnya harus dapat melindungi anak-anak. Ditambah lagi keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan anak. Dalam UU No.39/1999 ditentukan:

1. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan {Vide Pasal 1 ayat (5)};
2. Setiap anak dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan {Vide Pasal 3 ayat (1)}, dan;
3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Vide pasal 3 ayat (2)).

UU No. 39/1999 memberikan perlindungan terhadap anak dari sejak dalam kandungan, setelah lahir dan sebelum

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *UU No.23 Tahun 2002, PA*, hal. 3

memasuki usia dewasa, anak berhak atas hak-haknya sebagai Hak Asasi Manusia, maupun hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Landasan Filosofi, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam perspektif UU No.39/99 Perlindungan Anak bersifat universal/untuk semua anak, sebagaimana matan hadist: “*Kullu maul din yûladu ‘al al fitrah*”, bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Hal ini menjadi semangat ruh Islam dalam memperjuangkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Landasan filosofi bangsa, yakni Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945 baik secara implisit maupun eksplisit telah melindungi anak-anak. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Hukum Islam, sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci (*fitrah*), hanya orang tuanya yang akan menjadikan majusi atau nasrani⁸ Berdasarkan sabda Rasulullah SAW , maka secara filosofi, hukum Islam memberi perlindungan yang sama terhadap semua anak yang lahir, tanpa diskriminasi.

Beberapa landasan hukum dan argumentasi yang mengindikasikan pentingnya:

1. Perlindungan anak tanpa memandang latar belakang, kultur, budaya, kepercayaan, strata sosial dan lain sebagainya;
2. Perlindungan anak menjadi hak anak sejak dalam kandungan sampai tumbuh dewasa;
3. Perlindungan anak dan perempuan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Mengingat kenyataan setiap ada bencana, peperangan, perceraian dan konflik terbukti anak-anak dan perempuan sering menjadi korban dari suatu peristiwa

⁸Muhammad Ismail, *Subul al Salam*, Juz III, D r al Fikr, Bairut, 1978, hal. 76

tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukumnya.

4. Mengamati konflik di desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yang telah berlangsung dari bulan oktober 2012 telah menyisakan berbagai permasalahan. Meskipun sudah ada perdamaian yang difasilitasi oleh berbagai pihak, namun dalam tataran sosiologi hukum perlu adanya upaya untuk menyelesaikan gejala, penyebab dan pemulihan terhadap konflik antar desa yang dipicu dari berbagai sumber konflik.

Berdasarkan kesenjangan dan latar belakang yang diungkapkan, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Pasca Konflik di Desa Pandan dan Balinuraga Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Studi Perspektif Sosiologi Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya konflik antar dua desa di Way Panji Lampung Selatan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik di Way Panji Kabupaten Lampung Selatan?
3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak-anak dan Perempuan Pasca Konflik di Way Panji Lampung Selatan dalam perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

- a. Menemukan penyebab terjadinya konflik antar dua desa di Way Panji Lampung Selatan, selanjutnya dapat

dijadikan acuan untuk penyelesaian konflik secara permanen.

- b. Menemukan data cara penyelesaian konflik dilapangan, untuk dikaji dalam perspektif sosiologi hukum, kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif.
- c. Menemukan tatacara perlindungan hukum terhadap anak-anak dan perempuan pasca konflik di Way Panji Lampung Selatan. Menjadi konsklusi untuk perlindungan anak-anak dan perempuan secara perpektif dan harmonisasi hukum untuk kesejahteraan masyarakat di Way Panji Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran tentang kajian teoritis perlindungan anak dan perempuan pasca konflik di Lampung Selatan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor:... , Undang-Undang No. KDRT, dan UU Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyelesaian pasca konflik di Lampung Selatan memberikan konsep perlindungan anak dan perempuan memberikan sumbangsih pemikiran melalui pendekatan sosiologis, di antaranya meliputi pendekatan psykologi, sosial, kearifan lokal dan hukum Islam. Selain itu menjadi secerach acuan bagi peneliti lanjutan yang tertarik meneliti tentang perlindungan anak dan perempuan dalam berbagai kajian.

b.Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaranfaktual tentang penyebab terjadinya konflik,

bagaimana upaya penyelesaian konflik, perlindungan anak dan perempuan pasca konflik di Lampung Selatan. Selain itu diharapkan dapat menjadi kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan khususnya pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Di samping sebagai bentuk kongkrit pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya dapat dijadikan buku terkait konsentrasi Mata Kuliah Sosiologi Hukum di lingkungan IAIN Raden Intan umumnya bagi pembaca, pemerhati masalah anak dan perempuan serta praktisi lainnya.

D. Kajian Pustaka

Studi ini mengambil fokus pada masalah perlindungan anak dan perempuan dalam kajian pustaka, sudah banyak penelitian yang memfokuskan pada perlindungan anak dan kaum perempuan, di antaranya hasil penelitian dan kajian pustaka:

1. Perlindungan anak hasil perkawinan mut'ah dan sirri dalam perspektif politik hukum (Penelitian: H. Wagianto);
2. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak (Buku: Ahmad Kamil dan Faujan);
3. Konflik dan Perdamaian (Penelitian: Direktori Penelitian Agama);
4. Pemberdayaan Perempuan (Kemeneg. Pemberdayaan Perempuan RI);
5. Kedudukan Anak menurut hukum (Penelitian: Dasril);
6. Pengaruh Budaya hukum terhadap fungsi hukum (Essmi Warasih).
7. Masalah Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis (Satjipto Rahardjo);

8. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor Tahun tentang KDRT.

Untuk itu diperlukan kerangka pemikiran sebagai pedoman atau arahan dalam pembahasan.

1. Teori hukum Adat, yaitu Teori *Receptio In Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1823) diterima dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang kemudian dikenal dengan teori *receptie in complexu*. Selanjutnya ia menulis dalam hukum famili dan hukum waris Islam di Jawa dan Madura. Pada masa perkembangannya, eksistensi hukum adat yang sudah ada sebelumnya, maka “hukum adat setempat dalam kenyataannya sering menyesuaikan diri dengan hukum Islam”,⁹ Hal ini menunjukkan, hukum adat di Indonesia ada pengaruhnya dari hukum Islam.

Keterkaitannya dengan landasan teori, bahwa penyelesaian konflik tidak semuanya dapat diselesaikan melalui sarana penal (melalui peradilan), melainkan melalui pendekatan kearifan lokal atau dapat dikatakan dengan hukum adat. Hal ini bisa digunakan sebagai mediasi dan penyelesaian konflik menuju suatu penyelesaian yang permanent.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 58

Oleh karena itu praktik kawin mut'ah dan sirri sekarang ini sudah bergeser dari landasan Islam yang sebenarnya, melainkan sudah menjadi budaya pada sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut. Untuk itu diperlukan teori *Receptie in complexu* dalam penelitian ini.

2. Teori Sosio Hukum

Teori Sosiologi hukum, terkait dengan penyelesaian konflik di Lampung Selatan, ada teori: *As Toot As Social engeneering*: teori ini dapat dipergunakan untuk menggerakkan kemampuan sosial masyarakat dalam mewujudkan suatu peraturan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Teori hukum Islam

Metode *ijtihad* dalam Ushul Fiqh dapat digunakan dengan dua hal, yakni: pertama pendekatan dalam *istinbath* hukum dan yang kedua metode *ijtihad* itu sendiri.

- a. Pendekatan dalam *istinbath* hukum, bahwa makna *istinbath*: usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya.¹⁰ Pemahaman dari makna itu, yakni mengeluarkan dalil-dalil hukum yang bersumber dari al Qur' n dan al had st. Oleh karena itu harus memahami tentang *mash diral ahk m* terutama yang menyangkut sumber hukum. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan (1) kaedah-daedah kebahasaan dalam proses penggalan hukum Islam merupakan pendekatan yang tertua, seperti para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah kebahasaan (*qawa'id al lughawiyah*). (2) pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud

¹⁰ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 42

syari'ah (*maqshid al syari'ah*). Maksudnya pendekatan menyangkut kehendak *Syari'*, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqashid al syari'ah*.

- b. Pendekatan *ijtihad*. Para ulama telah merumuskan beberapa metode *ijtihad* yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan *nash* (*nash* al qur' n dan al had st), yakni dengan *ijm '*, *qiy s*, *istishhab*, *istihs n*, *istishl h*, *sadd al zar 'ah*, dan *'urf*.¹¹

Penjelasannya *ijm* dapat dipahami suatu kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum atau suatu konsensus para ulama terhadap suatu masalah hukum. *Qiy s* atau analogi ini mengasumsikan bahwa permasalahan hukum terkemudian dapat dipecahkan dengan melihat preseden hukum sebelumnya, setelah sebelumnya melihat aspek-aspek yang mungkin di analogikan. *Istishh b* adalah memberlakukan ketetapan (masa lalu, *madhi*) pada masa sekarang dan mendatang selama tidak ada dalil yang mengubahnya. *Istihs n* dimaksudkan memandang baik terhadap sesuatu.

Istishl h dimaksudkan keadaan yang baik. *Sadd al Zar 'ah* dimaksudkan jalan ke arah tujuan. *'Urf* adalah perkataan atau perbuatan yang dikenal di kalangan masyarakat dan menjadi adat kebiasaan di antara mereka.

Berdasarkan beberapa teori hukum Adat dan hukum Islam serta sosiologi hukum dapat menjadi landasan dalam penggalan hukum terhadap perlindungan anak dan perempuan pasca konflik di Lampung Selatan. Mengingat hukum Adat dan hukum Islam merupakan salah satu sumber dalam pelebagaan hukum nasional.

¹¹*Op. Cit.*, hal. 53

Hukum Islam spesifikasinya mengenai hukum perkawinan dapatlah dijadikan suatu semangat untuk menggali (*istimbath hukum*) yang mengacu pada perpektif politik hukum di Indonesia. Berdasarkan Ragaan 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofi untuk melahirkan hukum-hukum yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Untuk melihat hirarki dalam pelebagaan hukum di Indonesia, bahwa : (1) Hukum Islam menjadi salah satu sumber pembentukan hukum Nasional; (2) Hukum adat juga menjadi salah satu sumber pembentukan. Lalu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat melahirkan suatu Undang-Undang, seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Pada tataran masyarakat Undang-Undang tersebut telah diberlakukan oleh Pemerintah. Mengingat prinsip Undang-Undang itu mengikat dan bagi seluruh Warga Negara Indonesia serta Masyarakat dianggap telah memahami. Padahal pada kenyataannya masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang peraturan yang berlaku. Akibatnya masih banyak pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, sebagai contohnya peraturan tentang perkawinan.

Peraturan perkawinan yang telah diundangkan sejak tahun 1974 masih juga dilaksanakan dengan sepenuhnya, terbukti adanya kawin mut'ah dan sirri. Akibat dari perkawinan tersebut yang dirugikan adalah perempuan dan anak-anak. Terkait perlindungan anak, maka Temuan konsep: Adanya peraturan dibawah Undang-Undang yang mengatur tentang

perlindungan anak dan perempuan pasca konflik di berbagai daerah.

4. Teori Struktural Fungsional

Teori ini dikemukakan oleh *Talcott Parsons*, yakni Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih modern itu diikuti oleh adanya proses diferensiasi integrasi. Ia berpendapat ini disebutkan dengan *struktural fungsional*.¹² Pendapat Parsons, bahwa fungsi utama dari suatu sistem hukum adalah melakukan fungsi integratif dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.¹³

Selain itu dalam menjalankan fungsi tersebut hukum tidak sepenuhnya otonom, oleh karena ia hanya dapat menjalankan fungsinya tersebut dengan dan apabila menerima pengarahan dari sub sistem budaya yang memberikan masukan tentang nilai-nilai mana yang ditunjang oleh hukum dalam menjalankan fungsi integrasinya itu.

- a. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi;
- b. Hubungan yang ada bisa bersifat hubungan yang bersifat timbal balik;
- c. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, di mana penyesuaian yang ada tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh;
- d. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karenanya di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan,

¹²I. Gusti Ayu Agung Arini, *Hukum budaya dan Pariwisata*, Desertasi Undip, Jakarta, hal. 62.

¹³*Ibid*, hal.62

- tetapi semuanya akan dinetralisir lewat proses pelebagaan;
- e. Pelebagaan-pelebagaan akan berjalan secara gradual dan perlahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian;
 - f. Perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi;
 - g. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.¹⁴

Menjalankan fungsi integrasi tersebut berarti, bahwa hukum mempunyai kaitan erat dan memproses berbagai bidang kehidupan seperti politik dan ekonomi. Melalui pengintegrasian fungsi maka sekalian bidang dalam masyarakat berjalan menurut suatu pola tertentu.

Penggunaan teori struktural fungsional apabila kaitan dengan kenyataan masih ada sebagian masyarakat yang melakukan kawin mut'ah dan kawin sirri. Bahwa teori tersebut menjadi pisau analisis untuk mendapatkan pemahaman tentang perubahan terhadap budaya hukum masyarakat yang berkembang kepada tuntutan masyarakat yang modern.

5. Teori Lawrence Friedman Tentang Sistem Hukum

Pendapat Lawrence Friedman, bahwa sistem hukum tidak berhenti pada satu sektor saja, mengingat luasnya pengertian hukum itu. Hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu sistem (*legal system*), yaitu seperangkat dan serangkaian aturan-aturan atau norma-norma perilaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*legal substantive*), dan sebagai struktur atau lembaga

¹⁴ Lauer sebagaimana dikutip oleh Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal. 25

yang menjalankan proses hukum (*legal structure*), serta sebagai budaya hukum (*legal culture*)”.¹⁵

Sebagai sebuah sistem, hukum harus dicermati dalam perspektif totalitas yang di antara bagian-bagian sistenya itu merupakan suatu kesatuan pola yang saling melingkupi. Ketiga komponen dalam sistem hukum itu pada dasarnya saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.

Berakitan dengan sistem hukum, selanjutnya Friedman menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan bagian dari sistem sosial, sehingga dia juga harus dapat memenuhi harapan sosial. Oleh karena itu maka sistem hukum harus menghasilkan sesuatu bercorak hukum (*output of law*) yang pada dirinya signifikan dengan harapan sosial. Paling tidak terdapat empat hal yang harus dihasilkan atau dipenuhi oleh suatu sistem hukum yaitu :

- a. Sistem hukum secara umum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atas sistem tersebut;
- b. Sistem hukum harus dapat menyediakan skema normatif, yaitu bahwa sistem hukum sebagai suatu fungsi dasar harus dapat menyediakan mekanisme dan tempat di mana orang dapat membawa kasusnya untuk diselesaikan;
- c. Sistem hukum harus mampu sebagai kontrol sosial; dan d. Sistem hukum harus mampu sebagai instrumen perubahan tatanan sosial atau rekayasa.

Beberapa sistem hukum di atas sejalan dengan perspektif politik hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka perlindungan anak dan perempuan, maka perlu penguatan nilai-

¹⁵ Lord Radcliff, 1981. *The Law and Its Compass*, sebagaimana dikutip oleh Lord Llyod Mansted, *Introduction to Jurisprudence*, Preager Publisher, New York, 3th Edition, p. 2

nilai pemahaman tentang peraturan hukum terkait dengan perlindungan anak dan perempuan.

6. Teori Hukum Roscoe Pound Law as tool of social engineering

Pendapat Roscoe Pound mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, “*Law as tool of social engineering*”¹⁶

Selain itu Pound berbeda pendapat mengenai hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang digerakkan oleh kebiasaan. Namun Pound berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrument atau alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai. Bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif¹⁷

Teori ini dapat membedah kebiasaan negatif dari praktik perkawinan mut’ah dan sirri yang berdampak pada perlindungan anak menjadi terabaikan. Seharusnya perilaku negatif itu dapat diarahkan kepada perilaku positif dengan adanya hukum yang dapat menjadi instrument dari pada perubahan tersebut. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan sosial engineering. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk

¹⁶ Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, 1990, Bandung, hal. 47

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Citra Aditya, Bandung, 1986, hal. 110-111

menjaga agar masyarakat tetap berada didalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.¹⁸

Selanjutnya ada empat asas yang merupakan keharusan di dalam usaha social engineering yaitu: (1) penggambaran situasi yang dihadapi dengan baik; (2) analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan susunan jenjang nilai-nilai tersebut; (3) verifikasi hipotesa-hipotesa; (4) pengukuran efek undang-undang yang ada.¹⁹

Berdasarkan teori hukum sebagai sarana melakukan social engineering dapat dipahami sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan social engineering. Adapun tahapan-tahapan yang menjadi keharusan dalam melakukan social engineering adalah sejalan dengan masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan pasca konflik. Hal ini perlu menjadi acuan, bahwa perlakuan dan perlindungan terhadap perempuan adalah perlu dilakukan untuk menempatkan kembali hak-haknya yang sudah semestinya harus mendapat perhatian oleh semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu akan dikemukakan tentang kerangka pemikiran.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Pn. Angkasa, Bandung, 1980, hal. 117 Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, hal. 58.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ibid.*, hal. 118

Pemahaman dalam skema di atas dapat ditarik pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Ruh dalam mengaplikasikan kepentingan hukum dan menjadi landasan perkawinan sebagaimana Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada contoh peraturan perundang-undangan ini dapatlah ditarik pemahaman bahwa substansinya tidak boleh lepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu maka jelaslah bahwa landasan Pancasila dapat dipahami sebagai cita hukum dan sumber tertib hukum Nasional Indonesia.

Adapun cita hukum berfungsi sebagai landasan dan arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat Indonesia. Sunaryati Hartono menegaskan²⁰. Bahwa hukum itu bukan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada keadaan yang dicita-citakan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan hukum dalam kaitannya dengan perlindungan anak, maka perlu menjadi pijakan dalam menentukan arah perlindungan anak di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara²¹. Oleh sebab itu perlindungan anak, baik itu anak dari hasil perkawinanyang sah menurut hukum, maupun anak di luar nikah yang disebabkan dari berbagai faktor, akan tetapi semangat perlindungan anak tidak terputus pada aturan yang sempit, melainkan harus melalui pendekatan yang holistik. Juga dalam Islam bahwa

²⁰Sunaryati Hartono, *Perpektif Politik Hukum Nasional*, Editor Artidjo Alkostaf, M. Sholeh Amin, Lembaga Bantuan Hukum, Yogyakarta, 1986, hal.1

²¹Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. 8-10

status anak itu adalah fitrah, tergantung orang tuanya akan menjadikan Majusi atau Nasrani. Hal inilah yang seharusnya menjadi kerangka pemikiran untuk menentukan arah dari tujuan hukum perlindungan anak di Indonesia.

E. Rencana penggunaan metode penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma fakta empiric dengan pendekatan Socio legal studi. Dimaksudkan bahwa untuk membedakan penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal. pendekatan secara empirik tentang berbagai kenyataan tentang perlindungan anak dan perempuan setelah konflik di antara mereka, hal ini menyisakan berbagai masalah di antaranya adalah perlindungan hukumnya. Adapun lokasinya di Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian dengan salah satunya memberikan questioner langsung terpimpin ditujukan pada responden yang telah ditentukan. Jenis data: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, observasi. Teknik analisis data digunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisisnya menggunakan content analysis, yakni melalui pengkajian bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Yakni melalui pola pengumpulan data, reduksi data, kemudian display atau penyajian data dan berakhir dengan perumusan kesimpulan/penarikan verifikasi²². Selanjutnya untuk menguji keakuratan data yaitu melalui teknik “triangulasi data”.²³ yakni triangulasi sumber, triangulasi peneliti dan triangulasi teori.

²²Esmi Warassih, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999, hal.52.*

²³S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hal. 18

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio legal hermenetik atau dalam istilah metode penetapan hukum Islam, yakni pendekatan secara tadabur. Arti antara keduanya adalah pendekatan secara menyeluruh terhadap berbagai kasus tentang kawin mut'ah dan sirri terkait mengenai perlindungan anak.

F. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu bulan september sampai dengan Nopember 2013. Mengingat sebelumnya sudah dilakukan pra research dalam kurun waktu awal 2012 s.d. dengan september 1013.

G. Perkiraan biaya penelitian

Perkiraan biaya penelitian sejak dari pra research yang telah dilakukan, pengumpulan data di lapangan, pengolahan data, penulisan sampai presentasi dan publikasi menelan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

1. Sistematika penulisan

- Bab. I. Pendahuluan: memuat tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian, jadwal pelaksanaan dan pembiayaan.
- Bab. II. Landasan Teori memuat: pengertian perlindungan, Pemahaman tentang perlindungan anak dan perempuan, teori hukum adat terkait penyelesaian konflik,
Teori hukum Islam terkait perlindungan anak dan perempuan, teori konflik, manajemen konflik,

penyelesaian konflik melalui sarana penal dan non penal.

- Bab.III. Metode Penelitian: meliputi spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data yang diperoleh dari data primer dan skunder, analisis data menggunakan deskripsi analisis.
- Bab. IV. Tinjauan pustaka, memuat beberapa pemahaman yang berkaitan dengan judul penelitian dan beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis dari permasalahan yang pada akhirnya akan memberikan konklusi terhadap hasil penelitian ini.
- Bab. V. Hasil dan Pembahasan: A. hasil penelitian: (1) Penyebab terjadinya konflik antar dua desa di Way Panji Lampung Selatan; (2) Upaya penyelesaian konflik di Way Panji Kabupaten Lampung Selatan; (3) Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak pasca konflik di Way Panji Lampung Selatan. B. Pembahasan dengan menganalisis hasil penelitian dengan kajian teoritis yang akan melahirkan suatu simpulan.
- Bab. VI. Kesimpulan dan Penutup memuat tentang : beberapa kesimpulan dan kontribusi dari hasil penelitian.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam serta Sosiologi Hukum

1. Pengertian Perlindungan hukum

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam “Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak”,¹ bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Menyadari akan hak anak yang merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pada konteks ini Seto Mulyadi menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi sampai sekarang ini belum ada turunannya berupa Undang-Undang yang mengatur tentang penanganan fakir miskin. Begitu pula undang-undang tentang pemeliharaan anak-anak terlantar.

¹Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5

Hal ini yang menjadi persoalan tersendiri mengenai penanganan dan perlindungan anak-anak Indonesia.²

Meskipun sudah ada Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejak diundangkan sampai sekarang ini belum bisa menjawab segala persoalan yang berkembang mengenai penanganan anak. Terlebih anak-anak yang kurang beruntung yang berlatar belakang anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar yang kesehariannya bergelut dengan keprihatinan dan kekerasan.

Pada Seminar kaitannya dengan hari anak nasional, Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto, dalam penjelasannya mengenai perlindungan anak, berkait dengan anak-anak hasil perkawinan mut'ah dan sirri. Merujuknya pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34. Yang menyatakan dengan tegas, bahwa perlindungan anak-anak hasil perkawinan itu juga menjadi hak setiap warga negara Republik Indonesia.³

Berkenaan dengan pendapat di atas, maka jika dikaitkan dengan semangat untuk melindungi anak-anak bangsa sebagai bagian pengamalan dari Nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut penanganan dan perlindungan manusia Indonesia secara keseluruhan. Yakni melindungi tanah tumpah darah, melindungi manusia seutuhnya yang berdiam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu berkaitan dengan perlindungan anak, maka potensi anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan

² Seto Mulyadi, *Dialog dengan Cawapres Megawati*, Trans TV, 14 Juni 2008

³ Seto Mulyadi, *Seminar Sehari dalam rangka hari anak nasional*, Bandar Lampung, 11 Juni 2008

sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak kelak akan mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda dimasa yang akan datang , maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi:

- a. Secara fisik anak perlu diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya dengan mengedepankan kesehatan, kenyamanan, perlindungan di keluarga dan lingkungannya;
- b. Secara mental dan social perlu mendapat perhatian agar anak-anak tumbuh dengan jiwa dan semangat yang dilandasi oleh norma-norma agama, norma-norma adat; selain itu juga dipupuk nilai perjuangan dan pengabdian sebagaimana telah dicontohkan oleh para pahlawan pendiri Republik ini. Juga adanya pengakuan di masyarakat pada taraf sosialisasi dilingkungannya, masyarakat juga mendorong untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif, aman, tenteram dan memacu untuk memahami keberadaannya ditengah-tengah lingkungan keluarga dan masyarakat.
- c. Secara penerapan prilaku yang berakhlak mulia, maka perlu ditanamkan agama dan kepercayaan yang dianut, diajarkan sedini mungkin untuk mengenal hakekat Ketuhanan, praktek ibadah, tauladan dalam pergaulan dan berperilaku yang baik. Inilah sebenarnya hakekat mempersiapkan anak untuk generasi mendatang yang bermental, bermoral dan atau berakhlakul karimah.

2.Perlindungan Anak tanpa Diskriminatif

Perlindungan anak tanpa adanya diskriminatif maksudnya dalam menangani, mengupayakan dan aksi pada perlindungan anak, tidaklah dipandang bahwa anak-

anak itu keturunan siapa atau anak siapa. Artinya anak orang kaya atau miskin. Juga tidak memandang warna kulit dan agama serta kepercayaan yang di anutnya, bahasa dan perbedaan secara fisik lainnya. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan yang sama tidak diskriminatif. Perlakuan tidak diskriminatif sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan perlindungan anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termaktub pada Pasal 1 ayat (1,2) sebagai berikut:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menyadari betapa perlunya perlindungan anak akibat konflik diberbagai belahan dunia, juga beberapa daerah, baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan oleh semua pihak yang peduli terhadap kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu terus diupayakan untuk mencapai tujuan

⁴ Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2007, hal. 5

dari perlindungan anaka, termasuk di dalamnya adalah perlindungan anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan predikat lainnya anak-anak bangsa yang kurang beruntung. Selain itu anak-anak mengais rejeki dari para pengguna jalan, sisi lain membantu, tetapi disisi lain sebenarnya membunuh masa depannya. Sebagaimana anak-anak normal yang berkecukupan seusia mereka masih dapat mengenyam bangku sekolah, tetapi anak-anak itu bergelut dengan terik matahari dan berlari mengejar sesuatu untuk mempertahankan hidupnya.

Hampir senada dengan anak-anak yang kurang beruntung lainnya, terkadang anak-anak mendapat perlakuan tidak manusiawi, adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dari keluarga tersebut. Hal ini terkadang tidak tersentuh hukum dan perlindungannya menjadi terabaikan.

3. Perlindungan Anak dari kekerasan dalam rumah tangga

Perlindungan dari kekerasan dimaksudkan bahwa anak akan mendapat kekerasan di luar lingkup keluarga, seperti di masyarakat, di sekolah dan ditempat lainnya, namun kekerasan yang dimaksudkan dalam keluarga, yakni dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada Bab III Pasal 5 sebagaimana dinyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga”.⁵

⁵ Nursyahid, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT*, Panca Usaha, Jakarta, 2004, hal. 6

Memperhatikan aturan di atas kaitannya dengan perlindungan anak antara lain:

- a. Kekerasan fisik: Kenyataannya banyak kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup keluarga, baik kekerasan fisik dengan menggunakan alat bantu benda-benda keras atau dengan anggota badan dari pelaku tindak kekerasan terhadap anak, seperti : dilakukan oleh orang tua, kerabat, orang-orang terdekat seperti pembantu dan lain sebagainya; Dari kekerasan ringan sampai kekerasan yang menimbulkan cacat fisik seumur hidup dan atau sampai pada ajal anak tersebut;
- b. Kekerasan psikis yang ditimbulkan dari perlakuan kasar dari orang tua, kerabat dan orang terdekat dari anak-anak, baik diluar rumah maupun didalam rumah. Memarahi yang berlebihan, memberi sanksi mengurung dirumah, menakut-nakuti dan lain sebagainya sehingga secara psikis anak itu menjadi terganggu dan hak-haknya menjadi tidak terlindungi;
- c. Kekerasan seksual bisa terjadi terhadap anak-anak baik itu perempuan maupun laki-laki, di rumah maupun diluar rumah; kekerasan seksual bisa dilakukan pada anak-anak jalanan dan terlantar yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Kekerasan ini banyak terjadi dan kenyataannya ada yang menjadi trauma, stress, putus sekolah, sampai hamil dan atau sampai pada kematian;
- d. Penelantaran anak, banyak terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab; orang tua yang meninggalkan isteri dan anak-anaknya; penelantaran diakibatkan perceraian, penelantaran disebabkan oleh perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang yang berlaku.

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada keluarga-keluarga yang telah melangsungkan perkawinan, namun tidak semuanya dapat terungkap atau diketahui

publik, biasanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi rahasia keluarga itu sendiri. Secara observasi untuk mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga atau melaporkan pada pihak yang berwajib. Oleh karena itu sebagai salah satu contoh yang sedang marak dibicarakan dan menjadi preseden hukum, yakni “Pernikahan kontroversial Syeh Puji dengan gadis 12 tahun terjadi. Miliarder asal Kabupaten Semarang itu kemungkinan besar akan masuk bui karena melanggar Undang-undang perkawinan dan perlindungan anak”.⁶

Pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan perlindungan anak di atas menjadi bagian dari akumulasi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan penelitian LBH APIK Jakarta telah menerima 130 kasus KDRT selama bulan Januari – Februari 2009 Jabodetabek, sebanyak 51 persen terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana di laporkan oleh LBH APIK tahun 2009.⁷

Jika dicermati fenomena yang berkembang saat ini tentang kawin sirri yang telah mengundang perhatian berbagai pihak pemerhati masalah perempuan, praktisi hukum dan pemerhati masalah anak. Bahwa hampir ada pemahaman yang sama mengenai praktek kawin sirri tersebut sebagai bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga, meskipun ada sekelompok tertentu yang tidak berpendapat demikian, baik dikalangan agamawan dan juga pemangku adat tertentu. Namun inilah merupakan potret tentang bagaimana perlindungan kaum perempuan dan anak-anak ditengah bangsa yang sedang membangun di era global ini; Juga perlunya membangun sistem hukum nasional yang ideal merupakan jawaban terhadap tantangan globalisasi

⁶Abdul Mu'ti, *Politik Kawin Sirri*, Suara Merdeka, 30 Maret 2009, hal.6

⁷*Ibid.* hal. 6.

yang terjadi yakni hukum yang responsive *prospektif* dan mampu mengikuti dinamika yang berkembang”.⁸ Oleh karena itu perlu terus diupayakan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai jawaban atas berbagai persoalan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak.

4. Perlindungan Anak dalam konteks Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak dalam konteks Hak Asasi Manusia. Hal ini perlu diperjuangkan mengingat semangat perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab I Pasal 1 ayat 3, disebutkan bahwa “ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.⁹

Pada aspek yang lain, yakni hak memperoleh keadilan. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 17 menyebutkan: Setiap orang, tanpa *diskriminasi*, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi

⁸Ali Mansyur, *Perlindungan konsumen yang responsive kontemporer pidato pengukuhan guru besar*, Unissula Press, Semarang, 2007, hal. 10

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 3

serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.¹⁰

Adapun hakim-hakim yang jujur dan punya keberanian untuk mengadili dan mengambil keputusan yang benar sebagaimana dikatakan bahwa “Amerika modern tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa sumbangan substansial dari *Supreme Court* negeri itu. Oliver Wendell Holmes dan Benyamin Cardozo adalah contoh dari hakim agung Amerika yang hebat-hebat yang telah turut membangun Amerika modern itu”.¹¹

Di Indonesia hakim yang berani dan controversial, yakni hakim Bismar Siregar. Pada suatu sidang perkara pernah menjatuhkan putusan denda melebihi maksimum yang diberikan oleh hukum, seraya memberi alasan “*Di dalam sidangini sayalah undang-undang itu*”. Atas dasar itu, Satjipto Rahardjo memberikan penilaian bahwa hakim Bismar Siregar adalah tipe hakim yang dalam memeriksa dan mengadili menggunakan otak dan hati nuraninya.¹²

Berdasarkan keterangan di atas tentang hakim yang berani mengambil suatu keputusan yang benar dan praktek peradilan yang seperti dicontohkan adalah merjpakan tindakan hukum yang tidak diskriminatif sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan benar, sekalipun peradilan itu yang mengadili tentang kejahatan anak-nakal. Hal ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pada Bab I Ketentuan Umum

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, *HAM*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 8

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal.234

¹² *Ibid.* hal. 235.

dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.¹³

Peradilan anak di atas memberikan pengertian, bahwa anak tersebut adalah anak nakal. Oleh karena itu persoalan Perlindungan anak tidak berhenti pada suatu kasus saja, seperti di pengungsian akibat konflik di Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, melainkan harus terus diupayakan perlindungan hukumnya, di samping itu juga adanya upaya perlindungan dari masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹⁴

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari tujuan perlindungan hukum secara keseluruhan, yakni untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat termaktub di dalamnya tentang perlindungan anak, maka perlu adanya pemahaman mengenai dasar-dasar perlindungan anak di Indonesia.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Hukum Positif

2.1. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Dasar perlindungan anak di atur dalam perundang-undang di Indonesia, yakni:

¹³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.2

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 2

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1977 tentang Peradilan anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang di atas memberi landasan dalam perlindungan anak di Indonesia dan dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yakni: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁵

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam

¹⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Loc. Cit.*, hal. 8

kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Untuk mewujudkan semua yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, maka landasannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab II Pasal 2 disebutkan, bahwa: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁶

Pemahaman mengenai non diskriminasi maksudnya tidak dibeda bedakan posisi anak-anak sebagai Warga Negara Indonesia, meskipun berbeda warna kulit, agama, status sosial, suku, pendidikan dan lain sebagainya, namun tetap sama dimuka hukum. Hal ini sejalan dengan

¹⁶Hadi Setia Tunggal, *Loc. Cit.*, hal. 8

kepentingan terbaik bagi anak dalam mengembangkan dirinya, baik secara fisik, mental, spiritual dan pendidikan. Kepentingannya agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang di dalamnya. Hak untuk hidup sejak dalam usia kehamilan sang anak, ketika lahir, tumbuh berkembang hingga dewasa menurut Undang-undang, yakni pada usia 18 tahun. Begitu juga tentang hak pendapat anak untuk menentukan pilihan hidupnya, baik anak-anak yang terlahir normal secara fisik dan ruhani, maupun anak-anak penyandang cacat atau keterbatasan, juga anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah ataupun tidak sah.

Pada persoalan anak tidak sah dimata hukum, anak-anak yang lahir diluar nikah, atau perkawinan yang tidak legal. Secara substansi hukum anak-anak tersebut wajib dilindungi, meskipun pada kenyataan anak-anak yang terlahir tidak sah dalam perkawinan dan atau anak-anak terlantar atau anak haram menjadi persoalan tersendiri jika dihadapkan pada proses untuk mendapatkan status anak dan untuk mencari kepastian hukum. Hal inilah yang menjadi perjuangan politik hukum di Indonesia.

Apabila persoalan di atas ditilik dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perlindungan anak di Indonesia, perlu juga dirujuk pada teori Lawrence Friedman “*legal system*” merupakan serangkaian norma-

norma perilaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau disebut “*legal substantive*” dan sebagai struktur atau lembaga yang menjalankan proses hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*)¹⁷

Teori di atas apabila dihubungkan dengan perlindungan anak di Indonesia menjadi relevan, mengingat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak haruslah ada peraturan yang resmi yang mengatur tentang perlindungan anak dimaksud;

Adanya peraturan resmi atau legal dan ada aturan yang tidak tertulis disebut *legalsubstantive*, berkaitan dengan peraturan yang tidak tertulis, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak, yakni adanya peran masyarakat. Peran masyarakat dimaksudkan bahwa adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak, begitu juga dalam hukum adat masyarakat setempat.

Pada sisi lain “hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat”.¹⁸ Disamping itu hukum juga merupakan suatu institusi normative yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungannya, hukum juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungan itu sendiri. Munir Fuady mengatakan bahwa hukum mengatur kepentingan masyarakat. Karena itu peranan hukum dalam masyarakat menjadi sangat penting. Tidak bisa dibayangkan betapa kacaunya masyarakat jika hukum tidak berperan. Masyarakat tanpa hukum akan merupakan segerombolan serigala, dimana yang kuat akan memangsa yang lemah.

¹⁷ Lord Radcliff, *Loc. Cit.*, hal 22

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes, yakni “*homo homini lupus*”. Oleh sebab itu fungsi hukum untuk mengatur dan membatasi bagaimana kekuasaan manusia tersebut dijalankan sehingga tidak menggilas orang lain yang tidak punya kekuasaan”.¹⁹

Bahwa fungsi hukum untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, maka Achmad Ali²⁰ mengatakan bahwa hukum juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tidak sendirian di dalam masyarakat, melainkan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial; seterusnya bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial merupakan fungsi pasif, artinya hukum yang menyesuaikan dengan kenyataan masyarakat.

Memahami bahwa hukum haruslah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, maka perlindungan anak haruslah dicapai dengan pendekatan bersama-sama dengan pranata sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu perlunya tanggung jawab dalam perlindungan anak-anak di Indonesia.

2.2. Tanggung jawab terhadap Perlindungan Perempuan anak

Selain itu dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak, perlu diperhatikan tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam perlindungan anak, di antaranya perlu menjadikan pemahaman tentang budaya hukum sebagai acuan untuk mendapatkan suatu kelengkapan dalam perlindungan anak. Budaya hukum dapat diartikan

¹⁹Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*, Citra Adityabakti, Bandung, 2005, hal. 153

²⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Candra pratama, Jakarta, 1996, hal 99-100

suatu kepatutuan hukum yang telah berkembang dan berlangsung terus menerus, seperti hukum adat yang mengatur tentang bagaimana melindungi anak didalam lingkup keluarga, maupun lingkup masyarakat.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Bab IV yang memuat tentang kewajiban dan tanggung jawab:

1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20);
2. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, entnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21);
3. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
4. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal2 3). Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaran perlindungan anak (Pasal 23);
5. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24);
6. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran

masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25).

Selain itu Perlindungan terhadap Perempuan dengan merujuk pada Bab VI Perlindungan dalam Pasal 16 UU No. 23 Th. 2004 tentang KDRT, yakni:

- (1) Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung mengetahui atau menerima laporan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana pada ayat (1) diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diberikan perlindungan sebagaimana terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayaat (1). Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selanjutnya pada Pasal 17 menyebutkan: Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendampingan, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Kemudian pada Pasal 18 : Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Seterusnya pada Pasal 22 disebutkan:

1. Dalam memberiokan pelayanan, pekerja sosial harus melakukan:
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;

- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
 - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
2. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan perempuan terhadap hak-haknya, ketika menjadi korban kekerasan atau korban konflik menjadi prioritas utama, dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan sampai pada Pasal 56 dan peraturan penjelasan atas undang-undang tersebut.

B. Perlindungan Perempuan dan Anak menurut Hukum Islam

1. Perlindungan anak dalam pandangan Islam

Selanjutnya perlindungan anak di dalam Islam, tentang perlindungan anak sebagaimana dikemukakan oleh Al Mughni, bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum *aqil baligh* (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya.²¹

Adapun landasannya adalah : Al Qur'an surat an nur : 58 : “ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (anak-anak) di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum

²¹Syaikh Hasal Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1999, hal.28

sholat subuh, ketika kamu nenanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sholat isya'. (itulah) tiga aurat bagi kamu..”²²

Pemahaman tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. Inilah tafsir dari ayat di atas, namun dapat dipahami bahwa perlindungan anak dari kejahatan seksual dan kekerasan lain perlu diperhatikan sebagaimana tuntunan dalam konteks Al-qur'an yang menjadi “sumber utama dalam ilmu *ushul fiqh* .

Oleh karena itu secara epistemologis, yang dikaji dalam ilmu ushul fiqh adalah petunjuk (*dalalah*) yang ada dalam teks wahyu, baik petunjuk secara tekstual (*dalalah an nash*)”.²³

Petunjuk secara tekstual Al qur'an, yakni dipahami secara *harfiyah* atau apa arti yang dimaksudkan dalam Al Qur'an, sedangkan secara kontekstual maksudnya adalah hikmah yang terkandung dari arti yang sebenarnya. Hal inilah yang memberikan ruang untuk menggali hukum Islam yang merupakan salah satu dari sumber hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Ada keterkaitannya dengan persoalan perlindungan hukum terhadap anak yang masuk dalam hukum keluarga, hukum perkawinan.

²² Depag. RI, *Al Qur'an dan Terjemahan (revisi terbaru)*, CV. Asy Syifa', Semarang, 1999, hal.554.

²³ Asjmun Abdurrahman, *Neo Ushul Fiqh menuju ijtihad kontekstual*, edisi revisi Mazhab Jogja, Fak.Syari'ah IAIN, 2003, hal.115. Muhammad Abid al Jabiri, *Bunyalah al aql al arab*, (Bairut, 1990), hal. 55-56. M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2000, hal. 314. lihat Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal theories*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, hal. 241-253.

Pada hukum perkawinan, khususnya mengenai kewajiban terhadap anak, maka hukum Islam memberi aturan bahwa yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedang ibu bersifat membantu. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, sedangkan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.²⁴

Pada perlindungan anak secara material dan immaterial di atas memberikan pemahaman bahwa “kewajiban bapak dalam memberi nafkah menurut kemampuannya.

Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”.²⁵ Maksudnya berdasarkan kemampuan yakni sebatas yang bisa dilakukan sesuai dengan beban yang diberikan kepadanya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah pada Surat Alam Nasyrah : ayat 7: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.²⁶

Selanjutnya mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap perlindungan anak dapat dirujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 26 yakni:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007. hal 134. Lihat. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1978, hal.69

²⁵ Dasril, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Adat Meranjat*, Unila, Bandar Lampung, 1986, hal. 22.

²⁶ An Nur, *Al Qur'an dan Terjemahan (ayat pojok bergaris)*, CV. Asy Syifa', Semarang, tt, hal.478

kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada perlindungan anak pasal 26 ayat 1, ketika sebab orang tua tidak ada, hal ini tidak menutup kemungkinan akibat terjadinya perkawinan mut'ah dan sirri yang telah melahirkan seorang anak, maka tanggung jawab anak-anak tersebut kepada keluarganya. Oleh karena itu persoalan tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berhenti sampai pada tataran ini, perlu terus di cari penyelesaian yang komprehensif dan tidak melukai rasa keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

2. Kedudukan anak dan Perwalian

Kedudukan anak dimaksudkan untuk memberikan keterangan anak dari perkawinan yang sah secara hukum, sebagai konsekwensi logis maka anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Begitu pula sebaliknya anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak sah akan melahirkan suatu keturunan yang tidak sah. Hal ini juga berkaitan dengan perwalian dari anak tersebut, oleh karena itu berikut ini akan dikemukakan tentang kedudukan dan perwalian anak:

2.1. Kedudukan anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana termaktub pada pasal 27 mengenai identitas anak sebagai berikut:

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayata (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran;
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.²⁷

Keterangan di atas memberikan gambaran, bahwa untuk memperoleh status anak yang sah haruslah melalui prosedur hukum, yakni dengan pengurusan akta kelahiran (lihat pasal 28 ayat 1-4). Hal ini sebagai wujud otentik keabsahan status anak itu senidiri.

Sedangkan kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- (1) “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.(pasal 42);
- (2) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 :1);
- (3) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 43:2);

²⁷ Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2007, hal. 16

- (4) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut (Pasal 44: 1);
- (5) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (pasal 44:2).²⁸

Apabila perbuatan zina yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 44 dikaitkan dengan pasal 63 KUH Perdata, tentang pengadilan, bagi yang beragama Hindu, Budha, diselesaikan pada pengadilan Negara dan bagi yang beragama Kristen, Khatolik diselesaikan melalui KUH Perdata. Sedangkan yang beragama Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama.²⁹

Keterangan di atas memberi pemahaman tentang pentingnya “*nasab*” atau disebut asal usul. Hal ini untuk memberi penjelasan bahwa apabila ketidakjelasan nasab, maka dikawatirkan akan terjadi perkawinan dengan *mahram* (hubungan sedarah yang haram dinikahi). Oleh sebab itu pentingnya mengetahui nasab karena” menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya”.³⁰

Pada dasarnya untuk memberikan legitimasi guna memperoleh identitas hukum dan sah dimata agama, maka perkawinan merupakan jalan untuk menentukan

²⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2004, hal. 144

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*, hal. 125

³⁰Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam(Marriage an Trial: A Stdy of Islamic Family Law*, ICIP, Jakarta, 2005, hal.168

dan menjaga asal usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah”.³¹ Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan dengan nasab dengan ibunya. Nasabnya tidak dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena tidak terjadi *al firasy* (perkawinan yang sah).³²

Perkawinan yang sah atau istilahnya *al firasy* , maka dalam perspektif Hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi disebabkan tiga hal, yakni:

1. Melalui perkawinan yang sah;
2. Melalui perkawinan yang *fasid*, dan
3. Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an nikah* (nikah syubhat).³³

Perkawinan yang *fasid* atau dikatakan perkawinan yang rusak, perkawinan itu dilakukan diluar aturan Islam, atau juga perkawinan yang dilakukan dengan melakukan zina terlebih dahulu, baru menikah setelah si wanita itu hamil, atau perkawinan yang sudah jatuh talak, baik talak 1,2, atau 3, tetapi mereka masih melakukan hubungan seperti layaknya

³¹ Amir Syiharifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hal. 199

³²: hal. 199-100. lihat juga dalam Badran Abu Al Ainain Badran, *Huqûq al Aul d f Syr 'ah al Isl miyah wa al Qanun*, Muassasah Syabab al Jami'ah, Iskandariyah, tt, hal. 16

³³ Al Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Cet. Ke-3, jilid VII, D r al Fikr, Damaskus: 1989, hal. 681. lihat juga dalam Ahmad al Khamilisy, *at Ta'liq 'Al Qanunal Ahwal al Sykhsiyyah*, Cet. Ke-2, jilid II, D r al Nasyar al Ma'rifa, Damaskus, hal. 33-51

suami isteri. Jika kedapatan si wanita itu hamil, maka berakibat anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya.

Begitu pula perkawinan syubhat dapat disederhanakan dengan perkawinan yang membawa maksiat. Misal seseorang laki-laki yang telah bersuami berhubungan intim dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan, kemudian perempuan itu hamil. Mengingat laki-laki tidak mau mengawininya, maka disuruhnya orang lain untuk menikah dengan perempuan itu dengan maksud untuk menutupi hubungan mereka dengan perkawinan. Perkawinan yang karena suatu sebab tertentu menjadikan perkawinan itu syubhat atau “Perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian”.³⁴

Berkaitan dengan tiga hal yang menyebabkan perkawinan itu sah atau tidak, maka untuk lebih menegaskan bahwa perkawinan itu sah menurut hukum Islam dengan landasan Hadis Rasulullah SAW: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw, bersabda “Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah). (HR.Muslim)³⁵

Perkawinan yang sah sebagaimana hadis Rasulullah Saw di atas menjadi landasan, bahwa dari perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah. Untuk itu perlunya bukti keturunan yang sah, yakni seorang adalah keturunan yang sah dari orang lain dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang dibukukan dalam register Catatan Sipil. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa akta itu tidak ada atau hilang, maka untuk menampung keadaan ini ditentukan bahwa di

³⁴ Muhammad al Khatib, *Subut an Nasab*, D r al Bayan, Jedah, 1987, hal. 103

³⁵ Lihat dalam *Sahih Muslim*, Hadis Nomor 2646

dalam keadaan demikian itu, cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa anak itu terus menerus menikmati kedudukan sebagai anak yang sah³⁶.

Untuk membuktikan kedudukan sebagai anak yang sah itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa, yang baik dalam keseluruhannya, maupun masing-masing, memperlihatkan suatu pertalian karena adanya kelahiran dan karena adanya perkawinan, antara seorang tertentu dan orang yang harus dibuktikan kedudukannya itu.

Kedudukan sebagai anak yang sah harus terus menerus dan sama sekali tidak boleh terputus-putus. Kedudukan itu harus dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang secara keseluruhan atau satu persatu menunjukkan pertalian keturunan dari orang yang harus ditetapkan kedudukannya dengan orang yang menurunkannya.

2.2. Perwalian

Perwalian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XV (pasal 330-418a) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang balai harta peninggalan. Di samping itu ada pula Bab XVI yang mengatur tentang perlunakan anak belum dewasa menjadi dewasa (pasal 419-432), dan Bab XVII tentang Pengampunan bagi orang dungu, sakit otak atau mata gelap (pasal 433-462). Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam pasal 351 dan 361 KUH Perdata hanya ada satu orang wali sesuai dengan pasal 331.

Sedangkan menurut hukum ada adalah semua anak yang belum dewasa ataupun sudah dewasa, belum kawin atau sudah kawin, kesemuanya berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua dan keluarga/kerabatnya menurut

³⁶Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 144

susunan kemasyarakatan adat dan bentuk perkawinan yang dilakukan orang tuanya.³⁷

Adapun perwalian sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya dalam (pasal 50 – 54). Disebutkan bahwa (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50).

Beberapa keterangan mengenai perwalian dapatlah diambil suatu pemahaman tentang perwalian kaitannya dengan perkawinan yang sah, begitu juga perkawinan yang tidak sah. Anak yang tidak sah misalnya anak zina atau anak haram, atau juga anak yang lahir diluar perkawinan. Atas dasar tersebut, bagaimana anak-anak ini mendapatkan perwalian, meskipun ada jalan pengangkatan anak dan atau mengajukan perwalian untuk mendapatkan status perwaliannya melalui putusan pengadilan.

Oleh sebab itu perwalian untuk anak dapat dipahami juga bagaimana perwalian terhadap anak dari hasil perkawinan mut'ah dan sirri, bukankan perkawinan tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang tidak sah. Sebab beberapa syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 6- 12). Juga perwalian di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam (pasal 33 – 36).

Pengaturan perlindungan anak menurut hukum Positif dan hukum Islam yang telah dikemukakan di atas, sebenarnya perlindungan anak berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam berkaitan dengan penanganan

³⁷Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit.*, hal. 142

perlindungan anak yang melibatkan beberapa pihak dari unsur pemerintah, keluarga (orang tua), peranserta masyarakat, dunia pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya. Lalu sanksi terhadap pelanggaran perlindungan anak, khususnya pada perkawinan mut'ah dan sirri berupa sanksi secara perdata dan itupun harus diputuskan oleh Pengadilan Agama dan atau dikuatkan melalui Pengadilan Negeri. Selain itu ada sanksi moral melalui hukum adat atau keputusan yang berkembang di masyarakat. Dan yang menjadi perspektif pelanggaran terhadap anak atas perkawinan mut'ah dan sirri yang berkaitan dengan perlindungan anak, hendaknya diberikan sanksi selain sanksi perdata, moral, agama dan pidana. Sebagaimana dikemukakan berikut ini.

3. Sanksi terhadap pelanggaran perlindungan anak

Adapun sanksi dari pelanggaran pada perlindungan anak, yakni merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak termaktub dalam Bab XII pasal 77 sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
 - 1). diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; dan
 - 2). penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 77).
 - 3). Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi

secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (pasal; 78);

- 4). Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dengan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (pasal 79).
- 5). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (Pasal 80 : 1);
 - Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 80 :2);
 - Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan ;idana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(pasal 80 : 3)

- Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut jorang tuanya.(pasal 80 : 4).
- 5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (pasal 81 : 1).
 - Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (pasal 81 : 2).
 - 6). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (pasal 83).
 - 7). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(pasal 84).

- 8). Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Pasal 85 ayat 1).
 - Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbalik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 85 ayat 2).
- 9). Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukannya atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (pasal 86).
- 10). Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (pasal 87).

- 11). Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (pasal 88).
- 12) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pasal 89 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (Pasal 89 ayat (2)).
- 13) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. (Pasal 90 ayat 1)

4. Perlindungan hukum terhadap perempuan

Selanjutnya sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana diatur pada Bab. VIII. Ketentuan Pidana, yakni sebagai berikut:

Pasal 44:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat , dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) .
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban , dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari , dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan atau psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian

atau k kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya termaktub dalam Pasal 46, 47, 48 dan 49 yang mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Memperhatikan berbagai kasus yang terjadi terhadap anak-anak dan perempuan, sesungguhnya haruslah menjadi perhatian semua pihak, mengingat keberadaan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Juga tidak menutup kemungkinan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak pasca konflik di Way Panji Lampung Selatan. Sudah barang tentu memberikan beban psikologis yang berat. Juga beban penderitaan lainnya, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, tempat tinggal dan pekerjaan. Oleh karena itu perlu ada sikap yang padu untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Keterangan di atas apa bila ditarik dari sisi penegakan hukum, makap perlu mencermati pendapat Satjipto Rahardjo memberikan pendapat, bahwa penegakan hukum itu tidak segampang dan sejelas seperti dikatakan oleh undang-undang, melainkan ia sarat dengan berbagai intervensi sosial, politik, ekonomi, serta praktik perilaku substansial dari orang-orang yang menjalankannya.³⁸

Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum itu tidak sama dengan buku telepon, dengan ini orang tinggal memutar saja nomor yang dikehendaki dan selesai. Dengan padat dan sederhana, Hakim Agung Amerika, Oliver Wendell Hoolmes, mengatakan, bahwa "*The life of the law has not been logic, it has been experience*". Maksudnya adalah hukum itu bukan logika melainkan pengalaman".³⁹

³⁸Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2006, hal193

³⁹*Ibid.* hal. 194.

Berkaitan hukum bukanlah logika yang dapat diperhitungkan, melainkan harus direspon dengan empiric atau pengalaman, hal ini menandakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran anak perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pemberian sanksi di atas, maka hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest.⁴⁰

Peraturan-peraturan yang menjadikan manifest, maka Donal Black memberikan pemahaman adanya dimensi keterlibatan manusia dalam hukum tersebut yang dinamakan mobilisasi huklum. Sebagaimana dikatakan “The day- by – day entry of cases into any legal system cannot be taken for granted. Cases of illegality and disputes do not move outomatically to legal agencies for disposition or settlement”.⁴¹

Pernyataan Donald Black memberikan makna bahwa peristiwa pidana yang diatur di dalam KUHP hanya menjadi kenyataan apabila muncul kasus-kasus pidana dan kasus tersebut hanya dapat muncul karena ada mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah : “*Without the mobilization of law, a legal control system lies out of touch with the human problems it is designed to oversee. Mobilization is the link between law and the people served or controlled by law*”.⁴²

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa mobilisasi hukum adalah proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2004, hal.175

⁴¹Donald Black, *The Manners and Customs of The Police*, Academic Press, New York, 1980, hal. 42

⁴²*Ibid*, hal. 42

kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka. Melihat perlindungan anak dan sanksi terhadap pelanggarannya serta beberapa pendapat yang mengharuskan penerapan pidana tidak mutlak sesuai teks dalam undang-undang itu sendiri, melainkan adanya mobilisasi hukum.

Pada pernyataan mobilisasi hukum kalau didekatkan pada teorinya Talcott Parsons: teori structural fungsional akan menjadi relevan, mengingat hukum dalam menjalankan fungsi integrasi mempunyai kaitan erat dengan berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu sudah semestinya penerapan hukum harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak.

B. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kajian Sosiologi Hukum

1. Pendekatan sosiologi hukum

Pendekatan sosiologi hukum memberikan pemikiran, bahwa segala upaya penyelesaian konflik sosial dapat dirujuk pada teori sosial dan teori sosiologi hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang holistik dalam menyikapi suatu persoalan. Sebagaimana pendapat Emile Durkheim dengan konsepnya tentang *anomie*, suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercapa akibat tidak selarasnya harapan kultur dengan kenyataan social.

Selanjutnya ada pendapat lain, seperti pemikiran Merton yang mencoba menghubungkan *anomie* dengan penyimpangan social. Penjelasan mengenai *anomie* itu merupakan akibat dari proses sosialisasi, individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan kebudayaan tidak ada

atau tidak mungkin dilakukan, sehingga individu-individu mencari jalan atau cara alternative, maka perilaku itu bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Merton menyebutkan ada empat perilaku menyimpang, yaitu inovasi (*innovation*), ritualism (*ritualism*), peneduhan hati (*retreatism*), dan pemberontakan (*rebellion*). Yang dimaksud inovasi adalah perilaku seseorang yang menerima atau mengakui tujuan yang selaras dengan budaya atau diinginkan masyarakat. Seorang guru yang tidak puas dengan metode ceramah karena dianggap tidak efektif, mencari alternative lain dalam mengajar, misalnya menggunakan metode *inquiry*, ini termasuk inovasi.

Di samping itu seseorang yang menolak cara-cara yang wajar, misalnya bekerja keras dan hidup hemat untuk bisa menjadi kaya dan memilih, merampok atau melakukan korupsi, maka dalam sosiologi, perilaku ini juga dikategorikan sebagai sebuah inovasi, tetapi dalam arti negative. Masyarakat yang memilih untuk menggunakan kekerasan atau main hakim sendiri karena beranggapan hukum sudah tidak efektif lagi sehingga konflik komunal dapat saja terjadi. Hal ini sebagai gambaran pemikiran, bahwa konflik di Way Panji Lampung Selatan juga terindikasi adanya sikap inovasi yang negatif. Selain itu dalam tataran sosiologis beberapa perilaku yang menyimpang lainnya dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Ritualisme terjadi manakala seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara cultural tetapi menolak atau mengganti tujuan sehingga berbeda dengan harapan semula dari masyarakat atau kelompok. Seorang mahasiswa yang mengikuti upacara atau senam kesegaran jasmani untuk mendapatkan beasiswa, bukan karena untuk menanamkan disiplin dan demi kesehatan,

merupakan contoh perilaku ritualisme. Dalam bidang hukum, seseorang yang mengendarai sepeda motor dan memakai helm bukan demi keselamatan tetapi takut mendapatkan ‘tilang’, merupakan contoh ritualism. Juga seseorang yang melakukan sebuah tindakan tetapi tidak mengetahui tujuan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat berkaiotan dengan tindakan itu, termasuk ritualisme.

2. Pengasingan diri (*retreatment*) terjadi jika seseorang menolak atau tidak mengakui lagi baik cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya tanpa menggantinya dengan yang baru. Pengasingan diri ini biasanya dilakukan oleh orang yang tertindas tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan atau menentang, sehingga mereka lebih memilih mengasingkan diri. Seorang politisi yang tidak puas dengan kondisi perpolitikan tanah air tetapi tidak mampu untuk melawan arus untuk melakukan perubahan dan lebih memilih untuk tidak terjun ke dunia politik lagi merupakan contoh tindakan pengasingan diri.
3. Pemberontakan terjadi manakala seseorang menolak baik cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya dengan menggantikannya dengan yang baru. Kudeta adalah contoh perilaku pemberontakan, karena dilakukan atas dasar ketidakcocokan dengan, baik cara maupun tujuan, yang secara umum diperkenankan oleh budaya.
4. Di samping penjelasan tentang perilaku menyimpang, para sosiolog juga telah berhasil memaparkan model ‘justifikasi’ tentang perilaku menyimpang. Sykes&Matza, sebagaimana dikutip Schaeffer⁴³ ,

⁴³Scheffer, *Sociology*, Mc Graw-Hill, New York, 1989, h. 325

menyatakan bahwa ada lima model justifikasi perilaku menyimpang, yang mereka sebut *techniques of neutralisation*. Kelima model netralisasi itu adalah: *denyingresponsibility*, *denying the injury*, *blaming the victim*, *condemning the authorities*, dan *appealing tohigher principles or authorities*.

5. Cara pertama adalah berupa penolakan tanggung jawab. Banyak orang beralasan bahwa karena tekanan yang luar biasa, seperti kemiskinan, ternacem, kurang persiapan secara akademis, membuat mereka berperilaku menyimpang seperti mencuri, membunuh, menyontek dalam ujian. Dalam banyak kasus, seorang pelacur yang terjaring saat razia, sering beralasan karena tekanan ekonomi yang luar biasa beratnya, menyebabkan mereka terjun ke dunia prostitusi.
6. Cara yang kedua, dengan alasan tidak adanya korban akibat perilaku menyimpang mereka, maka mereka bmenolak kalau perilaku mereka dikategorikan sebagai perilaku criminal atau menyimpang. Para remaja yang melakukan *vandalisme* atau melakukan pelecehan terhadap perempuan, sebagaimana kasus di Way Panji Lampung Selatan terbukti secara faktual penyebab konflik salah satunya adalah pelecehan terhadap dua orang gadis dari desa Agom yang dilecehkan oleh pemuda dari desa Balinuraga. Atas perlakuan tersebut menyebabkan letupan emosi massa yang dibakar dari akumulasi persoalan yang begitu besar di antara mereka. Puncaknya menjadi pemicu konflik adalah ulah dari para pemuda atau remaja di dua desa tersebut.

Selanjutnya dalam pendekatan sosiologi hukum menurut Soerjono soekanto adalah cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan

timbang balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.⁴⁴ Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Di samping itu sosiologi hukum dapat memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern untuk melakukan atau membuat deskripsi, penjelasan, pengungkapan dan prediksi.

Sosiologi hukum memberikan sumbangan yang kongkrit terhadap perkembangan hukum secara umum, mengingat dalam tataran implementasi hukum di masyarakat diperlukan adanya reasoning hukum bagi para penegak hukum dalam memberikan pendapat hukum, maupun untuk memutuskan suatu perkara yang dapat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo terkait dengan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Istilah penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menggunakan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks, seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan lain sebagainya.⁴⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka para penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Selain itu harus memahami benar tentang hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang secara historisnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 11

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Cet. Kedua, buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 169

itu dari sisi penegakan hukum harus menjalankan, menerapkan hukum dengan seadil-adilnya, memberikan kepastian hukum, memberikan perenungan yang mendalam sebelum memutuskan suatu persoalan hukum. Mengingat hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum yang tertulis saja, tetapi masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat dan dapat juga mengatur kehidupan masyarakat.

Pemikiran dan pemahaman tentang hukum di atas setidaknya dapat mengantarkan kepada pemahaman bekerjanya hukum. Hal ini dapat dilihat dari fungsi hukum dalam masyarakat dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku;
2. Fungsi hukum sebagai alat mengubah masyarakat, bahwa hukum sebagai social engineering berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan hak yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum dan hak yang mana dapat dituntut oleh individu dalam hidup bermasyarakat.
3. Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan dimaksudkan bahwa untuk memahaminya seseorang dapat melalui perilaku warga masyarakat tentang hukum.
4. Fungsi hukum sebagai alat politik: hukum dan politik amat susah dipisahkan, karena produk hukum itu sendiri dari DPR dan Pemerintah. Hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua hukum diproduksi oleh DPR bersama Pemerintah.
5. Fungsi hukum sebagai alat integrasi: bahwa hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik, konflik yang

dimaksud yakni akibat dari benturan kepentingan antar masyarakat.⁴⁶

Memperhatikan Fungsi hukum sebagai alat integrasi menjadi penting untuk digunakan dalam rangka penanganan konflik kepentingan antar warga, golongan, agama, etnis dan lain sebagainya. Sejalan dengan konflik warga di desa Agom dan Balinuraga kecamatan Way Panji Lampung Selatan perlu diperhatikan pentingnya hukum menjadi sarana penyelesaian konflik baik sebelum atau sesudah konflik.

2. Pendekatan Teori Konflik

Pendekatan teori konflik mengambil dari pemikiran Muh. Abdi Goncing dengan tulisannya berjudul Peristiwa Konflik Balinuraga Lampung Selatan dan Persatuan Indonesia. Pemaparan kerangka teoritis dan pemahamannya tentang konflik dalam tataran teoritis dan konflik dalam tataran praktis, yakni yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu pendekatan teori ini lebih memberikan pemahaman tentang bagaimana konflik dilihat dari berbagai aspek, begitu pula dalam aspek sosiologis. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh seorang sosiolog Dahrendorf. Bahwa reasoning yang dapat diambil pemahaman dengan melihat konflik pada dasarnya memiliki dua makna.

Pertama, konflik adalah konsekuensi atau akibat dari tidak tuntasnya proses integrasi di dalam suatu masyarakat. Dalam konteks kegagalan integrasi seperti ini, konflik menjadi sebuah gejala penyakit (*syndrom*) yang dapat merusak persatuan dan kesatuan suatu masyarakat dalam sebuah bangsa.

Kedua, konflik dapat pula dipahami sebagai sebuah proses alamiah dalam rangka proyek rekonstruksi sosial. Dalam konteks ini konflik dilihat secara “fungsional” sebagai suatu strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegratif di dalam

⁴⁶Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.

masyarakat yang tidak terintegrasi secara sempurna. Konflik dalam perspektif ini diyakini sebagai sebuah media yang bila terselesaikan dengan baik, justru akan memperkuat proses integrasi dalam masyarakat.

Melalui teori dari Dahrendorf dapat dipelajari bahwa konflik dapat dilihat dari dua kacamata berbeda: positif dan negatif, pesimisme dan optimisme. Konflik sebagai sebuah kegagalan integrasi atau konflik sebagai sebuah mekanisme yang harus dilalui masyarakat dalam sebuah bangsa untuk menyempurnakan proses integrasi anggota-anggotanya. Menurut penulis, konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, baik yang mengusung isu etnis, agama, ekonomi, dan lain-lain, merupakan sebuah sarana pembelajaran bagi pihak-pihak yang berkonflik, termasuk bagi pemerintah dan aktor-aktor perdamaian lainnya. Bila konflik dapat ditangani dengan baik, maka upaya merajut kembali sebuah bingkai keragaman yang indah, menjadi sesuatu yang tak utopis lagi.

Upaya memahami konflik secara non-konvensional telah dilakukan Edward Azar pada tahun 1990 dengan memperkenalkan konsep konflik sosial berkesinambungan (*protracted social conflict-PSC*) yaitu konflik yang melibatkan kelompok-kelompok komunal yang saling memperjuangkan kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti keamanan, pengakuan identitas, penerimaan eksistensi, akses terhadap lembaga politik dan partisipasi ekonomi. Menurut Azar ada sekurangnya empat variabel di dalam berbagai PSC.

Pertama, *communal content and discontent* yaitu sikap puas atau tidak puas kelompok identitas tertentu terhadap realitas sosial dan politik yang ada. Berbagai kelompok identitas yang ada di dalam masyarakat; kelompok etnis, religius, kekerabatan, pada saat tertentu dapat merasakan bahwa kondisi sosial dan politik yang ada sesuai dengan apa yang mereka harapkan tetapi pada saat lain kelompok-kelompok tersebut dapat merasa

kecewa atau bahkan frustrasi terhadap situasi yang mereka anggap mengganggu eksistensi dan melecehkan identitas mereka. Dalam situasi penuh kekecewaan dan frustrasi inilah konflik sosial berkesinambungan dapat terjadi. Upaya untuk meredam konflik tersebut dapat dilakukan jika masyarakat saling mengakui identitas kelompok masing-masing, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Selain itu perlu dibuka akses terhadap dialog antarkelompok identitas dan proses sosialisasi identitas masing-masing kelompok hingga ke tingkat akar rumput atau lapisan paling bawah (*grassroots*) untuk meredam intensitas konflik yang disebabkan oleh *communal discontent* ini.

Kedua, deprivation atau degradasi sosial, yaitu pengingkaran terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial kelompok-kelompok identitas yang ada. Keluhan yang muncul akibat degradasi sosial seringkali diekspresikan secara kolektif. Kegagalan penguasa untuk merespon secara proporsional keluhan-keluhan tersebut dapat memicu terjadinya sebuah konflik sosial berkesinambungan. Konflik dapat memburuk jika penguasa memperlakukan berbagai kelompok identitas secara berbeda, termasuk dalam hal pendistribusian sumber-sumber ekonomi. Apa yang dipersoalkan oleh kelompok yang mengalami deprivasi bukan sekadar kepentingan (*interest*) tetapi kebutuhan (*needs*). Berbeda dengan kepentingan yang biasanya dapat dinegosiasikan, kebutuhan biasanya menyangkut hal-hal ontologis yang tidak dapat ditawar sehingga konflik yang didorong oleh kebutuhan biasanya mudah berkembang menjadi pertikaian yang mengerikan dan cenderung tidak rasional.

Kebutuhan dalam konteks ini meliputi kebutuhan untuk berkembang, kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan untuk hidup layak, kebutuhan untuk mendapat akses ekonomi-politik dan kebutuhan untuk mempertahankan identitas seperti etnis, budaya, agama, adat istiadat, dan seterusnya. Bahwa konflik menyangkut tidak terpenuhinya basic needs, mengisyaratkan

kepada kita bahwa persoalan kemiskinan ternyata ikut berperan dalam menciptakan konflik. Pembangunan ekonomi yang bermasalah justru dapat meningkatkan frustrasi sosial yang dapat mendorong berbagai pihak memulai konflik dengan pihak lain. Pembangunan dan proses modernisasi di negara berkembang berpotensi menjadi sebuah proses pembentukan kekerasan (*violent-generating process*).

Ketiga, *the quality of governance* atau kualitas administratif lembaga pemerintah. Kapabilitas negara dalam mengkombinasikan penggunaan kekerasan, perangkat hukum, kekuasaan, legitimasi, dan sistem birokrasi dalam mengatur masyarakat, melindungi warga negara, menyediakan kebutuhan material, sangat penting dalam upaya memberikan kepuasan bagi berbagai kelompok identitas yang ada. Kebanyakan negara-negara yang dilanda konflik sosial berkesinambungan, memiliki ciri-ciri antara lain; diperintah oleh seorang penguasa militer yang tidak mempedulikan kebutuhan masyarakat lapisan bawah, tidak kompeten dalam merespon keinginan dari kelompok-kelompok identitas yang ada, terlalu rentan terhadap pertikaian antarelit sehingga menciptakan keresahan dan ketidakpuasan rakyat. Pemerintah dengan kualitas administratif rendah cenderung menciptakan krisis legitimasi yang dapat memicu konflik sosial berkesinambungan. Konflik semacam ini menjadi tipikal negara-negara berkembang yang mengalami perubahan politik secara cepat.

Keempat, *international linkage* atau keterkaitan internasional yaitu adanya hubungan konflik pada suatu wilayah tertentu dengan berbagai aktor dan peristiwa internasional. Ketika aktor negara dan non-negara semakin intensif dalam melakukan hubungan lintas batas negara, maka peristiwa lokal semakin terbuka terhadap ekspose secara internasional. Keterbukaan akses internasional seringkali memperumit situasi konflik di wilayah tertentu. Berbagai kelompok identitas giat

melakukan pergerakan separatis karena mendapat dukungan (moril, teknis dan material) dari pemerintah, organisasi, kelompok maupun simpatisan perorangan di luar negeri.

Pemikiran di atas mengenai konflik sosial dapat memberikan kesinambungan dan dicatat adanya beberapa perubahan dalam teori konflik. Pertama, fokus perhatian bergeser dari dimensi power politics, yang menjadi arus utama dalam konteks Perang Dingin, ke dimensi struktural yang mengaitkan upaya resolusi konflik dengan pembangunan, isu kemiskinan, kesejahteraan dan perubahan sosial, akses politik, serta pengakuan identitas. Pengenalan dimensi struktural dalam memahami konflik mensyaratkan perubahan orientasi kebijakan negara-negara yang berupaya untuk mengatasi konflik. Kedua, adanya keterkaitan antara konflik dengan kapasitas lembaga pemerintah untuk merespon kebutuhan rakyat. Seiring dengan menguatnya garis-garis batas primordial (etnis, agama, kekerabatan), maka pemerintah tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya tetapi juga harus mampu menghindari sikap favoritisme yang menguntungkan kelompok identitas tertentu.

Konflik secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah relasi ketidaksepadanan (*relation of incompatibility*). Konflik adalah suatu situasi dimana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak saling memperjuangkan kepentingannya. Dalam situasi tertentu, pertentangan kepentingan ini dapat meningkat menjadi pertempuran mematikan di mana masing-masing pihak dapat saling menggunakan kekerasan. Dari segi keterlibatan aktor-aktornya, konflik dapat bermula dari tingkat individu, rumah tangga, kelompok dan bahkan antar negara.

Pendapat Jacques Bertrand pada tahun 2004 mengatakan bahwa negara-negara yang sedang berproses meninggalkan otoritarianisme seringkali mengalami konflik komunal. Kekerasan komunal merupakan konjungtur kritis (*critical*

junctures) bagi upaya memperbarui relasi kekuasaan dan sumber daya. Dengan kata lain, kekerasan komunal menjadi alat negosiasi bagi perubahan kelembagaan kenegaraan dalam berbagai level. Setiap perubahan struktur kelembagaan politik kenegaraan akan berkontribusi pada polarisasi identitas etnik, agama dan kelompok politik yang potensial memunculkan kekerasan.

Konflik bernuansa etnis seringkali dikaitkan dengan semangat etnosentrisme dan nasionalisme sempit. Etnosentrisme adalah sebuah cara berpikir yang menjadikan kelompok sendiri sebagai pusat dari segalanya dan menjadi tolak ukur dalam menilai dan mengukur kelompok lain. Tiap-tiap kelompok diasumsikan memupuk sendiri-sendiri kebanggaan dan harga diri, merasa superior, mengagungkan kesucian kelompok sendiri dan memandang rendah kelompok lain.

Pada setiap kelompok berpikir bahwa tradisi cara pikir dan tindak kelompoknya adalah yang paling benar sementara tradisi kelompok lain selalu dilihat dengan penuh kehinaan. Etnosentrisme, sebagaimana nasionalisme, mengandung perilaku positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan perilaku atau penyikapan negatif terhadap kelompok lain (*outgroups*). Sikap etnosentrisme ditandai oleh kesetiaan pada kelompok (*ingroup loyalty*), antipati terhadap kelompok lain (*antipathy toward outgroups*), kompensasi-kompensasi yang nyata (*tangible rewards*) dan manipulasi para pemimpin kelompok tersebut. “*Leader manipulation*” ditandai oleh adanya pemimpin yang seringkali melihat manfaat bagi diri sendiri atas *nasionalisme dan etnosentrisme*. Oleh karenanya ia berusaha meningkatkan spirit itu melalui eksploitasi rasa takut dan benci terhadap kelompok lain.

Penggunaan istilah “tak kenal maka tak sayang” berlaku dalam konteks etnosentrisme. Semakin tidak mengenal satu kelompok terhadap kelompok lain, semakin mungkin kelompok

itu salah dalam memaknai karakteristik, keyakinan, maksud-maksud dan perilaku kelompok yang bukan bagian darinya. Etnosentrisme membatasi kontak dengan *outgroups* dan oleh karenanya menyuburkan kesalahpahaman mengenai *outgroups* itu sendiri.

Perbedaan dimaknai sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, bukan ditoleransi. Kita merasa takut melihat orang lain atau kelompok lain yang berbeda dengan berbeda dengan diri kita, berbeda dengan kelompok kita. Di sinilah, *sense of difference* terhadap orang yang berbeda, menguat dan di saat yang bersamaan, *sense of belonging* terhadap kelompok sendiri semakin mengakar. Identitas diri menguat dan identitas selain dirinya juga semakin benderang. Hal ini kemudian menciptakan prasangka-prasangka dan stereotip dalam melihat setiap persoalan yang muncul.

Menurut Jacques Bertrand, ada sekurangnya tiga pendekatan yang dapat menjelaskan mengapa etnisitas seringkali menjadi saluran bagi arus konflik dan perjuangan politik. Pendekatan “konstruktivis” menekankan pada konteks historis dan sosial yang membentuk, mengubah dan menegaskan batasan-batasan etnis dan akar-akar konflik. Pendekatan “instrumentalis” fokus pada peran elit dalam memobilisasi identitas-identitas etnis di dalam kelompoknya. Pemimpin dan para aktor politik memakai kedekatan emosional dalam identitas etnis untuk memobilisasi dukungan massa dalam usahanya bersaing dalam memperebutkan kuasa negara, sumber daya dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya.

Pendekatan “primordialis” menekankan pada warisan dalam keterikatan etnis berupa kelahiran dan ketentuan yang tidak bisa berubah, nasib, dalam batasan-batasan etnisitas. Kelompok-kelompok etnis, menurut primordialis, secara inheren memang rawan terhadap beragam bentuk kekerasan terhadap kelompok yang berbeda, sebagai sesuatuyang alamiah.

BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Keragaman metode kajian dan penelitian hukum disebabkan adanya konsep terhadap gejala hukum tidak tunggal. Hal ini tergantung pada konseptualisasi terhadap gejala hukum.¹ Selanjutnya A. Hlamid Attamimi menyatakan bahwa “ilmuhukum tidak pernah menjadi ilmu sosial murni... prinsipnya hukum selalu mengandung aspek cita dan realita, atau dengan kata lain hukum mengandung aspek normatif dan empirik”.²

Berdasarkan penelaahan terhadap ilmu-ilmu sosial menunjukkan bahwa masing-masing teori sosial memiliki landasan paradigma sendiri-sendiri. Paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu, Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.³

Paradigma adalah pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, pertanyaan-pertanyaan apa yang semestinya dijawab, bagaimana semestinya

¹ Soetandyo Wignyo Soebroto, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, Hal. 228. Lihat Arief Sidharta. B. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 53-61.

² A. Hamid Attamimi, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 18

³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Payadur Alimandan, 1992, Rajawali, Jakarta hal. 8.

pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menarsirkan jawaban yang diperoleh.⁴

Paradigma ini memusatkan perhatiannya pada logika dialektis tentang realitas sosial kehidupan yang nyata realitas sosial. Selain itu paradigma adalah produk pemikiran manusia yang selalu mencari jalan mengatasi permasalahan yang dijumpai dalam perkembangan peradaban. Paradigma selalu tercipta dari masa ke masa dan berdomisili menguasai pemikiran bangsa dari kurun ke kurun.⁵

Bermula dari kasus-kasus nyata, kemudian dikaji, dianalisis dan pada akhirnya sampai pada penemuan konsep. Kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan dan anak-anak akibat konflik yang terjadi karena beberapa sebab yang terkomples di Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Realitas sosial di atas menggambarkan adanya fakta di lapangan masih adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan anak-anak yang menjadi korban atas konflik dimaksud. Oleh karena itu perlu mengambil suatu pemikiran dari pendapatnya Weber menyatakan : hukum cenderung untuk *getting thing done* dan mengabaikan akan penderitaan masyarakat tertindas.⁶

Pernyataan *getting thing done* setidaknya menggambarkan tentang hukum yang mengikat, hal ini identik dengan Peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, namun fakta di lapangan menunjukan bahwa telah terjadi suatu tindakan yang merugikan dan tidak melindungi perempuan dan anak-anak pasca konflik di Way Panji.

Oleh karena itu perlunya mengemukakan tentang “paradigma semata-mata bukan hendak menggambarkan kelebihan satu sama lain, melainkan paradigma dapat menuntun kita dalam melakukan

⁴HM. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang tanggung gugat produsen dalam perwujudan perlindungan konsumen*, Disertas, UNDIP, Semarang, 2004, hal 12. lihat juga Like Eilardjo, Makalah dalam simposium Nasional *Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Undip, Semarang, 1998, hal. 1

⁵ Hand Out Kuliah Teori-teori sosial, PDIH, 2006, hal. 2.

⁶ Esmi Warasih, *Sosiologi Hukum Yang Kontemplatif*, Kumpulan Makalah, Undip, Semarang, 2007, hal. 3

kegiatan-kegiatan ilmiah yaitu penelitian hukum mulai dari ontologi, epistemologi dan metodologi”⁷

Kegiatan-kegiatan ilmiah lebih memusatkan pada realitas sosial yang diobservasi peneliti akan menumbuhkan bangunan teori atas realitas majemuk dari masyarakatnya sehingga tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang dikalangan madzhab positivisme yang melihat hukum itu sebagai gejala normatif semata, melainkan hukum juga dipandang sebagai sosial empiris. Pada gejala empiris dapat diamati dalam kehidupan, tentu saja memerlukan jasa teori-teori sosial untuk dapat memahami gejala hukum tersebut.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan hukum yuridis dilakukan dengan mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.⁸ Dalam penelitian ini ketentuan-ketentuan normatis mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak-anak. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Peradilan anak, Hukum Adat dan Hukum Islam.

Pendekatan hukum doktrinal atau non doktrinal⁹ melalui upaya-upaya yang akan menghasilkan teori-teori eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial¹⁰.

Pendekatan di atas memberi arahan kepada peraturan perundangan-undangan, seperti pada hukum perkawinan di Indonesia dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Kaitannya dengan penelitian ini dapat diambil suatu produk hukum atau

⁷ Esmi Warasih, *Penelitian Socio Legal ; Dinamika Sejarah Dan Perkembangannya*, Kumpulan Makalah, Undip, 2007, hal. 7

⁸ Rony Hanintjo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Makalah disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999, hal11. lihat HM. Ali Mansyur, *Disertasi PDIH*, Undip, Semarang, 2004, hal. 14

⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HUMA, Jakarta, 2002, hal. 146-147.

¹⁰ *Ibid.*, hal 164

peraturan perundang-undangan yang dijadikan contoh kasus”¹¹. Telah terjadi persoalan yang mengusik rasa kemanusiaan, keadilan terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak akibat dari konflik pasca kerusuhan di Way Panji, antara Balinuraga dan Masyarakat Pribumi atau orang Lampung.

Selain itu usaha pendekatan sosiologis melalui upaya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola.¹² Dimaksudkan pendekatan sosiologis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah adalah dengan melihat fenomena yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian,¹³ terjadinya kasus konflik di Way Panji yang menyebabkan perlindungan perempuan dan anak-anak menjadi terabaikan.

Mengingat penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh hukum Islam, maka metode untuk penetapan hukum merujuk pada pendekatan *Ushul Fiqh* adalah “kaidah-kaidah yang diatasnya berdiri ilmu atas hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil yang rinci”.¹⁴ *Ushul Fiqh* sendiri dalam kaitan penelitian ini akan memberikan tatacara dalam “mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara”.¹⁵ menetapkan hukum, melalui ilmu alat serta *kaidah-kaidah ushuliya*. Kaidah-kaidah ushuliyah itu meliputi antara lain : Ushluf bahasa, pemahaman ilmu tafsir Al Qur'an dan Al Hadist, ijma (kesepakatan ulama), qias (analogi) dan dasar-dasar hukum Islam lainnya untuk menetapkan suatu

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum*, studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, Disertasi, UGM, Yogyakarta, hal. 68

¹² Ronny Hanintijo, *Log. Cit.*, hal. 11

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Cetakan kedua, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, 1982, hal. 11

¹⁴ Atha Bin Khalil, *Ushul Fiqih*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2008, hal.1

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal. 36

produk hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan Fiqh yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak-anak.

Memperhatikan metode pendekatan secara hukum positif dan pendekatan secara kaidah-kaidah hukum Islam diharapkan data-data yang terkumpul akan dilihat apakah peraturan dalam perundang-undangan atau teori-teori yang ada benar-benar berlaku pada kenyataannya, atau belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan terhadap hukum positif maupun hukum Islam, atau telah terjadi perubahan dan lain sebagainya.

Melihat dari fenomena hukum yang terjadi di masyarakat kemudian dihubungkan dengan norma-norma hukum yang ada, dengan kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini untuk menarik benang merahnya bagaimana seharusnya hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dapat terwujud. Maksudnya dalam melakukan penelitian dari kasus-kasus yang ada di masyarakat adanya kasus tidak terlindungi perempuan dan anak-anak akibat konflik. Hal ini dapat dilihat dari aspek hukum, aspek moral, dan aspek sosial. Fokusnya pada perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perspektif hukum di Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa B alinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, sebagai tempat penelitian.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam studi ini adalah penelitian diskriptif analitis.¹⁶ Analisa diskriptif dilakukan terutama ditujukan untuk pemecahan masalah yang ada pada

¹⁶Menurut kamus besar bahasa Indonesia, analitis (analisis) artinya bersifat analisis, yang artinya proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran. Lihat Suchan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah Surabaya, 1997, hal. 34.

masa sekarang¹⁷ terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak pasca konflik di Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selangkah mungkin suatu keadaan yang berlaku ditempat tertentu, atau gejala yang ada, atau suatu peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks penelitian¹⁸.

Terkait dengan penelitian ini berupaya melakukan kajian pada suatu usaha pemberian, analisis dan penafsiran guna membentuk hukum yang ideal (*ius constituendum*) untuk penerapan hukum perkawinan dan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan mut'ah dan sirri pada wilayah penelitian dari perspektif politik hukumnya.

5. Jenis Data

Selanjutnya jenis data yang dipergunakan mencakup data primer dan data sekunder.

- a. **Data primer** diperoleh melalui observasi, wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan konflik serta perlindungan perempuan dan anak-anak, seperti dari Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, aparat keamanan, Lembaga Sosial dan korban dari perlakuan yang tidak manusiawi serta keluarga korban yang meninggal dunia. Juga pada Polda Lampung dan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kemiling sebagai tempat pengungsian korban konflik Way Panji. Disamping sumber-sumber yang telah disebutkan di atas,

¹⁷ Winarno Surakhmat, *Dasar dan Tehnik Research*, Tarsito, Bandung, 1978, hal. 131

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, citra Aditya Bakti, Bandung, hal 50. lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1997, hal. 10.

data penelitian juga diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap objek-objek penelitian.

b. **Data sekunder** diperoleh melalui studi dokumen (studi pustaka) meliputi:

1). **Bahan hukum primer:** yang diperoleh dari sumber-sumber hukum yang formal (*formele rechtsbron*)¹⁹ yakni bahan hukum yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (*ide*) yang tersusun dalam hierarki perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Tap MPR
- Undang-Undang yang terkait dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan lainnya.

2). **Bahan hukum sekunder;** diperoleh dari sumber hukum materiil (*materiel rechtsbron*)²⁰ bahan-bahan itu yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, juga artikel-artikel majalah, surat kabar, laporan penelitian terdahulu, bahan-bahan dari internet dan berbagai informasi dari mas media seperti media Televisi, Radio dan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat serta pemerhati masalah : Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

¹⁹Soetandyo Wignjosebroto, *Disertasi* (Surabaya: Laboratorium Penelitian Ilmu Sosial, FISIP Unair, Surabaya, 2007. 54

²⁰*Ibid.* , hal. 54

Pemerhati masalah perempuan dan pemerhati masalah perlindungan anak.

- 3). **Bahan tersier** merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain, ensklopedi²¹, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Umum Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Arab, Terjemahan Al Qur'ah dan Terjemahan Al Hadist.

Selain dari pada bahan hukum primer, skunder dan tersier juga akan diupayakan mencari refensi dari berbagai instansi terkait yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Alat-alat yang dipergunakan untuk mendukung pengumpulan data antara lain:

- a. Manusia atau peneliti sendiri
- b. Catatan Lapangan (blocknote atau buku tulis)
- c. Tape Recorde
- d. Telepon, Handphone, dan komputer, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif, sedang analisisnya menggunakan model interaktif (*interactive modelof analysis*), yakni melalui pola pengumpulan data (data kuantitatif dan kualitatif) kemudian reduksi data,²² Dimaksudkan untuk proses peralihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan dari lapangan, reduksi data tidaklah satu hal yang terpisah dari analisis tetapi merupakan bagian yang inheren.

²¹ Soerjono Soekanto dan SriMamudji, *Penelitian HukumNormatif*, Radjawali Press, 1985,hal. 14-15

²²Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hal. 16

Kemudian menggunakan display, data dan berakhir dengan perumusan kesimpulan.²³

Reduksi berasal dari hasil wawancara, observasi atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut dirangkum dan diklasifikasi menurut kepentingan yang sesuai dengan penelitian ini. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴

Adapun langkah-langkah untuk memunculkan display atau model alur interaksi, meliputi : (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data dan (4) menarik kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan dengan analisis tema “ kultural”²⁵ yakni analisis dilakukan untuk meperoleh kejelasan dalam penelitian, baik mengenai perkawinan mut’ah dan siri, perlindungan anak dan perspektif politik hukum.

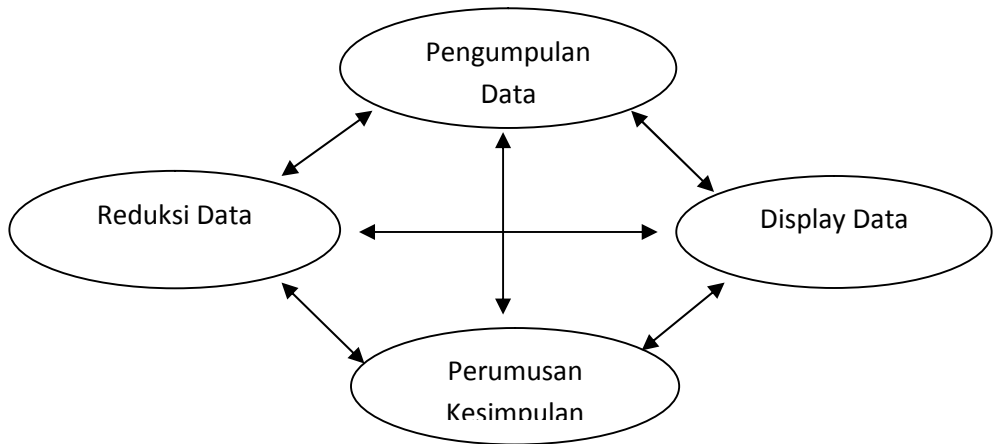
Interactive model of analisis dapat digambarkan dengan ragaan sebagai berikut:

²³ Esmi Warassih, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Bagian Hukum dan Masyarakat*, Undip, Semarang, 1999, hal. 52

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal. 257.

²⁵ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, 1990, hal. 91-105

Ragaan iv.. Interactive model of analysis²⁶.



Ragaan di atas menggambarkan proses analisis dari model interaksi analisis untuk mengambil suatu kesimpulan. Bila kesimpulan dirasa kurang mantap karena masih terdapat data dalam reduksi dan sajian data, maka dapat dilakukan melalui teknik “triangulasi data”.²⁷ Ada empat data menurut Denzin mengenai triangulasi data, yakni : (1) triangulasi sumber (*sourcer triangulation*), (2) triangulasi metode (*methods triangulation*), (3) triangulasi peneliti (*investigators triangulation*), dan (4) triangulasi teori (*theories triangulation*).

Keempat triangulasi digunakan untuk mengecek data-data yang telah terkumpul, pengecekan melalui triangulasi sumber dapat digunakan untuk pengecekan ulang mengenai sumber data yang diperoleh untuk tujuan melengkapi data. Triangulasi metode untuk pengecekan kelengkapan data, tidak menutup kemungkinan untuk

²⁶ Esmi Warassih, Log. Cit., hal. 52. Lihat M. Ali Mansyur, Disertasi, Log. Cit., hal. 22

²⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hal. 18

menggunakan metode lain sebagai alat untuk melengkapi data. Triangulasi peneliti digunakan untuk mengecek dan menelaah suatu pandangan yang berbeda untuk menguatkan konsistensi bagi peneliti itu sendiri. Sedangkan triangulasi teori yang menggunakan paradigma yang berbeda dari teori yang digunakan untuk melihat realita dapat mengundang perbedaan hasil. Spesifik pada triangulasi sumber, mengingat dalam membandingkan hasil wawancara dengan isi kemudian dengan teori akan mendapatkan suatu data yang akurat untuk mengambil suatu kesimpulan.

Selain pengecekan melalui triangulasi data, maka dikemukakan tentang metode lain untuk keakuratan data, melalui teknik Interpretasi, Evaluasi dan Teknik pengecekan keabsahan data, yakni sebagai berikut:

a. Interpretasi Data

Interpretasi adalah upaya peneliti untuk memaknakan data yang diperoleh dari lapangan setelah dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian diadakan interpretasi kedalam suatu teori untuk kemudian diprenstasikan kepada pembaca. Adapun interpretasi ini bersifat konstrutivisme baik terhadap pengalaman yang diungkapkan dengan kata-kata maupun tacit knowledge yaitu pemahaman kontekstual yang tidak diartikulasikan, melainkan dengan anggukan, gelesngan, sikap diam sesaat, humor, beraneka ekspresi wajah. Kesemuanya ini untuk melengkapi data penelitian.

b. Evaluasi, Pengecekan keabsahan dan Presentasi Data

Evaluasi merupakan penilaian atau pengujian atau assesment terhadap interpretasi, yakni dengan membenturkannya pada satu kriteria. Interpretasi yang berhasil lolos dari evaluasi tersebut kemudian dipresentasikan sebagai temuan dari penelitian. Evaluasi pertama-tama ditujukan untuk memeriksa apakah antara judul, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teoritis, konsepsual, paradigma penelitian, metode penelitian ada interaksi logis atau ada

benang merahnya. Evaluasi ditujukan antara lain (1) Plausibilitas atau masuk akal; (2) Kredibilitas atau dapat dipercaya; (3) Relevansi atau kesesuaian dan (4) Urgensi atau pentingnya.

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan (level of confidence) atau credibility,²⁸ melalui teknik pemeriksaan keabsahan, ketekunan, pengamatan dan triangulasi. Ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Melalui teknik triangulasi dengan mengadakan komparasi data, mengkalasifikasikan adanya persamaan, kesesuaian dengan dokumen yang menjadi data penelitian.

Selanjutnya setelah dievaluasi tentang keabsahannya dengan triangulasi metode dilakukan dengan mengadakan strategi pengecekan melalui teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*indepthinterview*) disatu pihak dan teknik pengumpulan data melalui *focus groupdiscussion* (FGD) dipihak lain, khusus perolehan data.

Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, maka data yang bersifat kualitatif disajikan dalam bentuk prosentase dan tabel-tabel. Kreteria penilaian kualitas peneliti dilakukan degna standar kredibilitas, transferabilitas, depandabilitas, dan konfirmabilitas. Pola yang dilakukan dalam analisis dengan interpretasi pada suti kasus berupa deskriptif kualitatif yang berupa menceritakan objek penelitian untuk mendekatkan pada realitas sosial yang sebenarnya dalam upaya mencari pola, modal atau tema. Maksudnya penlitri dapat mengecek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber metode dan teori.²⁹

²⁸ Lexy Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hal. 173

²⁹ Lexy Moleong, *Op. Cit.*, hal. 332

BAB. IV

HASIL PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK PASCA KONFLIK DI WAY PANJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

(Kajian Perspektif Sosiologi Hukum)

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

1. Geografi, Administrasi, dan Kondisi Fisik

a. Letak Kabupaten Lampung Selatan

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara $105^{\circ} 14'$ sampai dengan $105^{\circ} 45'$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 15'$ sampai dengan 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung selatan seperti halnya daerah – daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terletak sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, dimana kapal – kapal dalam luar negeri dapat merapat. Secara umum , pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak tahun 1982, Pelabuhan Panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Daerah Kabupaten Lampung selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 210.974 Ha, dengan kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan

oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Berdasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2006, terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada tahun 2008, terjadi pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan yaitu, Kecamatan Tanjung Sari, Way Sulan, Way Panji, dan Kecamatan Bakauheni, dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan secara eksisting berjumlah 17 kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 248 desa dan 3 kelurahan. Diprediksikan dalam waktu dekat akan terjadi pemekaran kecamatan pada wilayah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya pemekaran Kecamatan Kalianda, Palas, dan Natar. Secara administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kab. Lampung Tengah dan Lampung Timur

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda;

Sebelah Barat: berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran

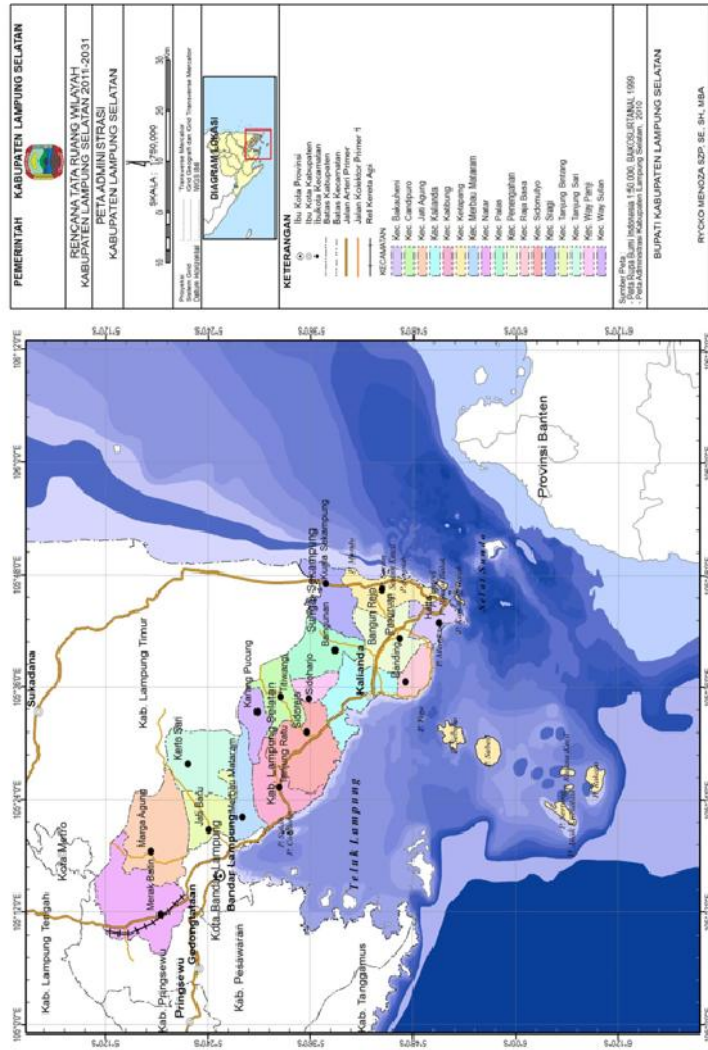
Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Jawa.

Pulau – pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau Krakatau, pulau Sebesi, pulau Sebuksu, pulau Legundi, pulau Siuncal, pulau Rimau dan pulau Kandang. Bila ditinjau dari segi luas dan keadaan alamnya, maka Kabupaten Lampung Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang. Secara topografis wilayah ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu wilayah dengan relatif datar yang sebagian besar berada di sepanjang pesisir, wilayah berbukit dan gunung yang merupakan wilayah pegunungan Rajabasa.

b. Kondisi Air Tanah

Kondisi Air tanah Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari kondisi Cekungan Air Tanah. Kondisi cekungan air tanah (CAT) Kabupaten Lampung Selatan, termasuk ke dalam dua cekungan yaitu CAT Metro – Kotabumi dan CAT Kalianda. CAT Metro – Kotabumi memiliki rata – rata imbuhan air tanah bebas mencapai $\pm 11.807.000.000 \text{ m}^3$ per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya mencapai $\pm 524.000.000 \text{ m}^3$ per tahunnya. CAT Metro – Kotabumi merupakan CAT yang dominan di Provinsi Lampung. Sedangkan CAT Kalianda memiliki rata – rata imbuhan air tanah bebas mencapai $\pm 128.000.000 \text{ m}^3$ per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya hanya $\pm 11.000.000 \text{ m}^3$ per Tahunnya. CAT Kalianda hanya merupakan CAT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan CAT Metro – Kotabumi

Peta 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan



c. Kondisi Umum Iklim

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

d. Kondisi Perairan

Kedalaman perairan akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik gelombang. Energi gelombang yang terbangkitkan dengan fletch yang panjangnya dapat mencapai ribuan kilometer akan habis terendam pada daerah di dekat pantai. Pengubahan energi ini sangat dipengaruhi oleh gesekan dari dasar laut (bottom friction). Dasar perairan, terutama pada perairan dangkal, juga dapat memperlambat perambatan gerakan pasang, sehingga suatu tempat dapat memiliki lunitidal interval yang besar.

Pasang surut didefinisikan sebagai proses naik turunnya muka laut yang hampir teratur, dibangkitkan terutama oleh gaya tarik bulan dan matahari. Karena posisi bulan dan matahari terhadap bumi selalu berubah secara hampir teratur, maka besarnya kisaran pasut juga berubah mengikuti perubahan posisi-posisi tersebut. Pengelompokan pasut berdasarkan komponennya dapat dibedakan atas: komponen pasut harian (diurnal), pasut tengah harian (semi diurnal), dan perempat harian (quarternal).

Teluk lampung merupakan perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 25 m. di mulut teluk kedalaman rata-rata berkisar pada 35 m dengan kedalaman maksimum 75 m di

sekitar Selat Legundi yang terletak di sebelah barat laut mulut teluk. Menuju ke arah utara (Teluk Betung) kedalaman perairan mendangkal hingga isobath 5 m pada jarak yang relatif dekat dengan garis pantai.

Kecamatan yang memiliki kawasan pesisir adalah Kecamatan Ketibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang dan Kecamatan Sragi, sedangkan panjang garis pantai Kabupaten Lampung Selatan mencapai \pm 247,76 Km. Kisaran muka laut rata-rata di Teluk Lampung mencapai sekitar 88,02 cm. Kisaran pasut yang besar terjadi pada waktu pasut purnama (116,25 cm). Pasut purnama adalah pasang yang tertinggi dan surut terendah yang dialami oleh suatu perairan yang terjadi pada waktu bulan purnama ataupun bulan mati. Pada saat pasang purnama tinggi muka laut di Teluk Lampung dapat mencapai 150 cm dengan rata-rata 141,25 cm. Pasut perbani terjadi pada saat bulan separuh (bulan tegak lurus terhadap posisi matahari dan bumi), dimana kisaran pasutnya paling rendah (rata-rata 0 cm).

e. Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Selatan meliputi DAS Bandar Lampung-Kalianda dan DAS Sekampung. DAS (daerah aliran sungai) yang ada di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari beberapa Sub DAS dan luas area DAS Bandar Lampung-Kalianda yang berada di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 54.260 Ha yang terdiri dari 15 (lima belas) Sub DAS, sedangkan DAS Sekampung Luas area DAS sebesar 192.380 Ha yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub DAS. Untuk lebih jelasnya mengenai DAS Bandar Lampung Kalianda dan DAS Sekampung dapat dilihat pada tabel 1.15

Tabel 1. DAS Sekampung di Kabupaten Lampung Selatan

No. DAS	DAS Sekampung	
	Sub DAS	Area (Ha)
SK-07	Way Sragi	47.740
SK-08	Way Pisang	9.670
SK-09	Way Ketibung	31.990
SK-010	Way Sulan	21.810
SK-011	Way Bekarang	15.660
SK-012	way Galih	21.920
SK-013	Way Kandis Besar	43.590
Jumlah		192.380

Sumber: Balai PSDA Seputih-Sekampung

f. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan adalah 985.075 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar dan yang terkecil di Kecamatan Bakauheni, yaitu 179.552 jiwa dan 21.188, dengan demikian konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar. Hal ini dikarenakan Kecamatan Natar memiliki akses yang mudah, dekat dengan Kota Bandar Lampung dan memiliki prasarana dan sarana yang cukup

memadai, sehingga asumsi pertumbuhan penduduk selalu meningkat setiap tahunnya dan memiliki jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan di kecamatan lain di Kabupaten Lampung Selatan kurang begitu strategis lokasinya dan jauh dari pusat Kota Bandar Lampung, sehingga masyarakat banyak ingin tinggal di dekat pusat kota.

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2010**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Natar	179.552
2	Jati Agung	99.650
3	Tanjung Bintang	71.750
4	Tajung Sari	29.787
5	Katibung	65.305
6	Way Sulan	25.936
7	Merbau Mataram	53.448
8	Sidomulyo	66.238
9	Candipuro	55.121
10	Way Panji	17.434
11	Kalianda	86.876
12	Rajabasa	26.073
13	Palas	59.357

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
14	Sragi	35.749
15	Penengahan	42.044
16	Ketapang	49.568
17	Bakauheni	21.188
	Jumlah	985.075

Sumber : Lampung Selatan Dalam Angka,

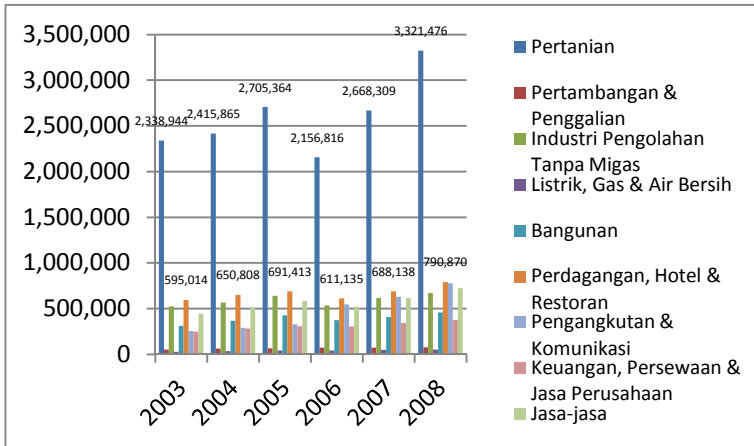
2010

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan masih terkonsentrasi di wilayah utara yang dekat dengan pusat Kota Bandar Lampung, yaitu di Kecamatan Natar. Apabila dilihat tingkat kepadatan penduduk, maka kecamatan yang memiliki kepadatan terbesar di Kabupaten Lampung Selatan terdapat di Kecamatan Natar sebesar 7 jiwa/Ha dan terkecil di Kecamatan Raja Basa sebesar 2 Jiwa/Ha. Sedangkan untuk distribusi penduduk di Kabupaten Lampung Selatan masih terkonsentrasi di Kecamatan Natar sebesar 18 % dan distribusi penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Way Panji dan Bakauheni, yaitu 2%.

g. Keuangan dan Perekonomian Daerah

Setelah pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2006, mengakibatkan berkurangnya nilai PDRB Kabupaten Lampung Selatan sebesar 626.126 atau sekitar 10,8 %. Sektor pertanian, industri pengolahan mengalami penurunan tertinggi pada tahun 2006 masing-masing sebesar 548.548 atau 20,3% dan 105.346 atau 16,5 %. Untuk lebih

jelasan mengenai PDRB Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 – 2008

Sektor riil di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2006 – 2008 rata-rata pertumbuhannya sebesar 5% per tahun. Adapun pertumbuhan tiap tahunnya yaitu sebesar 6 % pada tahun 2006-2007; 5 %, pada tahun 2007-2008. Walaupun sektor pertanian mengalami penurunan nilai tertinggi yang diakibatkan pemekaran Kabupaten Pesawaran, yaitu sebesar Rp 626.126 (juta) akan tetapi dampaknya tidak terlalu mempengaruhi karena sektor ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2007 dan 2008 sektor pertanian mengalami kenaikan kembali sebesar 626.126 atau 19,6%, begitu juga dengan PDRB di Kabupaten Lampung Selatan mengalami kenaikan sebesar

1.153.891 (juta) atau naik sekitar 15,9 %. Berikut dapat dilihat data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah/besar yang ikut mendukung pertumbuhan ekonomi di

h. Tata Ruang Wilayah

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten antara lain sebagai berikut:

- 1). mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 2). jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 3). mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- 4). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan pembangunan penataan ruang wilayah kabupaten adalah:

- 1). pengembangan kawasan budidaya berbasis sumberdaya alam dan pengembangan agropolitan dengan tetap mempertimbangkan dan mengindahkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 2). penciptaan peluang investasi pada kegiatan industri;
- 3). penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi;
- 4). pengembangan kegiatan pariwisata yang berbasis pada potensi wisata alam;

- 5).penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- 6).penguatan pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang mampu meningkatkan kondisi investasi dan perekonomian wilayah; dan
- 7).peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan Negara.

i. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana, merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, kekeringan, tsunami dan sebagainya. Beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana tersebut hendaknya dijadikan kawasan lindung dan aktivitas pada kawasan tersebut dibatasi agar jatuhnya korban akibat bencana alam dapat diminimalisir.

Beberapa jenis bencana yang terdapat di Kabupaten Lampung selatan adalah:

- 1).**kawasan rawan banjir** berada di Kecamatan Natar, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, dan Kawasan Way Panji dengan luas kurang lebih 14.000 Hektar. Terjadinya Bencana Banjir ini sering merugikan masyarakat terutama petani, mengingat banjir yang terjadi kerap kali menggenangi sawah. Terjadinya banjir ini dikarenakan terjadinya deforestasi pada areal tangkapan air, dan juga terjadinya sedimentasi pada saluran irigasi teknis, sehingga terjadi pendangkalan. Pada Kecamatan Natar, terjadinya banjir juga diakibatkan karena adanya luapan sungai. Dengan demikian untuk penanganan masalah banjir, perlu adanya koordinasi lanjut untuk mengoptimalkan fungsi areal tangkapan DAS way Sekampung dan juga normalisasi saluran drainase dan irigasi.

- 2). **kawasan rawan tsunami** berada di kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni dengan luas kurang lebih 1983 Hektar. Bencana ini cenderung terjadi pada kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil. Selain menetapkan garis sempadan pantai yang, aktivitas pada kawasan ini harus diminimalisir atau dibatasi. Sebagai upaya antisipasi perlu adanya penyusunan rencana induk evakuasi bencana tsunami kabupaten, rencana pemasangan *early warning system* di daerah pesisir pantai. Pembangunan pemecah ombak pun setidaknya dapat membantu mengurangi gelombang pasang jika terjadi tsunami.
- 3). **kawasan rawan longsor** berada di Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Bakauheni.
- 4). **Kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau** berada di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Ketapang.

j. Sosial dan Budaya

Jumlah Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2008 sebesar 477 sekolah, dimana 471sekolah negeri dan 6 sekolah swasta.Jumlah murid SD sebanyak 108.644 orang,dengan jumlah guru sebanyak 4.186 orang.Jumlah SLTP di Kabupaten LampungSelatan sebanyak 139 (51 SLTP negeri, 88SLTP swasta), dengan jumlah murid29.712 orang dan jumlah guru 2.171 orang.Sedangkan untuk SMU banyaknya sekolah36 (10 SMU negeri dan 26 SMU swasta),dengan jumlah murid 10.822 orang danjumlah guru 425 orang.Jumlah sekolah SMK ebanyak 30 (6SMK negeri, 24 SMK swasta). Jumlahmurid sebanyak 8.087 orang, denganjumlah guru ebanyak 363 orang.Sedangkan banyaknya lembaga pendidikanIslam di Kabupaten Lampung Selatan pada

tahun 2008 terinci menjadi 37 RA, 126 Ibtidaiyah, 85 Tsanawiyah, dan 30 Aliyah. Banyaknya keanggotaan pramuka dewasa Kwarcab Lampung Selatan pada tahun 2008 adalah 4.610 laki-laki dan 2.951 perempuan, dengan jumlah anak didik sebanyak 95.912 laki-laki dan 93.902 perempuan.

Tabel 6. Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Lampung Selatan

No.	KECAMATAN	NEGERI				SWASTA				PT
		T K	SD	SL TP	S L T A	T K	S D	S L T P	S L T A	
1	Natar	-	58	6	2	35	3	18	13	-
2	Jati Agung	-	44	5	1	14	1	13	11	-
3	Tanjung Bintang	1	38	3	1	18	1	10	5	-
4	Tanjung Sari	-	15	2	1	4	-	4	2	-
5	Katibung	-	30	2	1	4	-	4	1	-
6	Merbau Mataram	-	29	2	1	5	-	5	2	-
7	Way Sulan	-	8	-	-	-	1	3	4	-
8	Sidomulyo	-	34	4	1	9	-	6	4	-
9	Candipuro	-	25	3	1	1	-	7	3	-
10	Way Panji	-	9	-	-	5	-	3	-	-
11	Kalianda	1	42	7	4	9	-	5	7	5
12	Rajabasa	-	16	2	-	1	-	2	-	-
13	Palas	-	38	4	1	3	-	2	1	-
14	Sragi	-	19	3	1	3	-	1	1	-
15	Penengahan	-	30	2	1	5	-	3	2	-
16	Ketapang	-	27	3	1	3	-	1	2	-
17	Bakauheni	-	9	3	1	2	1	1	1	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

k. Kelembagaan Pemerintah Daerah

1). Pemerintahan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012 terbagi dalam 17 kecamatan, 248 desa, 3 kelurahan, dan 1.366 dusun/lingkungan. Dari keseluruhan desa yang ada, 243 desa sudah berstatus definitif, sedangkan 5 desa masih berstatus persiapan. Pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan diawasi oleh wakil-wakil rakyat melalui DPRD. Pada tahun 2009, sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan berasal dari fraksi Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). DPRD Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas beberapa komisi, yaitu Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang perekonomian dan Keuangan), Komisi C (Bidang Pembangunan), dan Komisi D (Bidang Kesejahteraan Masyarakat). Jumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan adalah 45 orang.

B. Penyebab Konflik di Way Panji Kabupaten Lampung Selatan

Adapun penyebab konflik berdasarkan hasil penelitian di lapangan, di antaranya pendapat dari Ketua Komnas HAM, bahwa penyebabnya antara lain adanya kesenjangan sosial antara kelompok Balinuraga dan penduduk pribumi yang mendiami wilayah di Way Panji. Sebenarnya bibit konflik sudah berlangsung lama, hanya saja puncaknya 28-29 Oktober 2012.¹

¹Wawancara dengan ketua Komnas HAM dalam rangka peresmian Sekala Lampung di Bandar Lampung, 6 Nopember 2013

Memperhatikan keterangan di atas, maka kasus tersebut haruslah didekati dengan kajian teoritis mengenai konflik. Hal ini dimaksudkan agar dapat memahami persoalan dan dapat mengambil langkah-langkah praktis untuk membantu menyelesaikan konflik dan atau untuk pencegahan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu memahami definisi konflik yang akan diuraikan berikut ini:

Menurut Taquiri dalam buku Newstorm dan Davis, sebagaimana disebutkan Bernard Raho dalam buku Sosiologi Modern. konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus menerus. Menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan

dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Sementara itu, konflik sosial bisa diartikan menjadi dua hal. Pertama, perspektif atau sudut pandang yang menganggap konflik selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial. Kedua, konflik sosial merupakan pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan, dan gerakan perlawanan. Soerjono Soekanto menyebutkan konflik sebagai pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai dengan ancaman dan atau kekerasan.

Para teoritis konflik banyak berpedoman pada pemikiran Marx, meskipun memiliki pemikiran sendiri yang berlainan. Tokoh-tokoh teoritis konflik diantaranya Ralf Dahrendorf dan Randall Collins. Dahrendorf berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan consensus, sehingga teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, teori konflik dan teori konsensus. Dahrendorf juga mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Tokoh lainnya Collins menjelaskan bahwa konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial sehingga tidak menganggap konflik itu baik buruk. Collins memandang setiap orang memiliki sifat sosial tetapi juga mudah konflik dalam hubungan sosial mereka. Konflik bisa terjadi dalam hubungan sosial karena penggunaan kekerasan oleh seseorang atau banyak orang dalam lingkungan pergaulannya. Ia melihat orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, jadi benturan mungkin terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa konflik merupakan akibat dari adanya ketidak sepakatan, kontroversi, perbedaan pandangan, dan pertentangan kepentingan baik antar individu maupun antar kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial individu maupun kelompok. Dimana konflik ini akan terus ada selama interaksi itu sendiri masih ada.

Akibat lain yang ditimbulkan dari konflik, khususnya di Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, maka ada beberapa dampak terjadinya konflik tersebut antara lain krisis kejiwaan yang mengganggu kondisi kejiwaan korban konflik. Selanjutnya pemahaman tentang krisis kejiwaan adalah gangguan dalam diri individu dikarenakan peristiwa yang menegangkan atau mengancam yang dirasakan oleh individu.

Definisi diatas memberikan kita gambaran bahwa krisis kejiwaan terjadi karena adanya hal yang menegangkan maupun mengancam yang dirasakan oleh individu, pada kasus krisis kejiwaan warga Balinuraga Lampung Selatan disebabkan oleh adanya konflik sosial yang berkecamuk di daerah tersebut. Konflik inilah yang memicu krisis kejiwaan pada warga Balinuraga, Lampung Selatan.

1. Krisis kejiwaan yang dialami warga balinuraga pasca konflik

Krisis kejiwaan yang dialami oleh warga balinuraga, Lampung Selatan. Merupakan bentuk Krisis Kejiwaan Situasional. Krisis ini terjadi dikarenakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba biasanya berkaitan dengan pengalaman kehilangan. Dalam kasus krisis kejiwaan warga Balinuraga adalah kehilangan orang tercinta atau kerabat maupun keluarga dan materi sebagai akibat dari berlangsungnya konflik.

2. Factor-faktor yang menyebabkan krisis kejiwaan warga Balinuraga pasca konflik

Krisis kejiwaan dapat terjadi karena banyak hal baik itu rasa takut, merasa tidak aman, trauma, kehancuran hati ataupun stressor lainnya yang kemudian menimbulkan ketakutan dikalangan warga balinuraga, lampung selatan. Krisis kejiwaan terjadi sebagai akibat dari adanya perasaan tidak aman yang mengakibatkan timbulnya ketakutan dikalangan warga yang menimbulkan rasa was-was saat hendak beraktivitas, selain itu krisis kejiwaan juga dipicu oleh trauma yang cukup besar dikalangan warga terutama kaum ibu rumah tangga sebagai akibat dari konflik yang telah berlangsung.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan ditariknya pasukan pengawas oleh pihak pemerintah yang akan semakin meningkatkan rasa tidak aman maupun takut dikalangan warga balinuraga, lampung selatan. Terlebih lagi pemerintah daerah yang dianggap gagal dan tidak mampu mengatasi konflik sosial antar warga di Lampung Selatan

3. Perbedaan Individu

Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang

berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

4. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan dan Kepentingan

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Penyebab lain mengenai konflik diakibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka. Pertikaian dua hari, Minggu dan Senin (28 dan 29 Oktober), telah terjadi antara warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Beberapa desa di sekitarnya, antara lain, Desa Patok dan

Sidoreno, Way Panji, terkena imbas. Hari Rabu (31/10) situasi di Pasar Patok berangsur Pulih. Balinuraga dan sebagian Sidoreno masih lengang.

Konflik komunal atau kerusuhan sosial seperti itu bukan yang pertama kali terjadi di Lampung Selatan. Sejak tahun 1990-an hingga kini, sudah lima kasus serupa, seperti disampaikan dosen FISIP Unila, Hartoyo. Namun, belum setahun pertikaian terakhir, kini muncul lagi konflik serupa.

Tahun 2012 adalah tahun kekerasan bagi Lampung Selatan. Pada 24 Januari, pernah terjadi konflik komunal serupa melibatkan warga Desa Kotadalam dan Desa Napal, Kecamatan Sidomulyo. Warga lima marga di Kotadalam membakar hampir 100 rumah di Napal hingga ratusan keluarga mengungsi.

Ada rumah yang rusak di Napal belum selesai dibangun meski sebagian sudah berdiri ketika insiden Wai Panji muncul. Di gapura Desa Napal, satu regu marinir bersiaga penuh, Kamis (1/11) petang. Rumah sepi penghuni karena mengungsi. Fenomena ikatan yang rapuh yang menyebabkan mudahnya tersulut suasana konflik. Adapun desa Napal, Balinuraga, dan sebagian Sidoreno dihuni etnis Bali, yang oleh etnis lokal Lampung Selatan disebut "pendatang". Isu "pendatang" dan penduduk "lokal" belum pernah muncul separah ini pada tahun-tahun sebelumnya. Masalah ini timbul karena tali ikatan sosial rapuh.

Selang tiga bulan setelah peristiwa Napal, terjadi kerusuhan sosial di Kalianda. Ribuan orang, pada 30 April, berunjuk rasa ke kantor bupati dan membakar patung Zainal Abidin Pagarlam (ZAP) yang berdiri di jalan masuk kota itu, tepat di sisi jalan lintas Sumatera. Menurut saksi mata, aparat pemma dan polres setempat berupaya memediasi, tetapi tidak digubris. Massa menolak patung mantan Bupati Lampung Selatan dan mantan Gubernur Lampung itu. ZAP adalah ayah

Gubernur Lampung Sjachroedin ZAP dan kakek kandung Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza ZAP.

Ketika Kompas mengunjungi kota itu hari Rabu, fondasi di mana patung itu dahulu didirikan masih ada, namun compang-camping. Warga menuturkan, saat kerusuhan, leher patung diikat pakai tali dan ditarik oleh kendaraan besar hingga roboh. Kepalanya dipotong. ZAP hendak dijadikan ikon Lampung Selatan. Rycko tidak hanya mendirikan patung kakeknya, dia juga mengganti nama Jalan Kolonel Makmun Rasyid, tokoh pejuang Lampung Selatan, dengan nama ZAP. Perubahan nama jalan mengecewakan sebagian rakyat.

Terkait insiden terbaru di Way Panji, ada yang mengejutkan. Selain meremehkan kapasitas dan kepedulian Menoza dalam meredam gejolak, para tokoh Lampung Selatan menolak berdamai dengan warga Balinuraga dan sebagian warga Sidoreno dari etnis Bali. Warga Bali lebih dari 70 tahun menetap di wilayah itu mengikuti program transmigrasi.

Kalianda ialah kota kecil yang menjadi etalase Lampung Selatan. Hampir 60 persen penduduk adalah pribumi yang sudah menetap ratusan tahun yang disebut Lampung Peminggir. Sisanya pendatang dari Bali, Jawa, Banten, dan sebagian Sumatera. Di kota kecil paling selatan Sumatera ini sering terjadi pergolakan sosial, tetapi semakin intens setahun ini. Dahulu lebih karena persoalan tanah atau lahan perkebunan. Kini pemicunya pun hal sepele. Insiden Napal dipicu perebutan lahan parkir. Kasus Way Panji karena kenakalan remaja: dua gadis Agom pengendara sepeda motor dihadang pemuda Balinuraga bersepeda hingga mereka terjatuh.

Menilik peristiwa konflik itu terjadi lantaran hanya persoalan sepele itu meletup menjadi masalah besar, yang justru meresahkan seluruh masyarakat dimana daerah konflik tersebut sebenarnya sudah lama hidup berdampingan,” kata M Zahri, Ketua Paguyuban Lima Marga Pesisir Lamsel di

Kalianda. Namun persoalan tersebut tidak dianggap selesai, melainkan jadi sumber konflik yang besar. Sementara ada pendapat dari pemerhati masalah politik lokal, Syafarudin, yang juga dosen dan Ketua Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fisip Universitas Lampung menjawab pertanyaan itu. Menurut dia, konflik yang pernah ada selama ini, yang terjadi secara horizontal dan vertikal itu tidak ditangani secara tuntas. Implementasinya rendah.

Contoh, dalam kasus Napal di Sidomulyo sebenarnya sudah berakhir damai. Bahkan semua pihak menandatangani naskah perdamaian. Tetapi, pecah lagi konflik serupa di Way Panji. Hal sepele itu mudah meledak menjadi satu persoalan besar karena tidak maksimalnya peran pranata yang ada. Jika pranata keluarga berjalan, tetapi pranata sosial dan hukum tumpul, kelompok masyarakat cenderung main hakim.

Apabila potensi konflik dapat dikelola dengan baik oleh para pemangku adat, tokoh masyarakat dan Pemda Lampung Selatan, niscaya tidak akan terjadi konflik komunal di Lampung selatan. Mengingat hanya persoalan kecil itu seharusnya dapat diredam di keluarga, tentu saja tidak akan melebar. "Hal paling penting lagi adalah peran pemerintah lokal. Variabel kepemimpinan di pemerintah adalah hal paling penting. Contohnya, pada zaman Bupati Zulkifli Anwar, pernah terjadi konflik komunal serupa, tetapi karena gaya kepemimpinan dekat dengan masyarakat, pemimpin yang mengayomi, masalahnya dapat diredam sejak dini," kata Syafarudin.

Lampung Selatan itu ibarat "pelangi", indah karena berwarna-warni, tetapi masih ada garis pemisahnya. Pluralitasnya tersekat. Lampung Selatan harus dibangun menjadi "mozaik khatulistiwa". "Ada banyak yang berbeda, tetapi bisa menjadi satu yang indah, plural namun harmonis, melahirkan satu identitas bersama," katanya. Peran itu belum

banyak dilakukan pemerintah lokal selaku fasilitator dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pemimpin harus hadir di tengah rakyat ketika ada letupan sekecil apa pun, dan menjadi tokoh yang dapat didengar dan mau mendengarkan, disegani.

Penyebab konflik: wawancara dengan: Nur Ketua Komnas HAM, pada tanggal 16 Nopember 2013, ditengah-tengah acara Sekala Selampung di Lapangan Korpri depan Kantor Gubernur Lampung. Ia menyatakan, bahwa dalam sejarah awal keberadaan masyarakat Bali dimulai sejak meletusnya gunung agung di Bali, maka ada satu dua orang berangkat ke Lampung, tepatnya di Way panji Kabupaten Lampung Selatan. Dalam lintasan sejarah sekelompok orang yang berasal dari Bali diterima oleh pemuka adat dan mereka menyatakan untuk berlindung dan meminta jalan untuk hidup. Akhirnya mereka diberikan tempat, dijamin makan dan kebutuhan hidup, juga diberi pekerjaan untuk mengolah lahan sendiri.

Selanjutnya pada perkembangannya sekelompok orang tersebut melakukan bercocok tanam dan berhasil untuk menghidupi mereka. Kemudian mereka meminta izin untuk menjemput keluarganya yang masih berada di Bali. Akhirnya diberikan izin, kemudian dalam lintasan sejarah secara bertahap terjadi perpindahan dari Bali ke Lampung dan berkembang sampai sekarang.

Pemukiman secara berkelompok yang umumnya berasal dari Bali berkembang cukup pesat, sebagian masih bisa bersosialisasi dengan baik, namun ada sebagian kelompok yang terisolasi jauh dari pemukiman penduduk, mereka dikelilingi perkebunan.

Selanjutnya dalam perjalanan konflik dari persoalan kecil kemudian memicu luapan emosi massa menjadi sulit dikendalikan, padahal persoalan itu ditimbulkan oleh pelecehan terhadap dua gadis remaja oleh pemuda desa

tetangga. Pihak keluarga dan warga desa kedua gadis yang menjadi korban, barangkali, tidak lagi melihat perlunya mencari solusi arif berdasarkan nilai-nilai sosial atau bahkan tak menganggap lagi perlunya penyelesaian secara hukum terhadap pelaku pelecehan seksual itu. Lebih parah lagi, aparat keamanan tak bisa mencegah dan atau mengendalikan arus massa yang mengamuk.

Situasi dan kondisi pada saat peristiwa di Lampung Selatan itu terjadi, sebenarnya tidak boleh dianggap sebagaimana persoalan kecil karena merupakan ekspresi kolektif lokal yang sangat jauh mengabaikan nilai-nilai sosial kemanusiaan sesungguhnya. Hanya karena sekat administrasi pemerintahan desa, hubungan-hubungan sosial dan budaya kebersamaan seolah-olah sudah terputus menyertainya. adalah "perasaan harga diri" karena merasa telah dilecehkan sehingga harus membalas dengan kekerasan fisik. Harga diri, yang ternyata dinilai lebih tinggi dari nyawa manusia yang menjadi korban atas balas dendam itu.

Mereka pun jauh dari kesadaran kalau para pelaku pelecehan itu adalah kelompok anak muda yang barangkali hanya merupakan perilaku iseng, bagian dari kenakalan remaja belaka. Orang lupa kalau ini bisa jadi produk dari rumah tangga dan lingkungan yang kurang memperhatikan pembinaan moral generasi.

Tragedi memprihatinkan di Lampung Selatan, boleh jadi merupakan gambaran kecenderungan bahwa perilaku kekerasan dan penghilangan nyawa manusia dianggap sebagai hal biasa untuk memperoleh "rasa puas" atas perilaku tak senonoh dan atau jahat dari pihak lain. Peristiwa ini sebenarnya sudah jamak terjadi di sejumlah daerah lain dengan faktor pemicunya yang bisa memiliki persamaan ataupun berbeda satu sama lain. Banyak permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan, akan tetapi karena terpendam lama, maka

ketika muncul menjadi ledakan konflik semua pihak menjadi prihatin terhadap konflik yang ada.

Oleh sebab itu dengan adanya konflik bisa dijadikan komoditas politik, mengingat kecenderungan seperti itu diperparah dengan bukan saja pemerintah lokal luput dalam mempererat tali modal sosial lintas komunitas, melainkan justru `kerap dijadikan basis pertempuran politik antarfigur politisi yang memperebutkan suara dalam rangka merebut jabatan politik. Apalagi jika permukiman masyarakat tersegregasi berdasarkan suku atau kelompok budaya tertentu, tidak berbaur. Mereka dengan sangat mudah akan tersulut oleh provokasi emosional tertentu. Kecenderungan seperti itulah, saya kira, juga terjadi di desa-desa yang bertetangga di Lampung Selatan itu.

Menyadari akan telah terjadinya tindakan kekerasan atau bentrokan fisik oleh kelompok-kelompok masyarakat juga akibat krisisnya kepercayaan terhadap kepastian hukum di negeri ini. Penanganan oleh aparat penegak hukum begitu lambat atau dirasa masih jauh dari nilai keadilan yang diharap masyarakat. Apalagi jika suatu kasus dialami oleh masyarakat kecil, justru mereka hanya jadi korban berkepanjangan karena cepat dan lambatnya suatu masalah diselesaikan aparat penegak hukum, ternyata banyak ditentukan oleh faktor materi. Adagium, bahwa hukum dan keadilan dianggap bukan lagi untuk mereka, melainkan untuk para pejabat dan atau pemilik uang yang bisa mengarahkan atau menambah pendapatan resmi oknum aparat yang terkait.²

²Laode Ida, *Ikatan Sosial Meredup, refleksi dari kondisi politik yang karut marut*, Kompas, 1 November 2012

PENGUNGSI LAMPUNG Kami Kehilangan, tetapi
Takkan Dendam

Kompas – Kamis, 01 November 2012



KOMPAS/HERLAMBANG JALUARDI

Pengungsi akibat konflik di Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, menerima bantuan berupa pakaian layak pakai di aula Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Lampung, Rabu (31/10). Hingga kemarin, sekitar 2.000 orang mendiami empat aula di kompleks SPN. Bantuan bahan makanan dan pakaian berdatangan dari berbagai kalangan sejak Selasa. Namun, koordinasi jenis dan pendistribusian bantuan perlu diatur supaya terbagi rata.



Pengungsi kerusuhan di Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan memenuhi sebuah ruangan di Sekolah Polisi Negara Polda Lampung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Selasa (30/10/2012). Hingga Selasa malam, tercatat sekitar 2.000 orang menggunakan sejumlah ruangan di sekolah tersebut sebagai tempat tinggal sementara. Pengungsi masih membutuhkan bantuan berupa selimut dan pakaian layak pakai. Ratusan rumah hangus terbakar dari pertikaian antardesa tersebut. |

KOMPAS/HERLAMBAANG JALUARDI

5. Kondisi di Pengungsian

Situasi dan kondisi di Pengungsian umumnya merasakan ketidak pastian, seperti seorang korban konflik, yakni Nyoman Darsa (36) tampak risau, berbeda dengan rekan-rekan lainnya dari Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, yang sudah mengungsi di Sekolah Polisi Negara Polda Lampung. Sejak pertama tiba di pengungsian itu, Selasa siang, ayah mertuanya, Ladri (60), tidak terlihat. Dalam penelitian hasil wawancara yang dihimpun oleh Lampung Post terbitan, Rabu 31 Oktober 2012, bahwa Ladri adalah salah satu korban jiwa akibat kericuhan pada Senin siang. "Hari itulah saya terakhir melihatnya. Kami sedang berkumpul di rumah tetangga yang menjadi posko. Saat ada serangan, kami kocar-kacir menyelamatkan diri," kata petani ini dengan terbata-bata memberi keterangan tentang peristiwa konflik yang menakutkan dan bahkan tidak terlupakan sepanjang hidupnya.

Korban konflik lainnya seorang yang bernama Darsa lalu sibuk berbicara dengan kerabatnya dalam bahasa daerah. Mereka baru menerima kabar dari saudara yang tak ikut mengungsi bahwa Ladri tidak berhasil melarikan diri. Dari obrolan itu tersirat kondisi jenazahnya mengenaskan. Saat berusaha ditegaskan, Darsa hanya menjawab singkat, "Kami belum yakin," lalu memalingkan muka. Darsa melaporkan kabar itu kepada polisi yang bertugas di posko pengungsian. Dia menceritakan ciri-ciri mertuanya. Pakaian terakhir yang dikenakan Ladri adalah celana pendek, kaus, dan memakai topi. Polisi masih enggan membenarkan laporan tersebut. Sebelumnya, Darsa mengaku sudah mencari di kamar jenazah Rumah Sakit Kalianda, tetapi hasilnya nihil. Ayah satu anak ini tetap ingin mencari Ladri, bagaimanapun kondisinya. Jikalau kemungkinan terburuk terjadi, keluarga Darsa berencana melakukan kremasi sesuai adat mereka. Kenyataan ini sampai di cross cek tentang keberadaannya. Maka didapati jawaban yang sama. Itulah gambaran kesedihan dan kehilangan pasca konflik di Way Panji Lampung Selatan.

Perasaan kehilangan lekat menyelimuti pengungsian yang dihuni sekitar 2.000 orang itu. Tak cuma kehilangan sanak saudara, mereka juga kehilangan mata pencarian yang telah mereka geluti bertahun-tahun dan harta benda yang telah mereka kumpulkan. Santri (50) adalah ayah dua anak kelahiran Nusa Penida, Bali, yang menjalani lebih dari separuh usianya dengan bertani di Balinuraga. Luas sawahnya sekitar 5.000 meter persegi.

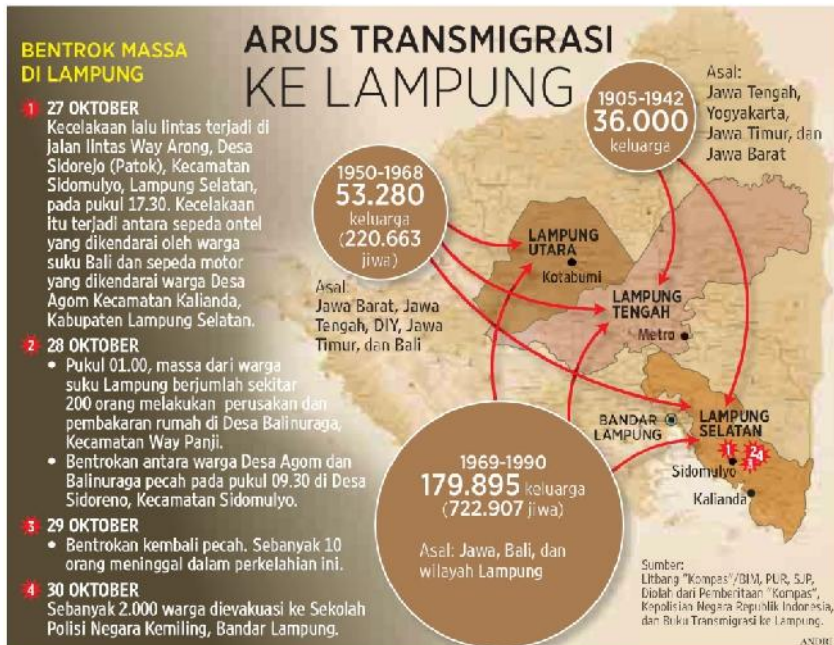
Selain bertani, dia juga beternak babi. Terakhir, dia memiliki empat babi. Hewan itu biasanya dijual seharga Rp 500.000 per ekor. "Tidak tahu apakah babi itu sekarang masih ada. Yang saya tahu rumah ikut terbakar," katanya menceritakan kembali dari apa yang ia dengar dari tetangga. Sejak keributan pada Sabtu malam, Santri belum kembali ke rumah. Kemeja

kotak-kotak, kaus kuning, dan celana pendek belum digantinya sejak pertama kali menyelamatkan diri. Ada bekas getah karet di kausnya. Santri sedih akan kerugian yang diderita, tetapi ia mengaku tidak menyimpan dendam. "Buat apa (dendam) Semua sudah diatur oleh Yang Kuasa. Nanti kalau teman-teman kembali ke Balinuraga, ya, saya akan ikut, dan bertani kembali," katanya. Perasaan serupa diutarakan petani muda, Made Rasta (30). Dia memang baru empat tahun tinggal di Balinuraga, tetapi keluarga besarnya, sekitar 40 orang, telah 30 tahun bercocok tanam di desa tersebut.

Sementara keterangan dari Made memiliki traktor bajak dan mesin perontok padi. Saat kerusakan pecah, dia menyimpan 25 karung padi ciherang hasil panen. Setiap karung berisi 120 kilogram. Harganya mencapai Rp 500.000 per kuintal. Santri, dia juga beternak. Made memiliki 2 babi dewasa dan 10 anakan, serta 2 sapi. "Hasil panen dan alat-alat pertanian semua hangus. Ternaknya tidak tahu ke mana," ujar Made yang rumahnya juga terbakar. Made masih ingin kembali bertani di Balinuraga meskipun harus memulai dari nol. Dia berharap pemerintah membantu para petani memulai kembali kehidupan. "Tidak ada perasaan dendam. Kami yakin bisa hidup kembali, saling menghormati seperti dulu," katanya.

Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap para pengungsi yang menempati lokasi pengungsian di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, itu jauh dari tempat terjadinya konflik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan terlindung oleh konflik susulan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Mereka menempati empat aula sekolah itu. Aula terbesar, yaitu Gedung Anton Sujarwo, ditempati 569 orang atau 114 keluarga. Di aula itu, mereka tidur beralaskan terpal. Ada yang menambahkan dengan kasur, ada juga dengan tikar yang sempat mereka bawa. Juga dilengkapi kamar mandi. Air bersih dari PDAM setempat dan kepolisian. Selain itu ada bantuan bahan makanan dari individu dan kelompok masyarakat juga

datang silih berganti, seperti mi instan, air minum kemasan, dan beras. Ada dua tenda dapur umum yang telah berdiri dari Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Palang Merah Indonesia. Selintas Gambaran kondisi daerah konflik di Lampung Selatan.



Berdasarkan hasil penelitian dan di komparatifkan dengan artikel dari Kompas, 31 Oktober 2012, bahwa ikatan sosial sudah semakin rentan. Kalianda, Kompas - Warga di beberapa desa di Lampung Selatan Lampung, menolak berdamai dengan warga di Desa Balinuraga dan Sidoreno. Upaya Penolakan berdamai disampaikan tokoh-tokoh yang menghadiri pertemuan dengan Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza, di Kalianda, ibu kota Lampung Selatan, Rabu. Rycko Menoza meminta maaf karena tidak berada di tempat saat kejadian.

Pertemuan itu dihadiri sekitar 200 orang, terdiri dari tetua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda, dari Kalianda dan Way Panji. Syafruddin Husin, salah satu tokoh Lampung Selatan, mendesak agar warga Balinuraga dan Sidoreno yang kini mengungsi ke Sekolah Polisi Negara di Bandar Lampung tidak dipulangkan. Kedua desa itu dinyatakan status quo. Gagalnya ajakan berdamai itu membuat situasi keamanan di beberapa desa di Lampung Selatan rawan meski sudah 4.000 personel keamanan dikerahkan.

Sebagaimana hasil penelitian ditemukan kondisi masing-masing desa yang porak poranda setelah terjadi konflik, seperti di desa Balinuraga, Agom, dan Sidoreno, puluhan rumah di sisi jalan utama Sidoreno dan Balinuraga dibakar dan tinggal puing.

Setelah terjadinya konflik pada waktu itu ditemui beberapa rumah yang telah ditinggal oleh pemiliknya. juga ada himbauan berupa spanduk kecil berisi ajakan damai, seperti "Bhinneka Tunggal Ika", "Satu Nusa Satu Bangsa", dan "Satu Nusa Satu Bangsa Satu Tanah Air Indonesia". Sementara kondisi saat pihak dari kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Polda Lampung Brigjen (Pol) Jodie Rooseto mengatakan, pihaknya telah meningkatkan pengamanan di titik-titik terjadinya konflik komunal itu. Akibat pertikaian komunal selama dua hari, 28-29 Oktober, 14 orang tewas. Insiden itu melibatkan warga etnis lokal di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan etnis Bali di Desa Balinuraga dan Sidoreno, Kecamatan Way Panji.

Menurut sosiolog Universitas Gadjah Mada, Heru Nugroho, konflik sosial yang marak akhir-akhir ini sebagai refleksi dari karut-marutnya kondisi politik elite pusat. Rakyat mengalami kebuntuan dalam bersosialisasi dan memilih jalan kekerasan untuk menunjukkan kekuasaan sebagai bentuk pelampiasan terhadap ketidakpedulian pejabat dan wakil rakyat.

Konflik antarwarga itu, kata Koordinator Program Pascasarjana Psikologi Perdamaian Universitas Indonesia Ichsan Malik, terkait faktor struktural, antara lain masalah penguasaan

kepemilikan lahan. Dalam kasus Lampung, hubungan antarkelompok masyarakat sebagai warga eks transmigrasi masih rentan karena ada faktor struktural yang belum sepenuhnya tertangani baik. "Pemicunya memang bisa kasus kecelakaan lalu lintas. Akseleratornya, provokasi dan emosi massa. Namun, ada faktor strukturalnya," kata Ichsan.

Sosiolog dari Universitas Lampung, Hartoyo, mengatakan, insiden terbaru di Lampung Selatan itu merupakan akumulasi puncak masalah serupa sejak dua tahun silam. Hal itu menunjukkan rendahnya soliditas sosial atau meredupnya kohesi sosial. "Soliditas sosial rendah karena modal sosial telah berantakan."

Menurut dia, modal sosial itu antara lain jaring sosial. Dikatakan, jaring sosial di antara warga yang terlibat bentrokan itu, yang terbangun selama ini, telah hancur. Terjadi miskomunikasi dan tidak saling memahami. Modal sosial lain yang merosot ialah hilangnya rasa saling percaya antarwarga dan tokoh masyarakat.

Hartoyo melihat kasus terbaru ini juga merupakan puncak kekecewaan warga terhadap pemimpin di lingkungan pemerintahan lokal. Jika warga menolak berdamai atau mengecam ketidakbecusan pemerintah daerah sehingga mengakibatkan konflik komunal.

6. Perubahan-Perubahan Nilai yang Cepat

Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak

kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya.

Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

7. Jenis-jenis Konflik

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam :

- a. Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role)).
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
- c. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
- d. Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)
- e. Konflik antar atau tidak antar agama
- f. Konflik antar politik.

8. Akibat Konflik

Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik dengan kelompok lain.
- b. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.
- c. Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga
- d. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.
- e. Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua-dimensi; pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya. Skema ini akan menghasilkan hipotesa sebagai berikut:

- a. Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.
- b. Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk "memenangkan" konflik.

Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan "kemenangan".

- c. Konflik bagi pihak tersebut.
- d. Tiada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik.

Suatu konflik tidak selalu mendatangkan hal-hal yang buruk, tetapi kadang-kadang mendatangkan sesuatu yang positif. Segi positif suatu konflik adalah sebagai berikut.

- a. Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah, misalnya perbedaan pendapat akan sesuatu permasalahan dalam suatu diskusi atau seminar biasanya bersifat positif sebab akan semakin memperjelas dan mempertajam kesimpulan yang diperoleh dari diskusi atau seminar.
- b. Memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan-hubungan social dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok.
- c. Merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antarindividu dan kelompok.
- d. Dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru.
- e. Dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.

Hasil atau akibat-akibat dari suatu konflik sosial adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (*in group solidarity*) yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain.
- b. Keretakan hubungan antarindividu atau kelompok, misalnya keretakan hubungan antarkelompok dalam Negara Israel

akibat konflik dengan bangsa palestina dan Negara-negara arab lainnya.

- c. Perubahan kepribadian para individu, misalnya terjadinya perang antarkelompok yang menimbulkan kebencian, saling curiga, beringas dan lain-lain.
- d. Kerusakan harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia.
- e. Akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian.

Suatu masyarakat dapat dinyatakan telah mencapai kondisi tertib jika terjadi keselarasan antara tindakan anggota masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tertib sosial ditandai oleh tiga hal berikut.

- a. Terdapat suatu sistem nilai dan norma yang jelas.
- b. Individu atau kelompok di dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku.
- c. Individu atau kelompok dalam masyarakat menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Misalnya, tertib di jalan raya atau tertib antri di loket-loket pelayanan umum akan dapat tercapai apabila terdapat aturan-aturan dan norma yang jelas dan setiap pengendara, penumpang, dan pemakai jasa layanan umum harus memahami serta menyesuaikan tindakan-tindakan mereka dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat-tempat tersebut. Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki-sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan

lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh.

Konflik adalah kenyataan hidup (*reality*), tidak terhindarkan (*undeniable*) dan bersifat kreatif. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya dapat diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik lagi bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna apalagi karena ia memang merupakan bagian dari keberadaan manusiawi kita. Dari tingkat mikro, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat dan Negara, semua bentuk hubungan manusia-sosial, ekonomi dan kekuasaan-, mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik.

Berdasarkan kajian yang mendalam dari peristiwa konflik, apabila ditengok dari kacamata teoritis, maka konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi yang terus menerus terjadi di masyarakat. Polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka.

Konflik juga dapat disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan. Kondisi ini akan semakin rumit jika pihak-pihak yang berkonflik sulit memisahkan antara perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu yang berkembang. Konflik yang berakar dalam dapat juga disebabkan oleh kebutuhan dasar fisik, sosial dan mental manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi pemenuhannya. Pada kondisi lain, konflik juga dapat disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau karena penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

Pada tataran yang lebih luas, konflik juga dapat disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi. Kondisi konflik akan berubah menjadi kekerasan massa terbuka jika dilakukan mobilisasi atas konflik yang terjadi. Kondisi psikologis konflik juga tidak akan secara langsung mengakibatkan timbulnya perilaku kekerasan kolektif tanpa adanya kejadian yang menjadi pemicu.

C.Upaya Penyelesaian Konflik di Way Panji di Lampung Selatan

1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap warga Balinuraga pasca konflik

Melakukan program perdamaian antar pihak yang berkonflik pasca konflik dinilai mampu mengurangi sedikit rasa takut dikalangan warga. Selain itu pemerintah juga bisa mengintenskan dialog antar tokoh masyarakat dan perlahan mengintenskan dialog antar kelompok warga, diharapkan dengan adanya dialog intens antar tokoh masyarakat maupun tokoh adat ini bisa mengurangi potensi konflik dan kesalahpahaman antar warga. Mempertahankan pasukan kepolisian sebagai pengawas di daerah pasca konflik juga bisa mengurangi rasa takut dan rasa was-was warga dalam menjalankan aktivitas harian mereka.

2. Pemulihan psikologis warga pemerintah daerah melalui badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dapat melakukan intervensi krisis dengan memberikan:

1. Bantuan konseling dan konsultasi keluarga. Bantuan konseling dan konsultasi keluarga adalah pemberian pertolongan kepada individu atau keluarga untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis secara terstruktur.

2. Pendampingan pemulihan trauma Pendampingan pemulihan trauma adalah pendampingan terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologis yang tepat kepada individu yang mengalami trauma psikologis agar dapat berfungsi secara normal kembali.
3. Pelatihan pemulihan kondisi psikologis. Pelatihan pemulihan kondisi psikologis adalah pelatihan untuk pemuka komunitas, relawan dan pihak-pihak yang ditokohkan/mampu dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologis kepada masyarakatnya.

Pentingnya dikarenakan dalam menjalankan aktivitas harian keluarga kaum pria pergi mencari nafkah keluar rumah dan menyibukkan diri dengan pekerjaan mereka sedangkan kalangan anak-anak pergi keluar rumah untuk bersekolah kemudian selepas sekolah mereka bermain bersama teman-teman mereka. Keadaannya berbeda dengan kalangan ibu rumah tangga yang berdiam diri di rumah mengurus pekerjaan rumah tangga yang secara langsung membuat mereka secara terus menerus saling berpapasan dengan bekas konflik menatap rumah yang rusak pasca konflik, sehingga mampu menyebabkan tekanan batin yang lebih tinggi dibanding kaum pria dan anak-anak.

Pada kondisi inilah para konselor mengambil peran guna rehabilitasi krisis kejiwaan pasca konflik yakni dengan menjadi teman bagi masyarakat dengan membina hubungan baik antara masyarakat dan konselor. Diharapkan dengan demikian masyarakat bisa lebih lepas mengungkapkan keluhan dan beban batin mereka kepada konselor. Hal ini juga sekaligus menjadi upaya pemulihan trauma. Keadaan seperti ini secara langsung akan mempermudah konselor dalam memberikan solusi atas krisis kejiwaan yang terjadi pada warga Balinuraga, Lampung Selatan.

Pelatihan pemulihan yang diberikan pada tokoh masyarakat adalah guna percepatan penanganan krisis

kejiwaan yang terjadi pada warga. Penulis menganggap hal ini penting karena bagaimanapun juga tokoh masyarakat adalah orang yang lebih mengerti keadaan masyarakatnya dan juga dipandang lebih dikalangan masyarakat. Sehingga akan lebih mudah bagi pemerintah melakukan pemulihan psikologis warga Balinuraga, pasca konflik. Pelatihan pemulihan yang diberikan pada tokoh masyarakat ini juga bertujuan untuk meredam potensi konflik lanjutan.

3. Peran mahasiswa, tokoh adat dan pemerintah pasca konflik

a. Peran Mahasiswa

Peran mahasiswa dalam rangka rehabilitasi krisis kejiwaan warga Balinuraga, Lampung Selatan. Penulis berpendapat peran yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah sebagai sukarelawan maupun sebagai penyedia tenaga konselor. Beberapa alasan mengapa mahasiswa dapat mengambil peran ini yang pertama sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi yakni menjalankan pengabdian kepada masyarakat, dan yang kedua mengingat fungsi mahasiswa sebagai pengayom masyarakat.

Mahasiswa dapat menjadi tenaga sukarelawan dengan melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa bisa menjadi teman bermain bagi kalangan anak-anak dengan jalan menyediakan permainan-permainan, baik untuk kalangan anak-anak maupun kalangan remaja dan mahasiswa juga bisa ikut bermain dengan mereka. Mahasiswa juga bisa menjadi penyedia tenaga konselor misalnya saja dengan mengirim rekan mahasiswa yang berpendidikan Bimbingan Konseling dan mahasiswa Psikologi karena selain dapat membantu pemerintah mereka juga bisa mempraktekkan ilmu mereka.

Mahasiswa juga bisa ikut dalam upaya pengurangan trauma melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM) Hypnoseft, Dimana rekan mahasiswa yang memiliki kemampuan hypnotis mampu mempraktekkan kemampuan mereka melalui pemberian *hypnotherapy* kepada warga Balinuraga, Lampung Selatan. Mahasiswa juga mampu mengambil peran motivasi dan pencerahan melalui UKM Kerohanian mahasiswa, yang membantu memotivasi warga melalui ceramah keagamaan. Tentu saja agama yang berbeda ditangani oleh UKM Kerohanian yang berbeda.

Pemahaman yang dapat ditarik suatu pemikiran, bahwa konflik merupakan hasil dari interaksi sosial. Konflik dapat mengakibatkan krisis kejiwaan dikalangan warga yang berkonflik. Banyak faktor yang melatar belakangi krisis kejiwaan, dan krisis kejiwaan sendiri terdiri atas beberapa bentuk namun krisis kejiwaan ini bukanlah hal yang baik untuk dibiarkan. Sehingga perlu adanya upaya Rehabilitasi. Dalam rangka rehabilitasi krisis kejiwaan warga Balinuraga pasca konflik pemerintah daerah dapat mengambil tindakan pemulihan melalui BPBD sementara itu mahasiswa juga dapat ikut ambil bagian dalam rangka pemulihan krisis kejiwaan warga Balinuraga pasca konflik melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan.

b. Peran tokoh adat dari etnis Lampung dan Bali dalam penyelesaian konflik di Lampung Selatan

Peranserta tokoh dari Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Lampung maupun Bali yang sudah berupaya dalam penyelesaian kasus tersebut. Hal ini sebagaimana dimuat dalam harian Kompas, senin 5 November 2012 dengan tajuk konflik Lampung, warga sepakat berdamai. Abhiseka Raja Majapahit Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, di hadapan Ketua Majelis Penimbang Adat Lampung Kanjeng Sutan Raja Pesirah Penata Adat Sai Bumi Rua Jurai

I, Kadarsyah Irsa, membacakan maklumat damai di Hotel Novotel Bandar Lampung, tepatnya pada hari Minggu 4 November 2012. Mereka bertekad menciptakan harmonisasi, perdamaian, tak akan mengulangi tindakan anarkistis, dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Perjanjian perdamaian ditandatangani oleh 10 orang yang mewakili masyarakat Lampung Selatan dari suku Bali dan suku Lampung. Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza absen dalam kesepakatan itu. Gubernur Lampung Sjachroeddin ZP, juga tak menghadiri acara tersebut dan diwakilkan kepada Sekretaris Pemerintah Provinsi Lampung Berlian Tihang menuturkan, gubernur tak hadir karena ke Jakarta untuk mempersiapkan kunjungan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Bali Mangku Pastika ke Lampung

Tokoh adat dari Bali dan Lampung, yang menandatangani kesepakatan itu, juga menjamin tak ada pengusiran terhadap siapa pun di daerah itu. Tokoh adat Lampung diwakili oleh Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), yang diketuai Kanjeng Sutan Raja Pesirah Penata Adat Sai Bumi Rua Jurai I, Kadarsyah Irsa. Dari tokoh adat Bali, hadir Abhiseka Raja Majapahit Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa.

Kesepakatan bertujuan mendorong perdamaian abadi pula. Tokoh adat Lampung dan Bali juga bersepakat, konflik yang terjadi pada 28-29 Oktober di Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, disebabkan adanya kepentingan sekelompok orang. Mereka mengecam kerusakan yang melibatkan warga keturunan Bali dan Lampung hingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia, penganiayaan, dan pembakaran.

Untuk menyelesaikan konflik itu, tokoh adat mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, bersikap netral dan menjunjung supremasi hukum. "Kami sepakat menolak pengusiran warga dari wilayah konflik dengan alasan apa pun. Hal ini terkait dengan dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban nasional," kata Ngurah Arya yang membacakan kesepakatan itu.

Kedua belah pihak sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku di Lampung Selatan. Jika terjadi pertikaian, perkelahian dan perselisihan yang disulut permasalahan pribadi, kelompok dan/atau antargolongan agar diselesaikan secara langsung melalui pranata yang ada. Warga yang bersalah harus diberi sanksi adat.

Kewajiban pemberian sanksi itu berlaku umum, siapa saja dari suku-suku lain yang ada di Lampung Selatan," ujar Syafrudin Husin, seorang juru runding perdamaian dan tokoh Lampung Selatan, se usai kesepakatan perdamaian itu ditandatangani pihak yang bertikai. Selanjutnya telah tercapai kesepakatan, bahwa warga Lampung Selatan resmi berdamai. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Koran Tempo terbitan senin 05 November 2012. Pihak-pihak yang bertikai seperti dari Warga suku Lampung dan suku Bali di Lampung Selatan bersepakat saling memaafkan dan tidak saling serang. Perwakilan kedua pihak yang bertikai secara resmi menekan 10 poin perjanjian damai.

Mudah-mudahan dengan perdamaian ini semua perselisihan selesai dan mereka bisa hidup berdampingan," kata Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang se usai penandatanganan perjanjian damai di gedung Balai Keraton Ruang Abung Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung.

Acara maaf-maafan dan komitmen melupakan permusuhan itu diawali dengan permintaan maaf warga suku

Bali di Lampung Selatan kepada suku Lampung. “Dari lubuk hati yang paling dalam dan niat setulus-tulusnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara kami suku Lampung,” kata Sudarsana, perwakilan warga Balinuraga Surat pernyataan maaf itu ditandatangani oleh 10 warga Bali di Lampung Selatan. Pernyataan tersebut terkait dengan tindakan warga suku Bali di Lampung Selatan yang dinilai telah menyakiti suku Lampung dan suku-suku lain di daerah itu. “Kami berjanji tidak akan mengulangi segala bentuk perbuatan atau ucapan yang dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara warga Lampung Selatan, suku Bali, dan warga suku lainnya,” kata dia.

Selain meminta maaf, warga suku Bali berjanji akan memberi sanksi adat kepada anggotanya yang memicu konflik serupa terulang dengan mengusir dari desa mereka. Mereka juga bersedia hidup berdampingan dengan suku lain di Lampung. “Kami mengakui ada cara hidup kami yang cenderung eksklusif dan tertutup, terutama di Desa Balinuraga,” kata Wayan Gambar, salah seorang tokoh adat Bali.

Setelah menyampaikan permintaan maaf, warga terutama keluarga korban menandatangani 10 kesepakatan damai. Mereka adalah ahli waris korban tewas dari kedua belah pihak, kepala kampung di Kecamatan Kalianda dan Desa Balinuraga Ketut Wardane, dan sejumlah tokoh adat. “Draf perjanjian yang ditandatangani ini merupakan kerja bertahap dan melalui proses mendekatkan antara kedua belah pihak,” kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sugiyarto, yang membidani perdamaian tersebut.

Saat Kepala Desa Agom Muchsin Syukur bertemu dengan Kepala Desa Balinuraga Ketut Wardane, keduanya saling peluk dan menangis. “Ini adalah pertemuan kami setelah perang itu,” kata Muchsin. Bentrok antarwarga

berawal dari cekcok antara warga Desa Agom dan Desa Balinuraga. Bentrokan selama dua hari mengakibatkan 14 orang tewas. Meski perdamaian sudah resmi tercapai, polisi belum akan menarik aparat dari daerah bentrokan. “Kita baru menarik pasukan setelah kondisi kembali normal,” kata Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. Selain menjaga keamanan, pasukan gabungan itu akan dikerahkan membantu warga kedua desa dalam rekonstruksi dan rehabilitasi kerusakan akibat bentrok. Para petugas akan membantu warga membersihkan puing-puing dan membangun kembali rumah mereka bersama sukarelawan lain.

Memperhatikan model penyelesaian di atas adalah menggambarkan penyelesaian dengan pendekatan sosiologi hukum, yakni penyelesaian kasus tidak selalu dilakukan pada ranah peradilan atau menggunakan sarana penal. Akan tetapi dapat ditempuh dengan kearifan lokal atau hukum adat yang berlaku dan ditaati oleh masing-masing yang bertikai. Penyelesaian seperti ini menjadi landasan untuk penyelesaian yang lebih permanen dengan diikat oleh kesepakatan yang mengikat antar pihak-pihak yang berkonflik.

B. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak pasca konflik di Way Panji Kabupaten Lampung Selatan

Mengingat konflik antar dua desa di Way Panji Kabupaten Lampung menyisakan kepedihan, kepiluan, kerugian material, moral dan masa depan bagi sebagian anak-anak, juga para perempuan yang umumnya perlu mendapatkan perlindungan secara fisik, psykis dan perlindungan hukum. Mereka sederhana dalam berpikir yang penting bisa bekerja, kembali kerumah dengan damai. Harapan itu menjadi kehendak mereka yang dipengungsian. Oleh karena itu perlu dikemukakan catatan dari Kompas 6 November 2012 dengan artikelnya sebagai berikut:

Memperhatikan aktivitas yang dilakukan oleh Miri salah seorang yang menjadi korban konflik berusaha mengais barang yang masih bisa diselamatkan di rumahnya di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan. Ia bersama 1.200 warga lain dipulangkan dari lokasi pengungsian di Sekolah Polisi Negara Polda Lampung dengan pengawalan petugas kepolisian. Warga yang kembali sementara tinggal di tenda sambil menunggu proses renovasi berlangsung terhadap rumah-rumah mereka yang porak poranda akibat konflik tersebut.

Menyimak pemberitaan bertajuk "Damailah Lampung" berakhir di kafe dan restoran Atmosphere, Bandar Lampung pada tanggal 3 November 2012 memberi suasana baru dengan gagasan untuk membangun perdamaian di Lampung, daerah yang dijuluki "Sai Bumi Ruwa Jurai" (satu bumi dua suku), dan mencegah konflik komunal terulang. Menurut pendapat Wahyu Sasongko bahwa Lampung itu miniatur Indonesia dengan argumentasi yang mendasar dikemukakan kehidupan di Lampung begitu beragam. Selain suku Lampung, juga ada Bali, Batak, Melayu, China, Padang, Sunda, Semendo (Sumatera Selatan), Banten, Madura, Bugis, dan yang paling banyak adalah suku Jawa. Bahkan, sebuah kelompok etnis yang kecil pun ada, yakni persatuan masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan masyarakat Bali dimulai sejak Tahun 1963 sudah ada suku Bali sebagai 'orang Lampung' di Lampung Selatan. Kalau saya mengunjungi saudara di Bali, mereka bilang, kapan pulang ke Lampung lagi," Wawancara dengan I Made Bagiase, pengusaha dan tokoh Lampung berdarah Bali. Artinya, kami tidak lagi diakui sebagai warga Bali, tetapi telah menjadi warga Lampung. Apabila dilihat dari komposisi secara kuantitatif, sebenarnya penduduk asli yang disebut Ulun Lampung sekitar 19 persen, sesuai data menjelang Pemilu 2009, dari total jumlah penduduk di provinsi itu. Jumlah penduduk Lampung hingga

pertengahan 2012 sekitar 7,6 juta jiwa. Karena yang paling banyak adalah etnis Jawa, pada suatu masa Lampung acap kali dijuluki "Jawa Utara".

Selanjutnya dalam lintasan sejarah, yakni sejak zaman Hindia Belanda diketahui, bahwa kehadiran warga luar Lampung, selain karena ikatan perkawinan lintas etnis atau agama, juga karena ada perpindahan penduduk besar-besaran sejak zaman Hindia Belanda. Mereka bekerja dan dipekerjakan di sektor perkebunan karet, kelapa sawit, singkong, dan tebu pada masa penjajahan dan berlanjut hingga kini.

Selain karena perpindahan mandiri atau inisiatif sendiri, migrasi itu juga karena digerakkan dengan sengaja oleh Pemerintah Hindia Belanda. Upaya mendatangkan buruh atau kuli perkebunan dari luar Lampung, terutama Jawa, secara besar-besaran dimulai tahun 1905 yang disebut program "kolonisasi" atau pada era kemerdekaan disebut "program transmigrasi".

Pada zaman kemerdekaan, setidaknya mulai tahun 1954, sudah ada penduduk Bali di Lampung. Khusus di Lampung Selatan, menurut catatan Made Bagiase, suku Bali secara resmi mulai eksis tahun 1963 dalam wadah keluarga besar Bali. Jumlahnya semakin banyak seiring dengan program transmigrasi yang terus digencarkan pada era Orde Baru. Menurut Wahyu Sasongko menyebutkan Lampung sebagai "Indonesia mini", tentu karena ada fakta sejarah dan kondisi faktual saat ini. Karena itu, sangat disayangkan jika terjadi konflik komunal yang berulang di Lampung Selatan. Dalam terminologi Hartoyo, pemerhati masalah sosial dari Universitas Lampung, konflik terjadi karena soliditas atau ikatan sosial telah meredup.

Sebagai ilustrasi tentang perlindungan hukum bagi warga yang telah berdiam di Lampung, maka Lampung mempunyai moto yang selalu didengungkan oleh warganya dalam setiap kesempatan jika mereka berkumpul. Moto yang kini menjadi tagline provinsi di ujung selatan Sumatera itu ialah "Sai Bumi Ruwa Jurai", yang secara leksikal berarti satu bumi dua suku. Suku itu adalah Pepadun

dan Saibatin, serta tidak mengenal istilah "lokal dan pendatang". Slogan itu untuk memberikan satu kesadaran kepada masyarakat tentang adanya keberagaman. Ada satu (sai) bumi Lampung, dan di sana hidup secara berdampingan kelompok besar, yakni Ulun Lampung dan "pendatang".

Pendapat dari Andy Achmad Sampurna Jaya, budayawan Lampung, dalam satu kesempatan mengatakan, Ulun Lampung memiliki falsafah hidup yang luar biasa gagah. Salah satunya terkait dengan tata hidup berdampingan satu sama lain dalam sai bumi Lampung, yakni falsafah nemui-nyimah dan nengah-nyampur. Falsafah itu mengajarkan kepada semua warga sai bumi untuk saling mengunjungi sebagai bagian dari bersilaturahmi, saling menghargai, dan ramah menerima tamu (nemui-nyimah), serta aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis (nengah-nyampur). Keduanya mengajarkan toleransi, pembauran, kebersamaan, harmonisasi, dan persatuan.

Falsafah itu, yang bersama tiga falsafah hidup lainnya, yakni piil-pusanggiri, juluk-adok, dan sakai-sambaian, termaktub dalam buku Kuntara Raja Niti. Piil-pusanggiri berarti malu melakukan pekerjaan hina dan memiliki harga diri. Arti juluk-adok memiliki kepribadian. Sakai- sambaian berarti bergotong royong dan saling membantu. Ada lima falsafah itu disimbolkan dengan lima kembang penghias siger pada lambang resmi Provinsi Lampung. Kini di semua tempat usaha serta kantor pemerintah dan swasta di daerah itu dipasang siger. Bagi warga Lampung, dengan memasang siger saja meski tanpa dilekatkan dengan tagline "Sai Bumi Ruwa Jurai", semboyan itu seolah terpatri di sana.

Sekretaris Pemerintah Provinsi Lampung Berlian Tihang menjelaskan, semula semboyan itu berbunyi "Sang Bumi Ruwa Jurai", yang berarti Lampung terdiri dari "pendatang dan penduduk lokal". Saat ini slogan itu diganti dengan sai bumi, yang berarti, semua warga yang mendiami Lampung adalah warga Lampung yang satu, tidak ada lagi pemisahan.

Konsekuensi hukum terhadap kesepakatan penandatanganan perdamaian bertujuan untuk kesejahteraan, keamanan, keternteraman bagi seluruh warga Lampung, khususnya pada masyarakat pasca konflik. Seharusnya perdamaian itu tetap dikawal, namun sosialisasi dan pembinaan sepertinya sudah lepas dari perhatian publik. Sementara kaum perempuan dan anak-anak masih mendapatkan perlakuan yang tidak seimbang dan terkesan dialihkan perhatiannya dengan kata lain adanya pembiaran.

Alasan pembiaran, kemungkinan konflik itu tetap dipelihara untuk kepentingan-kepentingan politik praktis dan lain sebagainya. Juga dalam kajian teroritis hukum dikenal dengan sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi Penanganan Konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.

Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan. Beberapa undang-undang yang erat kaitannya, bahkan menjadi dasar dan acuan bagi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan tujuan penanganan Konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-

Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.

Perlindungan hukum terhadap konflik tersebut, sebagaimana ditelusuri melalui penelitian dan artikel atau informasi dari harian, seperti Kompas, 6 November 2012, diketahui bahwa dikembalikan secara bertahap masyarakat dari daerah pengungsian. Sejak terjadinya konflik berdarah, Minggu (28/10)—yang melibatkan Desa Agom, Desa Balinuraga, dan Sidoreno, serta menewaskan 14 orang itu—warga diungsikan ke Sekolah Kepolisian Negara Polda Lampung di Kemiling, Bandar Lampung. Senin, sebanyak 1.200 warga Lampung keturunan Bali ini kembali ke Way Panji menggunakan bus-bus dan truk-truk milik Polri.

Selanjutnya proses pengembalian pengungsi dan umumnya mereka sampai de desanya masing-masing, meskipun ada sebagian warga syok dan tak mampu menahan tangis saat melihat rumah mereka rusak dan hancur terbakar. Data Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencatat total 342 rumah rusak berat dan tak bisa ditempati. Meski demikian, warga tetap menerima kenyataan. Mereka mengais puing-puing rumahnya dan mencari benda yang bisa digunakan. "Barang-barang saya habis. Untuk masak saja sudah tidak bisa. Malam ini belum tahu mau tidur di mana," ujar Suciati (50), warga Balinuraga.

Perlu sosialisasi terus disosialisasikan tentang penanganan pasca konflik, hal ini agar dapat memberikan rasa tenang bagi warga masyarakat sambil menunggu uluran tangan dari pemerintah untuk segera memperbaiki dan membangun kembali rumah-rumah mereka yang rusak. Saat ini warga tinggal di tenda yang didirikan di depan rumah mereka yang hancur. "Memang belum seluruhnya. Nanti didirikan bertahap," ujar Bambang Susiyanto, Ketua Posko Bantuan di Desa Balinuraga.

Berdasarkan kesepakatan damai, namun pada tataran implementasinya terus dikawal oleh aparat penegak hukum, pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan konflik

di Way Panji Lampung Selatan. Penempatan aparat polisi dan TNI lengkap dengan kendaraan taktisnya masih berjaga-jaga di Way Panji. Selain terkonsentrasi di Desa Balinuraga, petugas juga tersebar di sekitar Natar dan Sidomulyo. Hal ini sesuai Instruk Kapolri agar terus berjaga-jaga di Lampung Selatan hingga situasi kondusif.

Seusai menerima kunjungan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan utusan tokoh masyarakat Bali, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengaku ragu dengan efektivitas kesepakatan damai yang dicapai para tokoh masyarakat jika tidak diikuti dengan pengawasan dan sosialisasi para tokoh agama, adat, pemuda, dan aparat pemerintah.

”Kesepakatan telah ditandatangani dua pihak, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Menyosialisasikan perdamaian itu jauh lebih penting,” katanya.

Pastika berpendapat sama. ”Tak mudah mencapai perdamaian sejati. Sosialisasi ke tingkat bawah, terutama pihak yang bertikai, harus efektif. Saya menitipkan mereka semua,” ujarnya. Penyelesaian konflik di Lampung Selatan Raja Bali dan Ketua Adat Lampung melakukan maklumat bersama. Pernyataan ini dihimpun dari Tempo dan detikcom, 5 November 2012 di Lampung Selatan.

Pimpinan adat masyarakat Lampung dan raja Bali menggelar pertemuan guna mencegah terulangnya kerusuhan antara Desa Balinuraga dan Desa Agom, Lampung Selatan. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini juga dihadiri tokoh-tokoh Lampung dan Bali dari Lampung Selatan dan kabupaten/kotayanglain.

Pertemuan yang dijaga polisi ini menghasilkan maklumat yang ditandatangani Raja Bali I Gusti Ngurah Arya dan Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kadarsyah Irsya. Tokoh bali dan Lampung pun ikut tandatangan. Maklumat ini juga harus disampaikan kepada para orang Bali di Balinuraga, terutama yang masih berada di pengungsian, di SPN. Jangan hanya tokoh

adat saja yang tahu soal perdamaian ini. Masyarakat yang paling bawah jugaharustahu,kataKadarsyah.

Maklumat tersebut berisi;

1. Bersepakat bahwa terkait aksi massa dan tragedi Lampung Selatan bukan merupakan konflik SARA, namun disebabkan oleh adanya kepentingan sekelompok orang yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan warga Bali dan warga Lampung
2. Mengecam kejadian kerusuhan yang melibatkan warga Bali dan warga Lampung hingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia, penganiayaan, penjarahan, serta pembakaran harta benda dari masyarakat yang tidak berdosa
3. Bersepakat dalam beberapa hal untuk penyelesaian konflik tragedi Balinuraga yakni; menjadikan hukum sebagai panglima dalam proses penyelesaian kasus dan sebagai solusi bermartabat; bersepakat untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petugas keamanan untuk dapat mengedepankan semangat netralitas dan ketidakberpihakan dalam mengawal tuntasnya hingga pemulihan kondisi warga yang menjadi korban; memberi dorongan dan dukungan atas upaya Komnas HAM dan lembaga hukum dan masyarakat baik dalam skala lokal, nasional, dan internasional untuk mendorong terciptanya perdamaian abadi; mendorong dan memprioritaskan tuntasnya proses rekonsiliasi dan perdamaian abadi dengan melibatkan unsur-unsur adat sebagai panglima dari kebudayaan Indonesia termasuk warga adat di dalamnya; mewaspadai adanya kasus-kasus lanjutan yang saling terkait dengan sejumlah kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.
4. Bersepakat menolak pengusiran terhadap warga dari wilayah konflik dengan alasan apapun.
5. Mengimbau masyarakat adat Lampung-Bali untuk mengedepankan prinsip kebersamaan, kesatuan, dan persatuan.

Kadarsyah sepakat kerusuhan yang terjadi antara warga dua desa, Balinuraga dengan Agom, bukan konflik SARA, tapi kriminal murni. "Tidak ada itu isu SARA. Orang Lampung dan Bali sudah menjadi warga yang sama di Lampung," kata dia.

Dia pun meminta agar kekeliruan atau permasalahan yang melibatkan warga Bali dan Lampung perlu diselesaikan dengan cara adat, bukan dengan kekerasan. "Kesepakatan damai antara tokoh adat harus disampaikan ke bawah agar semua orang tahu jika sudah ada perdamaian," kata dia.

Sementara itu, Arya mengatakan akan dibentuk forum komunikasi Bali-Lampung sebagai wadah pertemuan yang melibatkan dua suku ini secara rutin. "Perlu dibuat pertemuan rutin supaya saling mengenal satu sama lain. Pertemuan bisa dilakukan tiap tiga atau enam bulan. Jika sudah ada komunikasi dan pertemuan rutin, diharapkan tidak ada lagi konflik," kata Gusti.

Raja Bali, Ketua MPAL dan sejumlah tokoh adat akan berkunjung dan melihat kondisi warga di SPN, Senin (5/11) besok. Kunjungan ini diharapkan bisa memberikan dorongan semangat dan kekuatan bagi para korban untuk bisa melanjutkan kehidupannya setelah konflik selesai.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Negara RI (Polri) Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Jakarta menyatakan, kesepakatan damai akan selalu dievaluasi, tanpa mengabaikan penegakan hukum terhadap para pemicu konflik.

Sementara itu, tokoh masyarakat dan agama di Bali meminta pemerintah memulihkan kondisi masyarakat, merehabilitasi rumah yang hancur, dan menjamin kebinekaan dan pluralisme yang hidup di Indonesia.

Adapun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi permukiman korban konflik, pemerintah pusat segera memperbaiki dan membangun rumah-rumah yang rusak dan tidak layak huni.

Analisis Konflik Dalam Peristiwa Balinuraga Di Lampung Selatan. Mengapa konflik bisa meletus di Lampung Selatan setidaknya banyak pertanyaan, sekaligus kekhawatiran, yang

muncul ketika kita dihadapkan pada situasi konflik komunal yang semakin marak di bumi pertiwi akhir-akhir ini. Konflik di Lampung hanya salah satu dari rentetan peristiwa berdarah di tanah air yang mengangkat isu-isu primordial seperti etnis, agama, kekerabatan, sebagai penyebab konflik. penulis akan sedikit mencoba mengurai benang kusut yang terdapat dalam peristiwa konflik balinuraga di Lampung Selatan dengan memakai pendekatan analisis konflik.

Menurut pendapat Mochtar bahwa sebenarnya bentrok antar warga di Lampung Selatan pada 28-29 Oktober 2012 adalah bagian tak terpisahkan dari konflik yang terjadi sebelumnya yang kembali terulang. Konflik tersebut sesungguhnya memiliki akar persoalan yang lebih dalam dari sekadar perseteruan dua kelompok etnis. Konflik-konflik sebelumnya terkait persoalan transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) hingga tambak udang, sebenarnya masih menyimpan persoalan yang belum tuntas sehingga konflik sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Di sinilah pentingnya kita melihat kembali faktor sejarah dan sosiologis di balik konflik. Di masa lalu, politik etis Belanda meliputi program irigasi, edukasi dan transmigrasi. Hal ini mendorong terjadinya proses state building dan akumulasi kapital sekaligus perubahan demografi. Perubahan itulah yang menjadi salah satu penyebab gesekan antara warga asli dengan pendatang. Terlebih lagi ketika pendatang mengungguli warga asli dalam hal ekonomi. Kecemburuan sosial dan ekonomi ini memunculkan sikap defensif sebagai “putra daerah”.

Ada penilaian tentang terulangnya konflik Lampung menunjukkan kegagalan dari pemerintah khususnya aparat keamanan untuk mencegah terjadinya konflik. Terlebih, telah diketahui bahwa konflik rawan terulang kembali. Penanganan konflik harus lebih serius lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, polisi dan tokoh masyarakat di Lampung Selatan setelah insiden-insiden sebelumnya. Aparat keamanan

gagal menurunkan ketegangan dan mencegah kekerasan karena intervensi dilakukan ketika konflik sudah hampir meluas. Yang terjadi bukan pembiaran tetapi kegagalan mencegah kekerasan pada tahap awal konflik. Masyarakat di daerah yang rawan konflik juga dinilai tidak memiliki mentalitas pencegahan. Yang ada adalah mentalitas pendekatan penanggulangan penindakan ketika kekerasan terjadi atau sesudahnya. Untuk kabupaten yang memiliki banyak indikator konflik, termasuk insiden dan kekerasan yang berulang seperti di Lampung Selatan, pencegahan harus menjadi pendekatan utama pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. Pengalaman berulangnya konflik seperti di Lampung Selatan ini menunjukkan rekam jejak polisi, militer dan pemerintah yang tidak bagus dalam menanggulangi kekerasan yang sebelumnya terjadi.

Konflik yang terjadi di Lampung Selatan baru-baru ini melibatkan dua kelompok etnis yang berbeda yaitu kelompok masyarakat setempat yang beretnis Lampung dan kelompok masyarakat pendatang beretnis Bali. Sebenarnya, etnis Lampung sebagai “suku asli” ternyata bukanlah mayoritas dari segi jumlah. Kelompok etnis Jawa yang pendatang justru menjadi mayoritas. Etnis Bali termasuk minoritas di kalangan masyarakat Lampung Selatan sebagaimana yang ditulis dalam berbagai laporan media mengenai peristiwa tersebut.

Selain dua kelompok yang berkonflik, dapat diidentifikasi aktor-aktor lain yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa konflik tersebut. Yang pertama adalah pemerintah daerah setempat. Dalam beberapa kasus yang mencuat, kebijakan bupati dan gubernur Lampung Selatan yang agak sensitif menjadi faktor pendorong dan pemicu konflik. Sangat disayangkan, dalam beberapa kasus, aparat pemerintahan seperti bupati dan gubernur, justru menjadi bagian dari konflik alih-alih menjadi mediator. Yang kedua adalah aparat kepolisian dan militer yang berada di daerah konflik tersebut bukan saja menjadi mediator tetapi juga untuk menurunkan eskalasi konflik. Ketiga, LSM-LSM yang telah ada dan baru datang kemudian dalam rangka penyembuhan trauma

konflik di kalangan anak-anak dan remaja. Dapat dikatakan, dalam konflik Lampung Selatan, masyarakat setempatlah yang menjadi aktor perdamaian utama melalui serangkaian upaya rekonsiliasi.

Beberapa faktor di balik muncul dan berkembangnya konflik yang ada terdiri dari faktor akar atau root causes yang seringkali tidak tampak di permukaan namun sangat menentukan. Beberapa kerusuhan berdarah yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan dengan kerangka kesenjangan ekonomi atau perbedaan penguasaan atas akses sumber daya ekonomi. Kerusuhan antara etnis Dayak dan Madura di Sampit Kalimantan misalnya, bukan hanya disebabkan bangkitnya identitas kelompok tetapi juga disuburkan oleh tersisihnya etnis Dayak dari penguasaan politik-ekonomi selama puluhan tahun. Konflik Lampung Selatan juga dapat diteropong dengan kerangka tersebut. Ketimpangan dalam penguasaan akses ekonomi antara etnis lokal dan pendatang sangat mungkin menyuburkan potensi konflik akibat perbedaan etnis di wilayah tersebut.

Kelompok masyarakat etnis Bali di Lampung Selatan sebagai penguasa sektor ekonomi transportasi dan komunikasi, sebagaimana laporan beberapa media, adalah terbesar kedua di Kabupaten Lampung Selatan. Sementara kelompok asli Lampung “hanya” menjadi penonton dari kemajuan pesat perkembangan perekonomian kelompok masyarakat keturunan Bali, menjadi wong cilik yang bekerja di beragam sektor ekonomi. Kecemburuan sosial berbasis ekonomi inilah yang dapat diduga sebagai akar konflik yang ada tersebut. Akar konflik biasanya merupakan ketimpangan-ketimpangan, deprivasi, ataupun kesenjangan yang terjadi secara mendalam, terstruktur dan terinternalisasi di dalam tubuh masyarakat, tidak terlihat dan bahkan seringkali terabaikan. Adapun faktor pendorongnya adalah relasi antar masyarakat yang semakin renggang karena bergesernya tradisi hidup bersama menjadi individualistik, bergesernya tradisi generasi lama yang berupaya menciptakan harmonisasi hidup bersama menjadi tradisi

generasi baru yang lebih mengedepankan cara pandang egosentris sehingga mudah terluka dan marah ketika kelompok atau anggota kelompoknya terganggu. Faktor pemicu dalam konteks konflik Lampung Selatan adalah beragam insiden-insiden kecil yang menyulut bara kecemburuan sosial-ekonomi.

Sementara peristiwa yang menyebabkan pergolakan sosial di Lampung Selatan awalnya lebih karena persoalan tanah atau lahan perkebunan. Namun, kini pemicunya adalah insiden-insiden kecil yang cenderung merupakan hal-hal sepele. Insiden Napal dipicu perebutan lahan parkir. Kasus Way Panji karena kenakalan remaja di mana dua gadis Agom pengendara sepeda motor dihadang pemuda Balinuraga bersepeda hingga mereka jatuh.

Menurut Syafarudin dari Universitas Lampung melalui harian Lampung Post pada tanggal 29 oktober 2012, menyatakan bahwa konflik yang pernah ada selama ini tidak pernah ditangani secara tuntas, implementasinya rendah dan tidak maksimalnya peran pranata yang ada, khususnya pemerintah lokal yang seharusnya dekat dengan masyarakat dan mengayomi. Pemerintah lokal harus menjadi fasilitator dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pemimpin harus hadir di tengah rakyat sehingga ketika ada letupan sekecil apapun, dapat menjadi tokoh yang didengar dan mau mendengarkan serta disegani.

Akhirnya dapat dipahami, bahwa konflik yang penuh dengan kekerasan di Lampung Selatan adalah sebuah rangkaian dari kekerasan struktural berupa kesenjangan ekonomi, dimana pada satu sisi ada kelompok yang diuntungkan oleh struktur penguasaan sumber daya ekonomi yang ada dan di sisi lain ada kelompok yang tersisihkan, serta kekerasan kultural berupa perbedaan etnis yang “melegitimasi” bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Tanpa upaya memutus mata rantai segitiga kekerasan ini, konflik-konflik akan terus bermunculan, sewaktu-waktu tanpa pernah dapat diduga.

Menggungah atau mengambil hikmah dari statemen yang telah dicanangkan oleh pendiri Republik Indonesia antara lain tujuannya adalah untuk mewujudkan Persatuan Indonesia Dan Keadilan

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagaimana diidentifikasi di atas, bahwa salah satu faktor konflik di Lampung Selatan adalah adanya ketimpangan ekonomi, perlu disadari bersama bahwa kemiskinan yang ada di masyarakat harus dilihat secara lebih komprehensif. Kemiskinan mendasar adalah tidak adanya peluang dan kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidup sehingga memungkinkan manusia mendapatkan fasilitas-fasilitas ekonomi dasar, pekerjaan, perlindungan keamanan dan pengakuan identitas kulturalnya.

Pada hakikatnya manusia pada saat lahir memiliki kedudukan sama, baik secara ekonomi, politik, sosial dan hukum, sebagai warga negara. Namun kondisi struktural-kultural yang timpang di sekitarnya membuat tiap-tiap anggota masyarakat tidak memiliki akses yang sama dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Kemiskinan dalam arti struktural dan sosial merupakan sumber penyebab utama terjadinya berbagai bentuk konflik, kekerasan, gejolak politik di masyarakat. Kemiskinan struktural sangat terkait dengan bentuk kekerasan lain seperti represi politik, ketidakamanan dan alienasi kultural.

Faktor kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan seringkali mendorong munculnya gejolak sosial yang selanjutnya mengundang represi politik. Represi politik seringkali disertai kekuatan paksa dari negara dalam bentuk mobilisasi militer dan aparat keamanan, sehingga menciptakan ketidakamanan. Ketidakamanan seringkali disertai alienasi budaya karena diskriminasi dan marginalisasi kelompok yang berlangsung di masyarakat. Demikian seterusnya, kemiskinan sosial pada akhirnya membawa akibat manusia terjebak dalam lingkaran kekerasan. Pembangunan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidup warga negara bukan hanya gagal tetapi menciptakan kekerasan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Pada prinsipnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebuah pembangunan yang mengedepankan pendekatan rasa persatuan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada semangat perdamaian dan berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk memperlembut, memperlunak praktik dan penentuan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan secara keras, dengan strategi dan cara otoritatif, mengabaikan kekuasaan berdimensi moral-kultural, disertai tekanan politik, berbasis organisasi ekonomi skala besar, dan mengabaikan dimensi kebutuhan dan hak dasar manusia sehingga menimbulkan kerusakan dan kekerasan, baik terhadap lingkungan alam maupun komunitas manusia.

Pencapaian perdamaian di balinuraga Lampung Selatan dapat dilakukan terutama dengan mengingat sejarah manis hubungan kedua belah pihak di masa lalu (bukan romantisme sejarah) sebagai sebuah alat peretas dikotomi yang ada hari ini yang kemudian dijadikan sebagai alat perekat kebangsaan yang mulai sedikit bergeser di wilayah tersebut. Dimana kerusuhan bernuansa etnis tidak pernah terjadi pada masa lalu di wilayah tersebut. Akulturasi berupa perkawinan antara etnis ulun (asli) Lampung dengan keturunan Bali pernah ada di Balinuraga. Hubungan simbiosis antara warga Lampung dan keturunan Bali misalnya tercermin dalam jual beli janur untuk kebutuhan hari raya.

Upaya perdamaian dan rekonsiliasi yang terus dilakukan pun menyusul konflik sosial yang menewaskan 14 orang pada Minggu dan Senin, 28-29 Oktober 2012, meski terus digalakkan secara berkesinambungan dan dalam tempo yang tidak singkat serta harus senantiasa ada tindak lanjut secara kontiniu. Sehingga, pertikaian yang melibatkan warga desa Agom kecamatan Kalianda dan desa Balinuraga kecamatan Way Panji tidak turut berimbas pada ketegangan desa-desa di sekitarnya atau bahkan di seluruh penjuru wilayah bangsa dan negara ini. Jero Gede Bawati dari kantor berita Antara pada tanggal 30 Oktober 2012, salah satu tetua masyarakat Balinuraga mengatakan bahwa di awal masa transmigrasi di

Balinuraga sesungguhnya antarwarga pernah hidup berdampingan dan saling bantu. Keharmonisan yang ada pada masa lalu itu harus secepatnya dapat dikembalikan, agar kejadian semacam ini dapat dengan cepat teratasi di masa yang akan datang.

Pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan selama ini, mestinya memang harus melandaskan pada semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam Pancasila sebagai landasan ideologi dalam setiap aspek kehidupan bangsa dan negara ini, guna meretas segala bentuk dikotomi yang ada, yang mana merupakan sebuah keniscayaan di negeri ini. Namun yang terpenting dari seluruh paparan tersebut, penulis hanya ingin mengingatkan diri sendiri dan para pembaca bahwa bangsa ini didirikan dan bisa eksis sampai hari ini disebabkan oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan yang dilandasi oleh nilai dari semangat gotong royong guna mencapai sebuah masyarakat yang adil dan sentosa dalam setiap aspek kehidupan yang menopang bangsa dan negara ini. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah harga mati yang harus digali lagi secara mendalam atas segala bentuk ketimpangan yang ada di negeri ini, yang tentunya juga tidak mengenyampingkan sila-sila lain dalam pancasila itu sendiri sebagai sebuah kesatuan untuk menuju masyarakat yang plural namun adil dan makmur.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dimulai dari latar belakang dan ditemukaanya permasalahan, lalu digali data empirik menggunakan metode yang telah ditentukan, kemudian di analisis dengan menggunakan teoritis sebagai pemahaman yang komprehensif untuk ditarik suatu konklusi, yakni sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya konflik antar desa Agom dan Balinuraga di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan adalah luapan massa yang dipicu oleh pelecehan terhadap dua gadis remaja oleh pemuda. Atas kejadian tersebut kemudian terjadi bentrokan masa yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 166 rumah yang hancur serta dibakar oleh masa. Faktor lain rapuhnya ikatan hubungan kekeluargaan, nilai-nilai budaya dasar yang dibangun atas dasar saling menghargai dan kepercayaan. Juga faktor keamanan yang minim serta peranan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang lamban dan tidak mengantisipasi akan terjadinya konflik horizontal.
2. Upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan preventif dengan menurunkan aparat keamanan yang meliputi unsur TNI, Polri, Pol PP, keamanan dari masyarakat dengan melokalisir lokasi bentrok yang diharapkan tidak akan lagi terjadi bentrok susulan. Aparat gabungan memobilisir korban konflik diungsikan di Sekolah Polisi Nasional (SPN) di Kemiling Bandar Lampung tujuannya untuk memberikan rasa aman dan jauh dari daerah konflik. Peran pemerintah, Kesehatan, praktisi, pemerhati, Komnas Ham, Partai Politik, LSM, Komunitas Mahasiswa memberikan penanganan pasca konflik dengan pendampingan, perlindungan baik secara medis, psykis, maupun bantuan material untuk rekonsiliasi dan pembangunan kembali rumah-rumah yang

hancur/terbakar di wilayah konflik. Selanjutnya pemulangan kembali pengungsi ke daerah masing-masing untuk kembali menjalani kehidupan pasca konflik.

3. Perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak-anak dilakukan dengan pendekatan persuasif, preventif dan pendampingan. Langkah yang ditempuh memberikan tempat yang aman, ketersediaan fasilitas, pendampingan bagi korban konflik di pengungsian maupun setelah dikembalikan ke desa masing-masing. Secara preventif dengan adanya perjanjian damai antara dua tokoh adat Lampung dan Bali yang difasilitasi oleh organisasi, juga difasilitasi oleh gubernur Lampung dan Bali, didorong oleh kepentingan politik, baik daerah maupun nasional serta pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan hukum melalui program pasca konflik di Way Panji Lampung Selatan. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak adalah wajib dilakukan dan hak mereka yang harus dilindungi oleh negara. Selanjutnya penyelesaian konflik melalui pendekatan sosiologis sebenarnya sebagian sudah dilakukan, yakni dengan pendekatan persuasif, preventif, rehabilitasi, perjanjian damai menjadi upaya penyelesaian secara sosiologis dengan mendasarkan pada hukum adat atau kearifan lokal masing-masing desa, etnis Lampung dan etnis Bali dengan duduk bersama menyelesaikan konflik di Way Panji Lampung Selatan.

B.Saran

1. Rekomendasi hasil penelitian ini salah satunya mengenai faktor penyebab konflik di Way Panji Lampung Selatan, pada hakekatnya merupakan konflik komunal yang diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi, tidak harmonisnya komunikasi dan hubungan antar etnis, desa, agama. Hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Namun beberapa kali pergantian kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten

Lampung Selatan tidak peka dan mengantisipasi akan terjadinya bentrok yang menyebabkan korban material, nyawa dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat diambil suatu hikmah, bahwa dengan konflik yang terjadi dapat memberikan perubahan, pemikiran, penyejahteraan bagi warga masyarakat khususnya di Way Panji dan umumnya di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Bagi aparat keamanan untuk dapat memberikan rasa aman dengan koordinasi yang baik dan memanfaatkan sistem keamanan lingkungan yang ada di masing-masing daerah. Hal ini lebih dimungkinkan akan dapat mengantisipasi setiap gejala sosial, setiap gerakan yang akan membuat kerusakan atau konflik dapat segera dicegah sehingga keamanan, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan semua pihak dalam menyikapi konflik di Way Panji Lampung Selatan.

2. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak menjadi suatu keharusan dilakukan, mengingat perempuan dan anak-anak wajib dilindungi dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seharusnya aparat keamanan lebih meningkatkan fungsi intelegen untuk melindungi warga masyarakat, pemerintah dengan kekuasaannya lebih memberikan perhatian yang berimbang terhadap kesenjangan ekonomi, budaya, politik dengan mengedepankan pembangunan yang memberikan rasa keadilan dan menyejahterakan masyarakat di Way Panji dan umumnya di Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya bagi praktisi, LSM, dan lain sebagainya dalam menangani konflik tidak mengambil keuntungan baik secara politis, material, melainkan sebagai suatu panggilan mulia untuk turut menyelesaikan konflik. Pendekatan sosiologis lebih memungkinkan dilakukan daripada

melalui pendekatan secara represif di pengadilan. Hal ini akan menjadi sumbangsih bagi pembangunan hukum di Indonesia dan khususnya di dua desa tempat konflik diharapkan dapat memberikan rasa aman, sejahtera sehingga trauma konflik akan puluh secara beransur-ansur dan menjadikan dua desa damai serta tidak terjadi konflik kembali dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Achmat Ali, *Menguak tabir Hukum: Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- , *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, PT Yasrif Watampone, Jakarta, 1998
- A.A.G. Peters (Universitas Utrecht), Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990
- Agus Salim, *Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002
- , *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzim Guba dan Penerapannya*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ahmad Tohaputra, *An Nur, Al Qur'an Dan Terjemahan*, Asy Syifa, Semarang, 1998
- Ahmad Gunaryo dan Muamar Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo, Semarang, 2006
- Amir Syiharifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2002

Ankie M. Hoogveld, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Rajawali Press, Jakarta, 1985

A. Mandali Mandan, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, 2004

Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam rangka mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Makalah FH Unila, Lampung, 1996

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Ilmu Hukum, Makalah Bahan Matrikulasi PDIH S 3 Undip*, Semarang, 13 September 2005

Budhy dan Rahman Munawar, *Refleksi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Keagamaan, dalam Keadilan Sosial Upaya mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2004

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Karya, Jakarta, 1998

Bryan.A.Garner, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, West Group, ST. Paul, Minn, 1999

Berita Meneg RI Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 8 Maret 2007

- Charles Himawan, *Hukum sebagai Panglima*, Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Dasril, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Adat Meranjat*, Unila, Bandar Lampung, 1986
- Direktori Penelitian Agama, *Konflik dan Perdamaian*, Komnas HAM, Jakarta, 2005
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan (revisi terbaru)*, CV. Asy Syifa', Semarang, 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Direktori Penelitian Agama, *Konflik dan Perdamaian*, Komnas HAM, Jakarta, 2005
- Djojodigono, MM, *Asas-Asas Hukum Adat*, BBP. Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1976
- Don Matindale, *The Nature and Types of Sociological Theory*, Boston, HoughtonMifflin Co, 1960
- Edmund Burke and Ira M. Lapidus, *Islam, Politics, and Social Movements*, University of California Press, Berkeley, 1988
- Eka Darma Putera, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etnis dan Budaya*, PT BPK Gunung Mulia, Cetakan ke 6, Jakarta, 1997
- Erlyn Indarti, Selayang Pandang Critical Theory, *Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies*, FH. Undip, Semarang, 3 Juli 2002

- Esmi warassih, *Pengaruh Budaya Hukum terhadap Fungsi Hukum*, Alumni, Bandung, 1981
- Fachry Ali, *Musyawarah dan Demokrasi sebagai Dasar Etika Politik Islam*, Dirjend. Pendidikan Islam, Depag. RI, Makalah, Palembang, 4 Nopember 2008
- George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Pranada Media, Jakarta, 2005
- , *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- , *Teori Sosial Postmodern* terjemahan Muhammad taufik, Kreasi Wacana dan Juxtapose Research and Publication Study Club, Yogyakarta, 2003
- Gobbe E. Dan C. Adrianse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgonje Semara Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, buku IX, INIS, Jakarta, 1993
- Hadist Riwayat Turmudzi, al-Jami'al al-shasih, Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, tt.
- Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2007
- H.L.A. Hart, *The concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1972
- Hans georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode* penejemah: Ahmad Sahidah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Perkawinan*, Fokusmedia, Bandung, 2005.

I Gede AB. Wira, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Lawrence M Friedman, *Legal Rules and The Process of Social Changes. Law and Development, A General Model*, Dalam Law and Society Review, No. VI. 1972

-----, *The Legal System*, Rusell Sage Foudation,
N e w Y o r k , 1 9 7 5 .

Lexy Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996

Masri Singarimbun dan Soyan Effendi, *Metodologi Penelitian social*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989

Muladi, *Demokratisasi hak asasi manusia dan reformasi hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002

Murtadho Munthahari, *Hak-hak wanita Islam dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1997

Nursyahid, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT*, Panca Usaha, Jakarta, 2004.

Nurhadian tornmo, *Hukum Integrasi Sosial: Konflik-konflik Sosial Pri non Pri dan Keadilan Sosial*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005

Philip Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: toward responsive law*, Harpa and row, New York, 1978.

- , *Toward Responsive Law, Law and Society in Transitions*, 1978, With New Introduction by Robert A. Kagan, New Brunswick, New Jersey, 2001.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Rahmat Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang Konsep dan Implementasinya*, Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, Malang, 2006.
- Roman Tomasic, *The Sociology of Law*, London : Sage Publications/International Sociological Association, 1985.
- Tie Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila, Supersukses Yogyakarta, 1998
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, IKIP Malang, 1990.
- Sajuti Thalib, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam), Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Sajuti Thalib, *Recitio A Contrario, Hubungan Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Grafindo, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2004
- , *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, tt

- , *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, UMS Press, Surakarta, 2002
- , *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980
- , *Beberapa Pemikiran tentang Rancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- , *Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit, Buku Kompas, Jakarta, 2003
- , *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Muhammadiyah Press, Surakarta, 2004
- , *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- , *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Cetakan kedua, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Persada, Jakarta, 1999.

----- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*,
suatu Tinjauan Singkat, Radjawali Press, 1985

-----, *Pengantar sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta,
1976.

-----, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka setia,
Bandung, 2002

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta,
1990

Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan
terhadap Realitas Sosial*, Edisi kedua, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003

S.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap*, Angkasa Offset, Bandung,
1980

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006

Winarno Surakhmat, *Dasar dan Tehnik research*, Tarsito,
Bandung, 1978

Yusriadi, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap
Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakkan Hukum di
Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang
sosiologi Hukum, Universitas Diponegoro semarang,
2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, *HAM*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2007

Impres, Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung, 2007

Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, *KHI pasal 55 ayat 2*, Fokus media, Jakarta, 2007

Majalah, Koran, Artikel, Makalah, Media Elektronik TV dan Internet

Berita Meneg RI *Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta, 8 Maret 2007

-----, *Penelitian Socio Legal: Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, Kumpulan Makalah, Undip, 2007

Komnas HAM, Suar, Vol. 09. *Warta HAM*, Majalah terbit April 2002

Majalah Amanah, No. 49 Th XVII April 2004

Daftar pustaka dan beberapa lampiran serta kurikulum vitae.

Kurikulum Vitae:

Nama : Dr. Drs. H.M. Wagianto, SH. MH
Nip. : 1962
Pangkat/gol : Lektor Kepala (IV/a)
Unit kerja : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Alamat : Jln. Imam Bonjol Gg. Terong No. 29 Kemiling
Bandar Lampung : Telp. (0721) 271770- 272816 dan HP.
081640962

